

**PERANAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL)
DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI
(STUDI KASUS PADA KELOMPOK TANI TANAMAN PANGAN
DI PESISIR PANTAI KABUPATEN CIREBON)**

DISERTASI

**Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Doktor
Program Studi : Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat
Minat Studi : Pelatihan/Pendidikan Luar Sekolah**



Oleh
ACHMAD FAQIH
NIM : T 620208002

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2013**

commit to user

**PERANAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL)
DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI
(STUDI KASUS PADA KELOMPOK TANI TANAMAN PANGAN
DI PESISIR PANTAI KABUPATEN CIREBON)**

Disusun Oleh :

ACHMAD FAQIH
NIM : T 620208002

Telah disetujui oleh Tim Promotor :

Dewan Promotor

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Promotor Utama	Prof. Dr.Ir. Totok Mardikanto., M.S NIP.194707131981031001
Co Promotor I	Dr. Ir. Tubagus Hasanudin., M.S NIP. 195903211985061001
Co Promotor II	Dr. Sapja Anantanyu., SP., M.Si NIP. 195903211985061001

Mengetahui :
Ketua Program Studi Penyuluhan Pembangunan/
Pemberdayaan Masyarakat,

Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto., M.S
NIP.194707131981031001

**PERANAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL)
DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI
(STUDI KASUS PADA KELOMPOK TANI TANAMAN PANGAN
DI PESISIR PANTAI KABUPATEN CIREBON)**

DISERTASI

Oleh :

ACHMAD FAQIH

NIM : T 620208002

Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Prof. Dr. Ravik Karsidi., MS NIP. 195707071981031006
Sekretaris	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus., MS NIP. 196107171986011001
Anggota Penguji	Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto., MS NIP. 194707131981031001
	Dr. Ir. Tubagus Hasanudin., MS NIP. 195903211985061001
	Dr. Sapja Anantanyu., SP., M.Si NIP. 196812271994031002
	Dr. Ir. Kusnandar., MS NIP. 1967070319922031004
	Dr. Ir. Iman Sungkawa., MM NIP. 195406171982111001
	Dr. Andin H. Taryoto NIP. 195401241979011001
	Dr. Lukman Effendy., M.Si NIP. 195008011986031001

**Telah dipertahankan di depan penguji
Pada Sidang Senat Terbuka Terbatas
Universitas Sebelas Maret
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
pada tanggal 28 Mei 2013**

Mengetahui
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Rektor,

Prof. Dr. Ravik Karsidi., MS
NIP. 19570707 198103 1006

commit to user

Surat Pernyataan Orisinalitas Disertasi**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah, saya :

Nama : Achmad Faqih
NIM : T620208002
Program : Pascasarjana (S3) UNS
Program Studi : Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat
Minat Utama Pelatihan (Pendidikan Luar Sekolah)
Tempat dan Tanggal Lahir : Cirebon, 23 Nopember 1968
Alamat Rumah : Puri Celancang 2 Blok C4 No.72 RT.02 RW.08 Desa
Purwawinangun Kecamatan Suranenggala Kabupaten
Cirebon Propinsi Jawa Barat
Telp/HP : 081313025612
Alamat e-mail : afaqih39@yahoo.com

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa disertasi berjudul: "Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Tanaman Pangan Di Pesisir Pantai Kabupaten Cirebon)" ini adalah asli (bukan jiplakan) dan betul-betul karya saya sendiri serta belum pernah diajukan oleh penulis lain untuk memperoleh gelar akademik tertentu.

Semua temuan, pendapat, atau gagasan orang lain yang dikutip dalam disertasi ini saya tempuh melalui tradisi akademik yang berlaku dan saya cantumkan dalam sumber rujukan dan atau saya tunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Surakarta, Mei 2013
Yang membuat pernyataan,

Achmad Faqih
T620208002



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Alhamdulillahirobbil'aalamiin. Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala taufik dan hidayah-Nya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini yang berjudul “Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Tanaman Pangan di Pesisir Pantai Kabupaten Cirebon)”.

Disertasi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai Kabupaten Cirebon. Disertasi ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar akademik Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis sadar bahwa apa yang telah dilaksanakan bukan semata-mata keberhasilan pribadi melainkan juga berkat kepedulian, bimbingan dan dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, M.S, sebagai Promotor dan Ketua Program Studi Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, keterbukaan, ketelitian, dan kedalaman wawasan serta sifat kearifan sehingga membuka wawasan berpikir penulis selama melaksanakan pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Dr. Ir. Tubagus Hasanudin, M.S, sebagai Co Promotor I yang telah membimbing penulis menghasilkan karya ilmiah ini.

commit to user

3. Dr. Sapja Anantanyu, SP, M.Si, sebagai Co Promotor II dan Sekretaris Program Studi Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat yang telah membimbing, memfasilitasi dan mengarahkan penulis selama melaksanakan pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta dan sebagai ketua penguji sidang disertasi.
5. Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta dan sebagai sekretaris penguji sidang disertasi
6. Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, yang telah memberikan bantuan material dan non material serta kesempatan kepada penulis untuk dapat melanjutkan studi ke jenjang S3
7. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melanjutkan studi ke jenjang S3.
8. Dr. Ir. Kusnandar, M.Si selaku anggota tim penguji dari dalam UNS, telah menyediakan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan pada penyempurnaan disertasi ini.
9. Dr. Ir. Iman Sungkawa, M.M, selaku anggota tim penguji dari luar UNS, telah menyediakan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan pada penyempurnaan disertasi ini.
10. Prof. Dr. dr. A.A. Subijanto, M.S. selaku anggota tim penguji, telah menyediakan waktunya dan memberikan masukan pada penyempurnaan disertasi ini.

commit to user

11. Dr. Lukman Effendy., M.Si. selaku anggota tim penilai dari luar UNS, berkenan telah menyediakan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan, walaupun beliau sangat sibuk bertugas sebagai Dosen dan Plh Ketua STPP Bogor.
12. Dr. Andin H. Taryoto, selaku anggota tim penilai dari luar UNS, berkenan telah menyediakan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan, walaupun beliau sangat sibuk bertugas sebagai dosen pada Sekolah Tinggi Perikanan Bogor.
13. Bupati Cirebon dan Kepala BKP5K Kabupaten Cirebon, yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian di wilayahnya.
14. Kepala BP3K Kecamatan Gunung Jati dan Suranenggala Kabupaten Cirebon, Camat Gunung Jati dan Camat Suranenggala Kabupaten Cirebon, yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian di wilayahnya.
15. Penyuluh Pertanian Lapangan dan pengurus serta anggota kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai Kecamatan Gunung Jati dan Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon yang banyak membantu dan memfasilitasi penulis dalam melaksanakan penelitian di lapangan.
16. Staf dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, khususnya Program Studi Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat.
17. Teman-teman mahasiswa Program Doktor Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat yang telah banyak membantu dan bekerja sama selama penulis mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana UNS.
18. Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

commit to user

19. Terakhir penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang luar biasa pada istri dan anak-anak yang telah sabar dan berbesar hati untuk memberikan waktu kepada penulis untuk menempuh pendidikan S3 di Program Pascasajana UNS.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua pengorbanan ini dengan kebaikan tak terhingga. Akhirnya hanya kepada Allah SWT segala sesuatu akan dikembalikan, semoga rahmat dan karunia-NYA senantiasa dilimpahkan pada kita semua. Amin.



Surakarta, Mei 2013

Penulis

Achmad Faqih. T 620208002. Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani (Studi kasus pada kelompok tani tanaman pangan di pesisir pantai Kabupaten Cirebon). Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pembimbing: Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, M.S (Promotor), Dr. Ir. Tubagus Hasanudin, M.S (Co-Promotor I), Dr. Sapja Anantanyu, SP., M.Si (Co-Promotor II).

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peranan Penyuluh Pertanian Lapangan dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai meliputi : (1) keadaan pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani, (2) peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani, (3) faktor yang mendukung peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani, (4) penilaian kelompok tani terhadap peranan PPL, (5) hasil peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani, dan (6) model peranan PPL yang efektif dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan tujuan untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap obyek yang terbatas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani oleh PPL di lokasi penelitian diawali dengan mengidentifikasi, dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya, menyusun rencana kegiatan pemberdayaan melalui pembuatan rencana kebutuhan kelompok dan rencana definitif kebutuhan kelompok, menerapkan rencana kegiatan pemberdayaan kelompok melalui pengadaan sarana prasarana produksi, kegiatan persiapan tanaman (persemaian), proses penanaman, pemeliharaan tanaman (penyiangan, pengairan, pemupukan berimbang, dan pengendalian hama penyakit), penanganan panen, pasca panen dan pemasaran, serta memantau proses dan hasil kegiatan pemberdayaan, (2) Peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai di lokasi penelitian yang telah dilaksanakan adalah sebagai guru, organisator, fasilitator, konsultan, supervisor, pemantau, dan evaluator, peranan tersebut yang belum sesuai harapan kelompok tani adalah peranan PPL sebagai fasilitator atau jembatan antara kelompok tani dengan pihak luar dan peranan sebagai evaluator, (3) Faktor yang mendukung peranan Penyuluh Pertanian Lapangan dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai di bagi 2 (dua) yaitu faktor eksternal dan faktor intrnal. Faktor eksternal meliputi : dukungan Kuwu, dukungan Dinas Pertanian dan BKP5K (Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan), dukungan biaya dan dukungan sarana prasarana. Faktor internal meliputi: kepemimpinan kontak tani, sikap anggota kelompok dalam mendukung keberhasilan kelompok, kesempatan anggota kelompok dalam pengembangan kerjasama, dan solidaritas kelompok, (4) Penilaian kelompok tani terhadap peranan PPL sebagai guru dalam pemberdayaan kelompok tani PPL aktif dalam proses pembelajaran dan aktif menyampaikan informasi dan teknologi usahatani; sebagai organisator PPL aktif melakukan pengorganisasian pemenuhan kebutuhan kelompok dan menggerakkan partisipasi anggota; sebagai konsultan PPL aktif membantu memecahkan masalah; sebagai fasilitator PPL kurang aktif dalam memfasilitasi kerjasama dengan pihak luar (lembaga keuangan dan

lembaga usaha pertanian/lembaga pengadaan sarana produksi); sebagai supervisor PPL aktif melakukan pembinaan dan penilaian terhadap perkembangan usahatani; sebagai pemantau PPL aktif mengadakan pengamatan aktifitas kelompok; sebagai evaluator PPL kurang aktif dalam kegiatan evaluasi karena hanya pada pelaksanaan kegiatan dan akhir kegiatan belum pada perencanaan kegiatan dan dampak (*outcome*) hasil kegiatan pemberdayaan kelompok tani, (5) Hasil pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai oleh PPL digambarkan pada perubahan partisipasi kelompok, produktivitas kelompok, dinamika kelompok, dan kemandirian kelompok yang lebih baik dari pada sebelum adanya pemberdayaan kelompok tani oleh PPL, (6) Model peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani harus memperhatikan kebutuhan kelompok tani, karakteristik kelompok tani dan PPL, budaya lokal, profesionalisme PPL, faktor eksternal dan internal kelompok dan program pemberdayaan yang dibuat untuk meningkatkan keberdayaan kelompok tani dalam mencapai kesejahteraan anggota kelompok.

Kata Kunci: Peranan, Penyuluh Pertanian Lapangan, Pemberdayaan, Kelompok Tani, Pesisir Pantai



Achmad Faqih. T620208002. The Roles of the Agricultural Extension Workers in the Empowerment of Crop Farmer Groups (A Case Study to Crop Farmer Groups at the Coastal Area of Cirebon Regency). Dissertation: The Postgraduate Program in Extension Program, Sebelas Maret University, Surakarta. Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto., MS (Principal Promoter), Ir. Tubagus Hasanudin, MS. (Co-Promoter I), Dr. Sapja Anantanyu, SP., M.Si. (Co-promoter II)

SUMMARY

The objectives of this research are to describe and analyze the roles of the agricultural extension workers in the empowerment of crop farmer groups at the coastal area, which include: (1) the conditions of the empowerment of the crop farmer groups, (2) roles of the agricultural extension workers, (3) factors, which support the roles of the agricultural extension workers, (4) the crop farmer groups' evaluation on the roles of the agricultural extension workers, (5) the results of the roles of the agricultural extension workers in the empowerment of the crop farmer groups, and (6) the effective model of the roles of the agricultural extension workers in the empowerment of crop farmer groups at the coastal area. This research used the qualitative research method. It used a case study strategy in order to study the limited objects in depth.

The result of the research are as follows: 1) The empowerment of crop farmer groups begins with identifying and studying the potentials, problems, and opportunities of the area, arranging the activity plans of the empowerment through the plan of the groups' needs and the definitive plan of the groups' needs, implementing the activity plans of the empowerment through the procurement of production facility and infrastructure, seedbed preparation activities, planting process, plant husbandry (crop weeding, crop watering, balanced fertilizing, and pest controlling), harvest, post-harvest, and marketing handling, and observing the process and results of the empowerment activities, 2) The roles of the agricultural extension workers in the empowerment of crop farmer groups at the coastal area are as teachers, organizers, facilitators, consultants, supervisors, analysts, and evaluators. The roles which are thought to have not been in compliance with the expectation of the farmer groups are as facilitators and evaluators, 3) The factors which support the roles of the agricultural extension workers can be classified into two, namely: external factor and internal factor. The former includes supports given by village heads (*kuwu*), the Office of Agriculture, and BKP5K (Food Security and Agricultural, Fishery, and Forestry Extension Implementing Agency), capital supports, and facility and infrastructure supports. Reversely, the latter includes the strengths which have direct effects but result from the organizations or farming groups such as farmer contact leadership, attitude of the members of the crop farmer groups to support the success of the crop farmer groups, farmer group members the opportunity to develop cooperation, and solidarity of crop farmer groups, 4) Assessment of the role of farmer groups in empowering teachers the agricultural extension workers as the agricultural extension workers farmer groups active in the learning process and actively informing and farming technology, as an active the agricultural extension workers organizer organizing group needs and drive member participation; the agricultural extension workers active as a consultant to help solve the problem; the agricultural extension workers is less active as a facilitator in facilitating

cooperation with external parties (financial institutions and agricultural businesses/organizations procurement and production), as an active the agricultural extension workers supervisor to provide guidance and assessment of the development of farming, as an active observer sightings the agricultural extension workers group activities, as an evaluator the agricultural extension workers less active in the evaluation because it is only at the end of the implementation of activities and events have not been on the planning of activities and the impact (outcomes) results of empowerment of farmer groups. 5) The results of the empowerment of the crop farmer groups at the regions of the research are indicated by the better changes in the participation, productivity, dynamics, and independence of the farmer groups compared to the ones prior to the program of the empowerment. 6) Model the agricultural extension workers role in the empowerment of farmer groups should pay attention to the needs of the farmer groups, farmer groups and the agricultural extension workers characteristics, local culture, professionalism the agricultural extension workers, external factors and internal, programa empowerment groups and made to increase the empowerment of farmer groups in achieving the welfare of members of the group.

Keywords: Roles, agricultural extension workers, empowerment, crop farmer groups, coastal area

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN	ix
SUMMARY	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	19
D. Manfaat Penelitian	20
E. Orisinalitas Penelitian	20
BAB II. LANDASAN TEORI	27
A. Kajian Teori	27
1. Penyuluhan Pertanian	27
a. Pengertian Penyuluhan Pertanian	27
b. Pengertian Penyuluh Pertanian	31
c. Kualifikasi Penyuluh Pertanian	33
d. Tujuan dan Fungsi Penyuluhan Pertanian	36
e. Program Penyuluhan Pertanian	39
f. Penyuluh Pertanian Profesional	45
g. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	51
h. Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	54
i. Efektifitas Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan.....	57
j. Peranan Penyuluh Pertanian	59
k. Ukuran Keberhasilan Pemberdayaan Kelompok Tani	67

2.	Kelompok Tani	70
a.	Pengertian Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai	70
b.	Kebijakan Pengembangan Kelompok Tani	71
c.	Fungsi Kelompok Tani	76
d.	Dinamika Kelompok Tani	88
e.	Partisipasi Kelompok Tani	93
f.	Kemandirian Kelompok Tani.....	100
3.	Pemberdayaan Kelompok Tani	103
a.	Pengertian Pemberdayaan Kelompok Tani	105
b.	Tujuan Pemberdayaan Kelompok Tani	109
c.	Aspek dan Unsur-unsur Pemberdayaan Kelompok Tani	111
d.	Strategi Pemberdayaan Kelompok Tani	112
e.	Ukuran Keberhasilan Pemberdayaan Kelompok Tani	114
f.	Model Pemberdayaan Kelompok Tani	116
B.	Penelitian Pendahuluan	119
C.	Kerangka Pikir	124
BAB III.	DIMENSI PENELITIAN	128
A.	Peranan PPL Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani	129
B.	Penilaian Kelompok Tani Terhadap Peranan PPL	130
C.	Pemahaman PPL Terhadap Peranan Penyuluh	130
D.	Pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Tani	132
E.	Karakteristik Penyuluh Pertanian Lapangan	132
F.	Karakteristik Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai	133
G.	Dinamika Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai	134
H.	Partisipasi Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai	136

I.	Dukungan Pemerintah, Pembiayaan, dan Sarana/ prasarana	137
J.	Efektivitas Kelembagaan Pendukung	138
K.	Hasil Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai	139
BAB IV.	METODE PENELITIAN	140
A.	Tempat dan Waktu Penelitian	140
B.	Jenis dan Strategi Penelitian	140
C.	Jenis dan Sumber Data	141
D.	Teknik Pengumpulan Data	143
E.	Teknik Pengambilan Sampel	148
F.	Validasi Data	149
G.	Teknik Analisa Data	152
H.	Prosedur Pelaksanaan Penelitian	154
BAB V.	HASIL DAN PEMBAHASAN	156
A.	Hasil Penelitian	156
1.	Keadaan Umum Wilayah Penelitian	156
2.	Keadaan Sosial Budaya di Desa-desa Pesisir Pantai.....	158
3.	Keadaan Pertanian di Desa-desa Pesisir Pantai	159
4.	Karakteristik Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai	163
a.	Pengetahuan Anggota Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai	164
b.	Keterampilan (<i>Skill</i>) Anggota Kelompok Tani Dalam Usahatani Padi	166
c.	Partisipasi Anggota Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai	168
5.	Karakteristik Penyuluh Pertanian Lapangan di Desa Pesisir Pantai	172
a.	Keadaan Pendidikan PPL	172
b.	Pengalaman Menjadi Penyuluh Pertanian Lapangan	174

c.	Pemahaman PPL Terhadap Peranan Penyuluh	176
d.	Pemahaman PPL Terhadap Sistem Sosial Budaya Masyarakat Pesisir Pantai	177
6.	Peranan PPL Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai	178
7.	Dukungan Pemerintah, Pembiayaan dan Sarana Prasarana	184
a.	Dukungan Pemerintah	184
b.	Dukungan Pembiayaan	187
c.	Dukungan Sarana/Prasarana	189
8.	Efektifitas Kelembagaan Pendukung	191
9.	Hasil Peranan PPL Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai ..	194
B.	Pembahasan	208
1.	Pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai Oleh PPL	208
2.	Peranan PPL Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai	213
a.	Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan Sebagai Guru	214
b.	Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan Sebagai Organisator	218
c.	Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan Sebagai Fasilitator.....	220
d.	Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan Sebagai Kosultan.....	228
e.	Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan Sebagai Supervisor.....	229
f.	Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan Sebagai Pemantau	230
g.	Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan Sebagai Evaluator.....	232

commit to user

3. Faktor Yang Mendukung Peranan PPL Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai	235
a. Faktor Eksternal	236
b. Faktor Internal	239
4. Penilaian Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai Terhadap Peranan PPL Dalam Pemberdayaan Kelompok	244
5. Keberhasilan Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan Dalam Pemberdayaan Kelompok Tanaman Pangan Pesisir Pantai	246
6. Model Peranan PPL Yang Efektif Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai	254
a. Memfasilitasi Pengadaan Kebutuhan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai	261
b. Budaya Lokal Masyarakat Pesisir Pantai	263
c. Profesionalisme Penyuluh Pertanian Lapangan	264
d. Faktor Eksternal dan Internal Kelompok	270
e. Peranan PPL Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai	271
f. Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai	272
g. Keberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai	285

BAB VI. PENUTUP	290
A. Kesimpulan	290
B. Implikasi Penelitian	292
1. Implikasi Teoritik	292
2. Implikasi Praktis	292
C. Saran	293
DAFTAR PUSTAKA	296
LAMPIRAN	307



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1: Penelitian Terdahulu yang Relevan	21
Tabel 2.1: Indikator Pemberdayaan Kelompok Tani	69
Tabel 2.2: Daftar Nama Desa Lokasi Penelitian Yang Berbatasan Langsung Dengan Laut Jawa	120
Tabel 2.3: Daftar Nama Sungai di Kecamatan Gunung Jati dan Kecamatan Suranenggala Kab. Cirebon yang Bermuara di Laut Jawa	121
Tabel 5.1: Keadaan Luas Tanah Sawah (ha) Menurut Penggunaannya di Daerah Penelitian	161
Tabel 5.2: Nama dan Alamat Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Lokasi Penelitian	188
Tabel 5.3: Matrik Hubungan Peranan PPL dengan Kebutuhan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai	259
Tabel 5.4: Matrik Hubungan Peranan PPL dengan Karakteristik Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai	260
Tabel 5.5: Peranan PPL Sebagai Guru Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai	278
Tabel 5.6: Peranan PPL Sebagai Organisator Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai	279
Tabel 5.7: Peranan PPL Sebagai Fasilitator Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai	280
Tabel 5.8: Peranan PPL Sebagai Konsultan Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai	281
Tabel 5.9: Peranan PPL Sebagai Supervisor Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai	282
Tabel 5.10: Peranan PPL Sebagai Pemantau Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai	283
Tabel 5.11: Peranan PPL Sebagai Evaluator Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai	284

commit to user

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1: Kelembagaan Penyuluh Pertanian	52
Gambar 2.2: Kerangka Pikir Penelitian	127
Gambar 4.1: Triangulasi Data (Triangulasi Sumber)	150
Gambar 4.2: Triangulasi Metode	151
Gambar 4.3: Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif	153
Gambar 5.1: Peta Lokasi Penelitian	157
Gambar 5.2: Model Peranan PPL Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai Berbasis Kebutuhan Kelompok	257

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1: Panduan Wawancara Untuk Penyuluh Pertanian Lapangan	307
Lampiran 2: Panduan Wawancara Untuk Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai (Pengurus Kelompok dan Anggota Kelompok)	321
Lampiran 3: Panduan Wawancara Untuk Pejabat Pemerintah Desa (Pamong Desa)	335
Lampiran 4: Panduan Wawancara Untuk Pejabat Pemerintah Kecamatan	340
Lampiran 5: Panduan Wawancara Untuk Lembaga Pendukung Sarana Prasarana dan Lembaga Pembiayaan Usahatani	346
Lampiran 6: Panduan Observasi	351
Lampiran 7: Panduan Kajian Dokumen dan Arsip (<i>Content Analysis</i>)	353
Lampiran 8: Panduan Focus Group Discussion (FGD)	355
Lampiran 9: Data Penyuluh Pertanian Lapangan Tanaman Pangan Pesisir Pantai dan Wilayah Binaan di Kecamatan Gunung Jati dan Kecamatan Suranenggala	356
Lampiran 10: Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (UPT BP3K) Kecamatan Gunung Jati dan Kecamatan Suranenggala	356
Lampiran 11: Data Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai Kecamatan Gunung Jati dan Kecamatan Suranenggala Tahun 2011	357
Lampiran 12: Peta Kabupaten Cirebon	358
Lampiran 13: Peta Desa di Kecamatan Gunung Jati	359
Lampiran 14: Peta Desa di Kecamatan Suranenggala	360
Lampiran 15: Biodata Penulis	361

commit to user

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	: Kapanjangan
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BCA	: Bank Central Asia
BJB	: Bank Jawa Barat Banten
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
BTN	: Bank Tabungan Negara
BUKOPIN	: Bank Umum Koperasi Indonesia
BIMAS	: Bimbingan Masyarakat
BIPP	: Balai Informasi Penyuluhan Pertanian
BKP5K	: Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
BPMD	: Balai Pendidikan Masyarakat Desa
BPP	: Balai Penyuluhan Pertanian
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
BPS	: Badan Pusat Statistik
BP3K	: Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan
BPTP	: Balai Penelitian Tanaman Pangan
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMP	: Badan Usaha Milik Petani
BUMS	: Badan Usaha Milik Swasta
Ciayumajakuning	: Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan
DEMPLOT	: Demonstrasi Plot
DEPTAN	: Departemen Pertanian
DEPHUT	: Departemen Kehutanan
DIKLAT	: Pendidikan dan Latihan
DISTANBUNAKHUT	: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
DKP	: Departemen Kelautan dan Perikanan
FFD	: Farmers Field Day
FGD	: Focus Group Discussion
GAPOKTAN	: Gabungan Kelompok Tani
Ha	: Hektar
INSUS	: Intensifikasi Khusus
KK	: Kepala Keluarga
KOGM	: Komando Operasi Gerakan Makmur
KUD	: Koperasi Unit Desa
LAKU	: Latihan dan Kunjungan
LKM	: Lembaga Keuangan Mikro
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MDG's	: Millenium Development Goals
Mm	: Mili meter
MoU	: Memorandum of Understanding
MT	: Musim Tanam
MUDES	: Musyawarah Desa

commit to user

Singkatan	: Kapanjangan
NFCEP	: National Food Crops Extension Project
OPPA	: Organisasi Petani Pemakai Air
3P	: Paper, Person and Place
PEMDA	: Pemerintah Daerah
pH	: Power of Hydrogen (Pangkat Hidrogen)
PHT	: Pengendalian Hama Terpadu
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPL	: Penyuluh Pertanian Lapangan
PRA	: Participatory Rural Appraisal
PSK	: Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan
P2T	: Pembantu Pelaksana Teknis
PU	: Pekerja Umum
PUAP	: Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
RDKK	: Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
RENSTRA	: Rencana Strategis
REVITBUN	: Revitalisasi Perkebunan
RKI	: Rencana Kesejahteraan Istimewa
RKK	: Rencana Kebutuhan Kelompok
RKPD	: Rencana Kerja Kegiatan Desa
RPPK	: Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
RUK	: Rencana Usaha Kelompok
SAPRODI	: Sarana Produksi
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK-Menpan	: Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SL	: Sekolah Lapangan
SLPTT	: Sekolah Lapangan Pertanian Tanaman Terpadu
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SP3K	: Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
SSB	: Swa-Sembada Beras
S1	: Strata Satu (Sarjana)
THL.PP	: Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian
TNI-POLRI	: Tentara Nasional Indonesia – Kepolisian Republik Indonesia
TSDR	: Tanaman Sayuran Dataran Rendah
TV	: Training and Visit
TUPOK	: Tugas Pokok
WDH KOOR	: Wadah Koordinasi
WKPP	: Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
UMC	: Universitas Muhammadiyah Cirebon
UNSWAGATI	: Universitas Swadaya Gunung Jati
UU	: Undang-undang

commit to user



commit to user

RINGKASAN DISERTASI**PERANAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL)
DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI
(STUDI KASUS PADA KELOMPOK TANI TANAMAN PANGAN
DI PESISIR PANTAI KABUPATEN CIREBON)**

Diajukan untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada Sidang Senat
Terbatas Universitas Sebelas Maret guna memenuhi sebagian syarat dalam
memperoleh gelar Doktor Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat
Minat Utama Pelatihan/Pendidikan Luar Sekolah

Di Surakarta pada Tanggal 28 Mei 2013



Oleh
ACHMAD FAQIH
NIM : T 620208002

Komisi Pembimbing :

Prof. Dr.Ir. Totok Mardikanto., M.S

Promotor

Dr. Ir. Tubagus Hasanudin., M.S

Co Promotor I

Dr. Sapja Anantanyu., SP., M.Si

Co Promotor II

**PROGRAM DOKTOR PENYULUHAN PEMBANGUNAN/
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PASCASARJANA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
MEI 2013**

commit to user

**PERANAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL)
DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI
(STUDI KASUS PADA KELOMPOK TANI TANAMAN PANGAN
DI PESISIR PANTAI KABUPATEN CIREBON)**

DISERTASI

Dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada Sidang Senat Terbatas Universitas
Sebelas Maret guna memenuhi sebagian syarat dalam memperoleh gelar Doktor
Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat
Minat Utama Pelatihan/Pendidikan Luar Sekolah

Di Surakarta pada Tanggal 28 Mei 2013



Dewan Penguji:

- | | | |
|----|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. | Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. | Ketua merangkap anggota |
| 2. | Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus., M.S. | Sekretaris merangkap anggota |
| 3. | Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto., M.S | Anggota |
| 4. | Dr. Ir. Tubagus Hasanudin., M.S | Anggota |
| 5. | Dr. Sapja Anantanyu., SP., M.Si | Anggota |
| 6. | Dr. Ir. Kusnandar., M.Si | Anggota |
| 7. | Dr. Ir. Iman Sungkawa., MM. | Anggota |
| 8. | Dr. Andin H. Taryoto | Anggota |
| 9. | Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S | Anggota |

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Alhamdulillahirobbil'aalamiin. Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala taufik dan hidayah-Nya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini yang berjudul “Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Tanaman Pangan di Pesisir Pantai Kabupaten Cirebon)”.

Disertasi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai Kabupaten Cirebon. Disertasi ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar akademik Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis sadar bahwa apa yang telah dilaksanakan bukan semata-mata keberhasilan pribadi melainkan juga berkat kepedulian, bimbingan dan dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada komisi pembimbing Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, M.S, Dr. Ir. Tubagus Hasanudin, M.S, sebagai Co Promotor I, Dr. Sapja Anantanyu, SP., M.Si, sebagai Co Promotor II, yang telah dengan sabar membimbing dalam penulisan disertasi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Rektor UNS, Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S, Direktur Program Pascasarjana Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S, yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis sejak perkuliahan hingga terselesainya penulisan Disertasi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Ir. Kusnandar, M.Si, Dr. Ir. Iman Sungkawa, M.M, Dr. Andin H Taryoto, dan Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S. yang telah berkenan menjadi tim penguji.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Dekan Fakultas Pertanian Unswagati, yang telah memberikan bantuan material dan non material serta kesempatan kepada penulis untuk dapat melanjutkan studi ke jenjang S3. Tidak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bupati Cirebon, Kepala BKP5K Kabupaten Cirebon, Kepala BP3K Kecamatan Gunung Jati dan Suranenggala Kabupaten Cirebon, Camat Gunung Jati dan Camat Suranenggala Kabupaten Cirebon yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian di wilayahnya.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Penyuluh Pertanian Lapangan dan pengurus serta anggota kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai Kecamatan Gunung Jati dan Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon yang banyak membantu dan memfasilitasi penulis dalam melaksanakan penelitian di lapangan. Teman-teman mahasiswa Program Doktor Penyuluhan Pembangunan yang telah banyak membantu dan bekerja sama selama penulis mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana UNS.

Terakhir terima kasih yang mendalam dan penghargaan yang luar biasa penulis sampaikan kepada istri tercinta Yeni Prihatini dan anak-anak tersayang Nurul Atikah Fauzi, Nurul Arifah Fauzi dan Muhammad Salman Alfarisi Fauzi yang telah sabar dan berbesar hati untuk memberikan waktu kepada penulis untuk menempuh pendidikan S3 di Program Pascasarjana UNS.

commit to user

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua pengorbanan ini dengan kebaikan tak terhingga. Akhirnya hanya kepada Allah SWT segala sesuatu akan dikembalikan, semoga rahmat dan karunia-NYA senantiasa dilimpahkan pada kita semua. Amin.

Surakarta, Mei 2013
Penulis

Achmad Faqih



Achmad Faqih. T 620208002. Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Tanaman Pangan Di Pesisir Pantai Kabupaten Cirebon). Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, M.S (Promotor), Dr. Ir. Tubagus Hasanudin, M.S (Co-Promotor I), Dr. Sapja Anantanyu, SP., M.Si (Co-Promotor II).

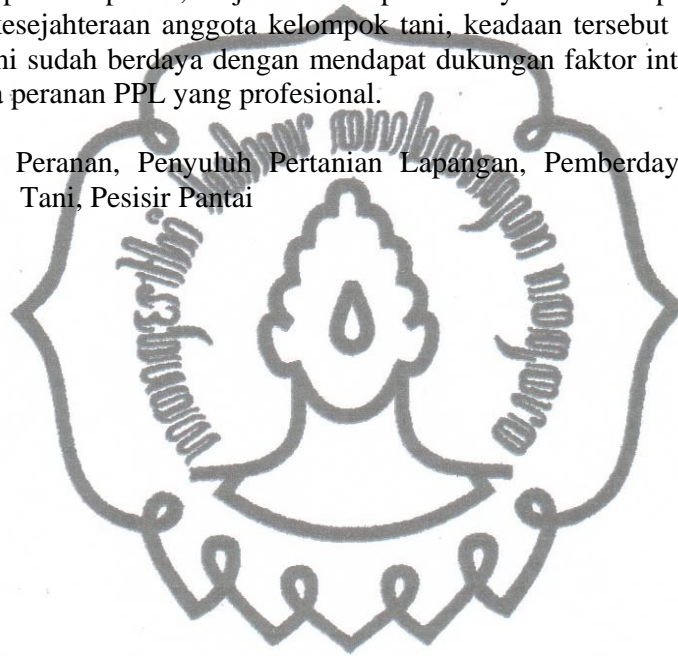
RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peranan Penyuluh Pertanian Lapangan dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai meliputi : (1) keadaan pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani, (2) peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani, (3) faktor yang mendukung peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani, (4) penilaian kelompok tani terhadap peranan PPL, (5) hasil peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani, dan (6) model peranan PPL yang efektif dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan tujuan untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap obyek yang terbatas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani oleh PPL di lokasi penelitian diawali dengan mengidentifikasi, dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya, menyusun rencana kegiatan pemberdayaan melalui pembuatan rencana kebutuhan kelompok dan rencana definitif kebutuhan kelompok, menerapkan rencana kegiatan pemberdayaan kelompok melalui pengadaan sarana prasarana produksi, kegiatan persiapan tanaman (persemaian), proses penanaman, pemeliharaan tanaman (penyiangan, pengairan, pemupukan berimbang, dan pengendalian hama penyakit), penanganan panen, pasca panen dan pemasaran, serta memantau proses dan hasil kegiatan pemberdayaan, (2) Peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai di lokasi penelitian yang telah dilaksanakan adalah sebagai guru, organisator, fasilitator, konsultan, supervisor, pemantau, dan evaluator, peranan tersebut yang belum sesuai harapan kelompok tani adalah peranan PPL sebagai fasilitator atau jembatan antara kelompok tani dengan pihak luar dan peranan sebagai evaluator, (3) Faktor yang mendukung peranan Penyuluh Pertanian Lapangan dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai di bagi 2 (dua) yaitu faktor eksternal dan faktor intrnal. Faktor eksternal meliputi : dukungan Kuwu, dukungan Dinas Pertanian dan BKP5K (Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan), dukungan biaya dan dukungan sarana prasarana. Faktor internal meliputi: kepemimpinan kontak tani, sikap anggota kelompok dalam mendukung keberhasilan kelompok, kesempatan anggota kelompok dalam pengembangan kerjasama, dan solidaritas anggota kelompok, (4) Penilaian kelompok tani terhadap peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani meliputi peranan PPL sebagai seorang guru, PPL aktif/sering menyampaikan pembelajaran, menyampaikan informasi dan teknologi usahatani, peranan sebagai organisator dengan melakukan pengorganisasian pemenuhan kebutuhan kelompok dan menggerakkan partisipasi anggota, peranan PPL sebagai konsultan dengan membantu memecahkan masalah, peranan PPL sebagai fasilitator kurang maksimal atau kadang-kadang terutama dalam memfasilitasi kerjasama dengan pihak luar (lembaga keuangan dan lembaga usaha pertanian/lembaga pengadaan sarana produksi), peranan PPL sebagai supervisor dengan melakukan

pembinaan dan penilaian terhadap perkembangan usahatani, peranan sebagai pemantau dengan mengadakan pengamatan aktifitas kelompok, sedangkan peranan PPL dalam kegiatan evaluasi hanya pada pelaksanaan kegiatan dan akhir kegiatan belum pada perencanaan kegiatan dan dampak (*outcome*) hasil kegiatan pemberdayaan kelompok tani, (5) Hasil pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai oleh PPL digambarkan pada perubahan partisipasi kelompok, produktivitas kelompok, dinamika kelompok, dan kemandirian kelompok yang lebih baik dari pada sebelum adanya pemberdayaan kelompok tani oleh PPL, (6) Model peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani yang efektif dan efisien harus memperhatikan kebutuhan yang diperlukan oleh kelompok tani dan budaya lokal masyarakat pesisir pantai, tujuan dari pemberdayaan kelompok tani adalah terciptanya kesejahteraan anggota kelompok tani, keadaan tersebut tercapai apabila kelompok tani sudah berdaya dengan mendapat dukungan faktor internal dan faktor eksternal serta peranan PPL yang profesional.

Kata Kunci: Peranan, Penyuluh Pertanian Lapangan, Pemberdayaan, Kelompok Tani, Pesisir Pantai



Achmad Faqih. T620208002. The Roles of the Agricultural Extension Workers in the Empowerment of Crop Farmer Groups (A Case Study to Crop Farmer Groups at the Coastal Area of Cirebon Regency). Dissertation: The Postgraduate Program in Extension Program, Sebelas Maret University, Surakarta. Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto (Principal Promoter), MS., Ir. Tubagus Hasanudin, MS. (Co-Promoter I), Dr. Sapja Anantanyu, SP., M.Si. (Co-promoter II)

SUMMARY

The objectives of this research are to describe and analyze the roles of the agricultural extension workers in the empowerment of crop farmer groups at the coastal area, which include: (1) the conditions of the empowerment of the crop farmer groups, (2) roles of the agricultural extension workers, (3) factors, which support the roles of the agricultural extension workers, (4) the crop farmer groups' evaluation on the roles of the agricultural extension workers, (5) the results of the roles of the agricultural extension workers in the empowerment of the crop farmer groups, and (6) the effective model of the roles of the agricultural extension workers in the empowerment of crop farmer groups at the coastal area. This research used the qualitative research method. It used a case study strategy in order to study the limited objects in depth.

The result of the research are as follows: 1) The empowerment of crop farmer groups begins with identifying and studying the potentials, problems, and opportunities of the area, arranging the activity plans of the empowerment through the plan of the groups' needs and the definitive plan of the groups' needs, implementing the activity plans of the empowerment through the procurement of production facility and infrastructure, seedbed preparation activities, planting process, plant husbandry (crop weeding, crop watering, balanced fertilizing, and pest controlling), harvest, post-harvest, and marketing handling, and observing the process and results of the empowerment activities, 2) The roles of the agricultural extension workers in the empowerment of crop farmer groups at the coastal area are as teachers, organizers, facilitators, consultants, supervisors, analysts, and evaluators. The roles which are thought to have not been in compliance with the expectation of the farmer groups are as facilitators and evaluators, 3) The factors which support the roles of the agricultural extension workers can be classified into two, namely: external factor and internal factor. The former includes supports given by village heads (*kuwu*), the Office of Agriculture, and BKP5K (Food Security and Agricultural, Fishery, and Forestry Extension Implementing Agency), capital supports, and facility and infrastructure supports. Reversely, the latter includes the strengths which have direct effects but result from the organizations or farming groups such as farmer contact leadership, attitude of the members of the crop farmer groups to support the success of the crop farmer groups, farmer group members the opportunity to develop cooperation, and solidarity of crop farmer groups, 4) The crop farmer groups' evaluation on the roles of the agricultural extension workers includes the roles of the agricultural extension workers as educators in which the agricultural extension workers frequently or actively extend agricultural education activities to the farmer groups and deliver farming business information and technology, the role as organizer of the group needs to organize and mobilize the participation of members, as consultants in which they actively give consultation on the farming business of the farmer groups, and as facilitators, in which the

agricultural extension workers have not performed maximally, particularly to facilitate the farmer groups' cooperation with external parties (financial institutions, farming business institutions, and agricultural production facility procurement institutions). the roles of the agricultural extension workers as supervisor to conduct training and assessment of the development of farming, as monitoring by conducting observation group activity. Meanwhile, the roles of the agricultural extension workers in the evaluation activities are focused on the activity implementation only; at the end of the activities, there have not been any activity plan and outcomes of the results of the empowerment of the farmer groups. 5) The results of the empowerment of the crop farmer groups at the regions of the research are indicated by the better changes in the participation, productivity, dynamics, and independence of the farmer groups compared to the ones prior to the program of the empowerment. 6) The effective and efficient models of roles of the agricultural extension workers should pay attention to the needs and local culture coastal communities. The agricultural extension workers in the empowerment of the crop farmer groups at the coastal area are required to have abilities and expertise in the farming business and fishery, to understand the social and cultural of the community of the coastal area, the goal of empowerment of farmer groups is the creation of the welfare of the farmers, the state achieved when groups of farmers are empowered with the support factor internal and external factors and the role of the professional agricultural extension workers.

Keywords: Roles, agricultural extension workers, empowerment, crop farmer groups, coastal area

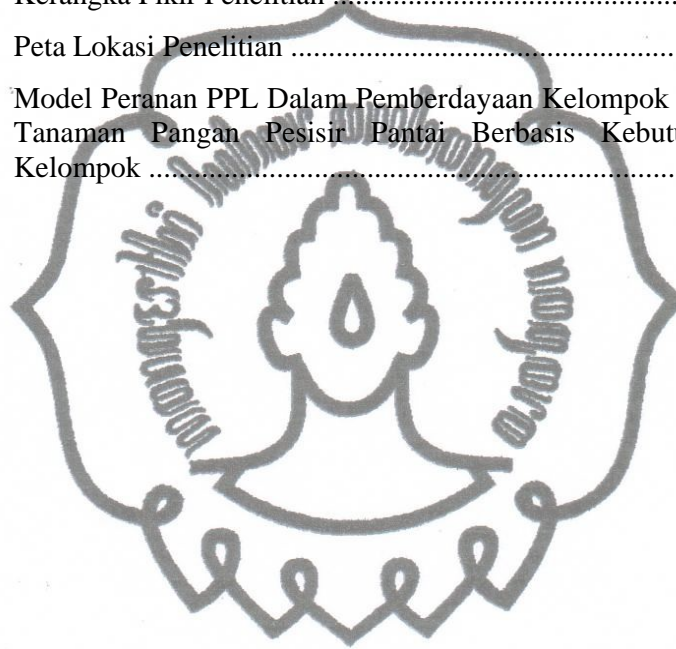
DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	iii
SUMMARY	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Orisinalitas Penelitian	5
BAB II. LANDASAN TEORI	6
A. Kajian Teori	6
1. Penyuluhan Pertanian	6
2. Kelompok Tani	22
3. Pemberdayaan Kelompok Tani	27
B. Penelitian Pendahuluan	32
C. Kerangka Pikir	33
BAB III. DIMENSI PENELITIAN	36
BAB IV. METODE PENELITIAN	37
A. Tempat dan Waktu Penelitian	37
B. Jenis dan Strategi Penelitian	37
C. Jenis dan Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Pengambilan Sampel	38
F. Validasi Data	39
G. Teknik Analisa Data	40
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Keadaan Umum Wilayah Penelitian	41
2. Keadaan Sosial Budaya di Desa-desa Pesisir Pantai.....	42
3. Karakteristik Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai	44
4. Karakteristik Penyuluh Pertanian Lapangan	44
5. Peranan PPL Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai	44
6. Dukungan Pemerintah, Pembiayaan dan Sarana	

Prasarana	49
7. Hasil Peranan PPL Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai ..	50
B. Pembahasan	53
1. Pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai Oeh PPL	53
2. Peranan PPL Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai	54
3. Faktor Yang Mendukung Peranan PPL Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai	56
4. Penilaian Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai Terhadap Peranan PPL Dalam Pemberdayaan Kelompok	57
5. Keberhasilan Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan Dalam Pemberdayaan Kelompok	59
6. Model Peranan PPL Yang Efektif Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai	61
BAB VI. PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Implikasi Penelitian	64
C. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
BIODATA	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1: Kelembagaan Penyuluh Pertanian	12
Gambar 2.2: Kerangka Pikir Penelitian	35
Gambar 5.1: Peta Lokasi Penelitian	42
Gambar 5.2: Model Peranan PPL Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai Berbasis Kebutuhan Kelompok	62



BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian memiliki peranan yang strategis dalam pembangunan nasional. Peranan strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan capital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio energi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan. Berbagai peranan strategis pertanian dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup (Suradisastra. K, 2008).

Menurut Mosher (1966), pembangunan pertanian adalah suatu proses perubahan yang lebih baik untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat tani. Pembangunan pertanian dapat berlangsung dengan adanya 5 faktor mutlak yang berupa faktor pasar, faktor teknologi, faktor tersedianya alat-alat dan bahan pertanian/modal, faktor insentif (perangsang produksi bagi petani), dan faktor transportasi yang lancar dan kontinyu. Kelima faktor mutlak tersebut dapat dibantu dengan faktor-faktor yang memperlancar pembangunan pertanian yaitu berupa pendidikan pembangunan, kredit produksi, kerjasama dengan kelompok petani, memperbaiki dan memperluas tanah pertanian serta perencanaan nasional yang secara keseluruhan terpadu guna memperlancar dan menyukseskan pembangunan pertanian.

Pembangunan pertanian ke depan diharapkan dapat memberi kontribusi yang lebih besar dalam rangka mengurangi kesenjangan dan memperluas kesempatan kerja, serta mampu memanfaatkan semua peluang ekonomi yang terjadi sebagai dampak dari globalisasi dan liberalisasi perkonomian dunia. Untuk mewujudkan harapan tersebut diperlukan sumberdaya manusia (petani dan pelaku usaha pertanian) yang berkualitas dan handal dengan ciri mandiri, profesional, berjiwa wirausaha, mempunyai dedikasi, etos kerja, disiplin dan moral yang tinggi serta berwawasan global, sehingga petani dan pelaku usaha pertanian akan mampu membangun usahatani yang berdaya saing tinggi. Salah satu upaya untuk meningkatkan SDM

pertanian, terutama SDM petani, adalah melalui kegiatan pemberdayaan petani (Slamet, 2004).

Saat ini jumlah kelompok tani adalah 293.568 kelompok dengan keterbatasan sumberdaya penyuluh, maka pemberdayaan petani dan keluarganya dilakukan melalui pendekatan kelompok. Pendekatan ini mendorong pemerintah untuk membentuk kelembagaan tani yang kuat agar dapat membangun sinergi antar petani, baik dalam proses belajar, kerjasama maupun sebagai unit usaha yang merupakan bagian dari usahatani (Departemen Pertanian, 2010). Kelompok tani ini belum sepenuhnya berfungsi sebagai unit ekonomi, sehingga kedepan harus diarahkan untuk lebih berorientasi pasar, berbasis pada sumber daya lokal dan kompetensi petani untuk mendapatkan berbagai kemudahan akses terhadap permodalan, teknologi, pemasaran, dan sarana produksi.

Untuk dapat melakukan fungsi penyuluhan diperlukan sejumlah peran dalam memajukan usaha petani. Sanders et al (1966), Bertrand (1972), Dahama dan Bhatnagar (1980) mengemukakan peran penyuluh sebagai pendidik/guru bagi petani dalam meningkatkan pengetahuan dan bersikap positif terhadap ide baru. Menurut Maunder (1972), di dalam penyebaran ide baru diperlukan tiga fungsi yaitu fungsi penelitian, fungsi penyuluhan dan fungsi penguasaan usahatani (petani) sebagai pengguna ide baru, sedangkan menurut Mardikanto (1998) peranan penyuluh meliputi EDFIKASI, yaitu Edukator, Fasilitator, Konsultator, Supervisor, Monitor, dan Evaluator. Jika diperhatikan maka terdapat persamaan dan perbedaan peranan menurut sehingga gabungan dari pendapat keduanya, maka peranan PPL meliputi: (a) Edukator, (b) Fasilitator, (c) Konsultator, (d) Supervisor, (e) Monitor, (f) Evaluator, (g) Analisator, dan (h) Organisator.

Menurut Syahyuti (2007), belum optimalnya peranan penyuluh pertanian lapangan dalam pemberdayaan kelompok tani dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat partisipasi petani terhadap pemberdayaan yang dilakukan penyuluh pertanian lapangan sebagai akibat rendahnya mutu pelayanan penyuluhan pertanian oleh pemerintah. Selain itu lemah dan tidak sistematisnya pendanaan penyuluhan oleh pemerintah, sehingga menjadi salah satu penyebab rendahnya kinerja penyuluh pertanian lapangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penyuluh pertanian lapangan ke depan adalah penyuluh pertanian lapangan yang dapat menciptakan dirinya sebagai mitra dan fasilitator petani dengan melakukan peranan yang

sesuai antara lain sebagai: penyedia jasa pendidikan (*educator*), *motivator*, konsultan (pembimbing), dan pendamping petani.

Salah satu faktor penentu keberhasilan program-program dalam sector pertanian adalah dukungan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, diantaranya adanya tenaga PPL. Adapun kendala atau masalah dalam penerapan pelaksanaan program pemberdayaan kelompok tani adalah sebagai berikut : (1) Belum semua PPL di lapangan memahami teknik dan metode pemberdayaan kelompok tani yang baik, (2) Kelompok tani belum sepenuhnya difungsikan sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, unit produksi dan unit usaha, dan (3) Sebagian besar kelompok tani belum mampu menerapkan manajemen dan sistem administrasi kelompok sesuai dengan ketentuan.

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi peranan penyuluh pertanian lapangan dalam pemberdayaan kelompok tani, baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal tersebut meliputi : kepemimpinan kontak tani, sikap anggota kelompok dalam mendukung keberhasilan kelompok, manajemen kelompok, dan solidaritas kelompok. Adapun faktor eksternal tersebut meliputi : dukungan pemerintah, dukungan biaya, dan dukungan sarana prasarana. Faktor-faktor tersebut harus diperhatikan oleh pihak pimpinan organisasi dan PPL sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengupayakan peningkatan pemberdayaan kelompok tani di lapangan (Departemen Pertanian, 2007).

Berdasarkan pengamatan pendahuluan khususnya kegiatan pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai oleh PPL di Kecamatan Gunung Jati dan Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon terdapat beberapa permasalahan antara lain : pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani yang belum maksimal, kurang lancarnya komunikasi dan koordinasi antara lembaga-lembaga yang bergerak dalam sektor penyuluhan, peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan belum maksimal, dan masih banyak dijumpai penilaian anggota kelompok tani yang berbeda terhadap peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar permasalahan tersebut maka masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai ?
2. Bagaimanakah peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai ?
3. Faktor apa saja yang mendukung peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai ?
4. Bagaimanakah penilaian kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai terhadap peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani ?
5. Bagaimanakah hasil peranan Penyuluh Pertanian Lapangan dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai ?
6. Bagaimanakah model peranan PPL yang efektif dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor apa saja yang mendukung peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai.
4. Mendeskripsikan dan menganalisis penilaian kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai terhadap peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai.
5. Mendeskripsikan dan menganalisis hasil peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai.
6. Merumuskan model peranan PPL yang efektif dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian mengenai peranan penyuluh pertanian lapangan pada pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan di sekitar pesisir pantai diharapkan akan bermanfaat bagi para perencana (pemerintah dan akademisi), pelaksana pemberdayaan kelompok tani (PPL) dan kelompok tani, antara lain :

1. Manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pemberdayaan kelompok tani khususnya kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai.
2. Manfaat praktis.
 - a. Dapat memberikan masukan atau rekomendasi secara ilmiah kepada pimpinan organisasi, ketua-ketua kelompok tani dalam meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan di pesisir pantai.
 - b. Dapat digunakan sebagai acuan untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi dalam pemberdayaan kelompok tani, khususnya kelompok tani tanaman pangan di pesisir pantai.

E. Orsinilitas/Kebaruan Penelitian

Berbeda dengan penelitian-penelitian yang terdahulu, penelitian ini memiliki keunikan/kebaruan dalam hal :

1. Obyek penelitian dikhususkan pada kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai yang berusaha tanaman pangan juga sebagai nelayan dan petambak ikan, dimana lahan yang diusahakan berbatasan langsung dengan pesisir pantai dan mayoritas anggota kelompok tani berdomisili di sekitar perkampungan nelayan.
2. Merumuskan model peranan Penyuluh Pertanian Lapangan yang efektif dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Penyuluhan Pertanian

a. Pengertian Penyuluhan Pertanian

Istilah “penyuluhan (*extension*)”, pertama kali diperkenalkan pada pertengahan abad 19 oleh Universitas Oxford dan Cambridge sekitar tahun 1850 (Swanson, 1984). Van den Ban dan Hawkins (1999) mencatat beberapa istilah untuk penyuluhan ini seperti di Belanda disebut *voorlichting*, di Jerman lebih dikenal sebagai “*advisory work*”, *vulgarization* (Perancis), dan *capacitacion* (Spanyol). Freire (1973) pernah melakukan protes terhadap kegiatan penyuluhan yang lebih bersifat *top-down*, kemudian menawarkan beragam istilah pengganti *extension* seperti: *animation*, *mobilization*, *conscientisation*. Di Malaysia, digunakan istilah *perkembangan* sebagai terjemahan dari *extension*, dan di Indonesia menggunakan istilah *penyuluhan* sebagai terjemahan dari *voorlichting*.

Penggunaan istilah “penyuluhan” di Indonesia akhir-akhir ini semakin semarak. Pemicunya adalah karena penggunaan istilah penyuluhan dirasa semakin kurang diminati atau kurang dihargai oleh masyarakat. Hal ini, disebabkan penggunaan istilah penyuluhan yang kurang tepat, terutama oleh banyak kalangan yang sebenarnya “*tidak memahami*” esensi makna yang terkandung dalam istilah penyuluhan itu sendiri. Di lain pihak, seiring dengan perbaikan tingkat pendidikan masyarakat dan kemajuan teknologi informasi, peranan penyuluhan semakin menurun dibanding sebelum dasawarsa delapan-puluhan.

Slamet (2000) menegaskan bahwa inti dari kegiatan penyuluhan adalah untuk memberdayakan masyarakat. Memberdayakan berarti memberi daya kepada yang tidak berdaya dan atau mengembangkan daya yang sudah dimiliki menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan. Konsep pemberdayaan tersebut, terkandung pemahaman bahwa pemberdayaan tersebut diarahkan terwujudnya masyarakat madani (yang beradab) dan mandiri dalam pengertian dapat mengambil keputusan (yang terbaik) bagi kesejahteraannya sendiri. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan (*capacity strenghtening*) masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses pembangunan, terutama pembangunan yang ditawarkan oleh penguasa dan atau pihak luar.

commit to user

Kegiatan penyuluhan juga merupakan kegiatan yang ditujukan sebagai proses penguatan kapasitas (*Capacity Strenghtening*). Penguatan kapasitas adalah penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu (dalam masyarakat), kelembagaan, maupun hubungan atau jejaring antar individu, kelompok organisasi sosial, serta pihak lain di luar sistem masyarakatnya sampai di aras global. Kemampuan atau kapasitas masyarakat, diartikan sebagai daya atau kekuatan yang dimiliki oleh setiap individu dan masyarakatnya untuk memobilisasi dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih berhasil guna (efektif) dan berdaya guna (efisien) secara berkelanjutan. Kekuatan atau daya yang dimiliki setiap individu dan masyarakat bukan dalam arti pasif tetapi bersifat aktif yaitu terus menerus dikembangkan/dikuatkan untuk “memproduksi” atau menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat.

b. Pengertian Penyuluh Pertanian

Kegiatan penyuluhan pertanian dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah atau suatu lembaga penyuluhan agar petani selalu tahu, mau, dan mampu mengadopsi inovasi demi tercapainya peningkatan produktivitas dan pendapatan usahatani guna memperbaiki mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Slamet, 1987).

Istilah "penyuluh" itu sendiri, oleh Kelsey and Hearne (1975) disebut pekerja penyuluhan (*extension workers*). Lippit (1958) dan Rogers (1983) menyebutnya sebagai “agen perubahan: (*change agent*), yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga penyuluhan berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh (calon) penerima manfaat penyuluhan untuk mengadopsi inovasi. Oleh karena itu, seorang penyuluh haruslah profesional, dalam arti memiliki kualifikasi tertentu baik yang menyangkut kepribadian, pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu.

Berdasarkan status dan lembaga tempatnya berkerja, penyuluh dibedakan menjadi 3 kelompok (UU No. 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan), yaitu :

- 1) Penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu pegawai negeri yang ditetapkan dengan status jabatan fungsional sebagai penyuluh. Penyuluh pertanian PNS mulai dikenal sejak awal 1970 seiring dengan dikembangkannya konsep “*catur sarana unit desa*” dalam program BIMAS, sedang jabatan fungsional penyuluh,

mulai dibicarakan sejak pelaksanaan proyek penyuluhan tanaman pangan (*National Food Crops Extension Project/NFCEP*) sejak tahun 1976.

- 2) Penyuluh Swasta, yaitu penyuluh pertanian yang berstatus sebagai karyawan perusahaan swasta (produsen pupuk, pestisida, perusahaan benih/alat/mesin pertanian). Termasuk kategori penyuluh swasta adalah penyuluh dari lembaga swadaya masyarakat (LSM).
- 3) Penyuluh swadaya, yaitu petani atau warga masyarakat yang secara sukarela melakukan kegiatan penyuluhan di lingkungannya, termasuk dalam kelompok ini adalah penyuluh yang diangkat dan atau memperoleh imbalan dari dan oleh masyarakat di lingkungannya.

c. Kualifikasi Penyuluh

Berlo (1961) merinci adanya empat kualifikasi yang perlu diperhatikan oleh seorang penyuluh, yaitu: (1) Kemampuan dan ketrampilan berkomunikasi; (2) Pengetahuan yang luas dan mendalam tentang inovasi yang akan disampaikan; (3) memiliki sikap yang baik; dan (4) memiliki latar belakang sosial budaya yang mendukung tugasnya sebagai penyuluh yang dapat diandalkan. Keempat kualifikasi itu harus senantiasa melekat dalam ingatan setiap penyuluh sebab di dalam berkomunikasi perlu diingatkan bahwa perhatian sasaran seringkali lebih ditentukan oleh siapa yang mengkomunikasikan dibanding “apa” pesan yang disampaikan. Semakin tinggi kualitas penyuluh semakin tinggi pula perhatian dan kemauan/kesedian mereka (sasaran) untuk menerima pesan-pesan yang disampaikan.

Kemampuan dan keterampilan berkomunikasi penyuluh tidak terbatas pada: pemilihan pesan, penerjemahan dan keterampilan penyampaian pesan, maupun keterampilan dalam memilih dan menggunakan saluran media komunikasi, tetapi juga kemampuan dan keterampilan penyuluh untuk berinteraksi dengan masyarakat sasarannya. Sebab komunikasi sebagai proses “pendidikan orang dewasa” keberhasilannya tidak ditentukan oleh seberapa banyak inovasi yang telah disampaikan oleh penyuluh kepada masyarakatnya, tetapi lebih ditentukan oleh seberapa jauh penyuluh mampu mengembangkan dialog dengan masyarakat sasaran sebagai peserta didiknya (Lionberger, 1960).

Berinteraksi pada dasarnya memerlukan suatu sikap saling ketergantungan antara semua pihak yang berkomunikasi, dalam arti saling memberikan informasi

dan kesediaan untuk saling menerima umpan balik. Menurut Lionberger dan Gwin (1983), pihak-pihak yang berkomunikasi harus saling memiliki kemampuan dan keterampilan untuk beremphaty, yaitu suatu kemampuan dan keterampilan untuk: (a) Mampu merasakan apa yang sedang dan akan diderita oleh pihak lain; (b) Mampu merasakan apa yang diharapkan oleh pihak lain atau mampu berperilaku seperti yang dilakukan dan diperbuat pihak lain; dan (c) Mampu memainkan peranan yang dimainkan oleh orang lain.

d. Tujuan dan Fungsi Penyuluhan Pertanian

Tujuan penyuluhan pertanian diarahkan pada terwujudnya perbaikan teknis bertani (*better farming*), perbaikan usahatani (*better business*), dan perbaikan kehidupan petani dan masyarakatnya (*better society*). Dari pengalaman pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan di Indonesia selama tiga dasawarsa terakhir menunjukkan bahwa untuk mencapai ketiga bentuk perbaikan yang disebutkan di atas masih memerlukan perbaikan-perbaikan lain yang menyangkut (Departemen Pertanian, 2010) :

- 1) Perbaikan kelembagaan pertanian (*better organization*) demi terjalinnnya kerjasama dan kemitraan antar stakeholders. Sebagai contoh pelaksanaan Intensifikasi Khusus (INSUS) sebagai inovasi sosial yang dilakukan melalui usahatani berkelompok mampu menembus kemandegan kenaikan produktiivitas (*leveling off*) yang dicapai melalui inovasi teknis.
- 2) Perbaikan kehidupan masyarakat (*better community*), yang tercermin dalam perbaikan pendapatan, stabilitas keamanan dan politik, yang sangat diperlukan bagi terlaksananya pembangunan pertanian yang merupakan sub-sistem pembangunan masyarakat (*community development*). Tentang hal ini, pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan pertanian tidak dapat berlangsung seperti diharapkan, manakala petani tidak memiliki cukup dana yang didukung oleh stabilitas politik dan keamanan serta pembangunan bidang dan sektor kehidupan yang lain. Sebaliknya, pembangunan pertanian menjadi tidak berarti manakala tidak memberikan perbaikan kepada kehidupan masyarakatnya.
- 3) Perbaikan usaha dan lingkungan hidup (*better enviroment*) demi kelangsungan usahatannya. Tentang hal ini, pengalaman menunjukkan bahwa penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan dan tidak seimbang telah berpengaruh

negatif terhadap produktivitas dan pendapatan petani, dan kerusakan lingkungan yang dikhawatirkan akan mengancam keberlanjutan (*sustainability*) pembangunan pertanian itu sendiri.

Di samping itu, Mardikanto (1995) menambah satu hal lagi yang menyangkut pentingnya perbaikan aksesibilitas petani dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan pertanian yaitu perbaikan aksesibilitas (*better accesibility*), baik terhadap sumber inovasi, input usahatani (kredit, sarana produksi, alat dan mesin pertanian), pasar, jaminan harga, maupun terhadap pengambilan keputusan politik. Hal ini terutama dilandasi oleh pernyataan Hadisapoetro (1970) yang menyebutkan bahwa petani-petani kecil yang merupakan pelaku utama pembangunan pertanian di Indonesia pada umumnya termasuk golongan ekonomi lemah, yang lemah dalam hal permodalan, penguasaan dan penerapan teknologi, dan seringkali juga lemah semangatnya untuk maju, karena seringkali dijadikan obyek pemaksaan oleh birokrasi maupun penyuluhnya sendiri (Soewardi, 1987).

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, tujuan pengaturan sistem penyuluhan meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial, yaitu:

- a) Memperkuat pengembangan pertanian, perikanan, serta kehutanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan.
- b) Memberdayakan pelaku utama/petani dan pelaku usaha dalam meningkatkan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi.
- c) Memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan dan dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- d) Memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama/petani dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan.
- e) Mengembangkan sumber daya manusia yang maju dan sejahtera sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

e. Penyuluh Pertanian Profesional

Menurut Berlo (1961), seorang penyuluh dikatakan profesional dengan 4 (empat) syarat:

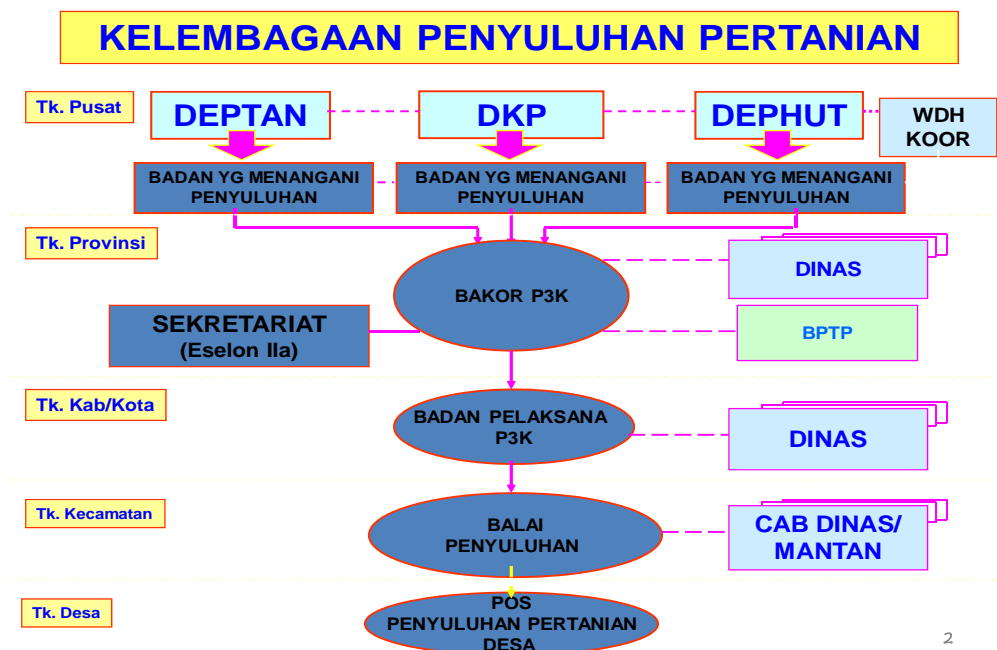
- a) Kemampuan berkomunikasi, karena inti dari perubahan sosial adalah komunikasi.
- b) Memiliki sikap menghayati dan bangga dengan profesinya dan yakin inovasi yang disampaikan bermanfaat bagi sasaran dan mencintai masyarakat sarasannya.
- c) Memiliki pengetahuan tentang isi, fungsi, manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dan dapat disampaikan dengan baik secara ilmiah maupun praktis.
- d) Memiliki Kemampuan adaptasi terhadap sosial budaya masyarakat sasaran.

Profesionalisme penyuluh pertanian berkaitan erat dengan tugas pokok (tupok) penyuluh pertanian. Berdasarkan SK-Menpan Nomor. 19/KEP/MK, Wapan 15/1999 bahwa tugas pokok penyuluh pertanian adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluh pertanian diharapkan dapat berfungsi sebagai *home base* yang mampu melakukan pembinaan karir dan profesionalisme penyuluh pertanian di Propinsi dan Kabupaten/Kota dan mampu menjamin berlangsungnya penyelenggaraan penyuluhan pertanian terpadu yang efektif, efisien dan produktif serta bersifat sinergis dengan program pengembangan agribisnis sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Lammers, *et.al.* (2001) mengemukakan beberapa persyaratan bagi "penyuluh profesional" yang harus memiliki pemahaman yang baik tentang beberapa hal sebagai berikut: (1) Pengertian akan sifat dan peranan organisasi pelayanan penyuluhan di tingkat nasional; (2) Pengertian dan pengetahuan tentang teknologi yang berkaitan dengan materi yang diprogramkan; (3) Kemampuan untuk menjelaskan tujuan program, sehingga bermanfaat bagi kegiatan pembimbingan; (4) Kemampuan untuk mengorganisasikan masyarakat dan sumberdaya yang tersedia; (5) Keterampilan untuk melihat hubungan antara prinsip-prinsip kegiatan dengan kenyataan yang dihadapi dalam praktek; (6) Keterampilan meneliti, yakni ketrampilan untuk membantu setiap pihak yang terlibat/dilibatkan dalam penelitian; dan (7) Keterampilan tentang hubungan kemanusiaan, yang sangat penting artinya demi kelancaran pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam menjalin kerjasama dengan pemimpin-pemimpin lokal, mengarahkan pelaksanaan kegiatan, dan terjaganya kemantapan dan kelancaran organisasi penyuluhannya.

f. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan pasal 8, kelembagaan penyuluhan meliputi : (a) Kelembagaan penyuluhan pemerintah, (b) Kelembagaan penyuluhan swasta, dan (c) Kelembagaan penyuluhan swadaya. Lebih lanjut dijelaskan, kelembagaan penyuluhan pemerintah terdiri dari tingkat pusat hingga desa yang intinya adalah: (1) Pada tingkat pusat berbentuk Badan yang menangani penyuluhan; (2) Pada tingkat provinsi berbentuk Badan koordinasi penyuluhan; (3) Pada tingkat kabupaten/kota berbentuk Badan pelaksana penyuluhan; dan (4) Pada tingkat kecamatan berbentuk Balai penyuluhan. Dalam undang-undang ini, swasta juga diberi kesempatan ambil bagian dalam penyuluhan dan dapat terbentuk oleh pelaku usaha dengan memperhatikan kepentingan pelaku utama serta pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan setempat. Kelembagaan swadaya juga dapat berperan dalam penyuluhan dan ini dapat dibentuk atas dasar kesepakatan antara pelaku utama (petani) dan pelaku usaha, sedangkan kelembagaan pada tingkat desa menurut undang-undang No. 16 tahun 2006 ini berbentuk kelompok penyuluhan desa/kelurahan yang bersifat non-struktural. Gambar 2.1, menunjukkan kelembagaan penyuluhan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.



Gambar.2.1. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
(Sumber: Departemen Pertanian, 2006)

Keterangan	:	Deptan	:	Departemen Pertanian
		DKP	:	Departemen Kelautan dan Perikanan
		Dephut	:	Departemen Kehutanan
		WDHKOOR	:	Wadah Koordinasi
		BPTP	:	Balai Penelitian Teknologi Pertanian

Secara umum peranan dari kelembagaan penyuluhan pertanian di Indonesia tertuang pada pasal 9 undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang intinya sebagai berikut :

Kelembagaan pada tingkat pusat/nasional, yaitu :

- Menyusun kebijakan yang bersifat umum, menyusun prosedur nasional, landasan dan akreditasi penyuluh, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan.
- Menyelenggarakan pengembangan penyuluhan, pengelompokan data, pelayanan, dan jaringan informasi penyuluhan.
- Melaksanakan koordinasi penyuluhan, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi serta alokasi dan distribusi sumberdaya penyuluh.
- Melaksanakan kerjasama penyuluhan nasional, regional dan internasional, dan
- Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta.

Badan pengelola penyuluhan tingkat pusat bertanggungjawab kepada Menteri Pertanian, pengelola penyuluhan di tingkat provinsi ditunjuk oleh gubernur dan dibentuk sekretariat dipimpin pejabat setingkat eselon II A, badan penyuluhan ini disebut lembaga pengelola provinsi. Badan pelaksana penyuluhan di tingkat kabupaten/kota, dipimpin pejabat setingkat eselon II dan bertanggungjawab kepada Bupati, lembaga penyuluhan pada tingkat kecamatan berupa Balai Penyuluhan Pertanian yang mempunyai tugas: (a) Menyusun program penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan; (b) Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program; (c) Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi teknologi, sarana produksi, dan informasi pasar; (d) Memfasilitasi perkembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama, seperti kelompok tani; dan (e) Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha bagi petani (pelaku utama).

g. Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan dilakukan oleh penyuluh PNS, penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya. Pengangkatan dan penempatan penyuluh PNS disesuaikan dengan

kebutuhan dan formasi yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah meningkatkan kompetensi penyuluh PNS melalui pendidikan dan pelatihan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh swasta dan penyuluh swadaya. Peningkatan kompetensi penyuluh sebagaimana dimaksud diatas berpedoman pada standar, akreditasi/setifikasi, serta pola pendidikan dan pelatihan penyuluh yang diatur dengan peraturan menteri (Departemen Pertanian, 2010).

Menurut Departemen Pertanian (2010), penyuluh PNS merupakan pejabat fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Alih tugas penyuluh PNS hanya dapat dilakukan apabila diganti dengan penyuluh PNS yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 16 Tahun 2006).

1) Ketenagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan

Kebijakan ke depan setiap desa akan dilayani oleh seorang penyuluh pertanian lapangan, agar kebutuhan petani di setiap desa dapat dilayani dengan optimal. Pusat kegiatan penyuluhan di kecamatan ada di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Guna memenuhi kebutuhan tenaga penyuluh di kecamatan perlu segera diusulkan rekrutmen penyuluh pertanian lapangan baru, baik berupa tenaga honorer, tenaga kontrak atau memanfaatkan penyuluh swasta dan penyuluh swadaya. Penyuluh pertanian lapangan di BPP bersifat polivalen dengan kompetensi di bidang tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan hortikultura. Dalam menjalankan fungsinya para PPL di BPP bertindak sebagai tim dengan mengikutkan penyuluh swasta dan swadaya yang ada. Penyuluh pertanian lapangan sebagai tenaga fungsional hanya menjalankan tugas yang berkaitan dengan penyuluhan dan pemberdayaan petani dan keluarganya. Fokus perhatian PPL di BPP adalah kebutuhan dan kepentingan petani di wilayahnya. Penyuluh pertanian lapangan berkedudukan sebagai mitra sekaligus sebagai pelayan para petani. Kinerja penyuluh dinilai berdasarkan kemajuan dan kepuasan para petani yang dilayaninya.

2) Ketenagaan Penyuluh Pertanian di Kabupaten/Kota

Sebelum berlakunya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, para PPL tersebar di berbagai unit kerja, untuk itu maka perlu diterbitkan Keputusan Bupati/Walikota yang memungkinkan para PPL itu berada dalam satu kelembagaan. Tenaga fungsional PPL hanya ada pada kelembagaan

ini. Penyuluh pertanian kabupaten/kota merupakan pelatih dan narasumber utama dalam pelatihan-pelatihan dua mingguan bagi PPL di BPP. Kompetensi penyuluh pertanian kabupaten/kota secara bertahap dikembangkan ke arah keahlian tertentu di bidang tanaman pangan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura. Keahlian atau spesialisasi yang akan dikembangkan meliputi aspek-aspek “*off-farm*” hulu (manajemen, alsintan, pupuk/kesuburan/pakan, hama/penyakit, pengolahan lahan dan air); budidaya “*on-farm*” (produksi, pengendalian hama & penyakit terpadu), dan “*off-farm*” hilir (penangan pasca panen, pengolahan hasil, pemasaran, kemitraan usaha, negosiasi, dan proposal usaha. Kegiatan utama penyuluh tingkat Kabupaten/kota adalah melatih dan menjadi narasumber/ sumber informasi para penyuluh BPP, serta memfasilitasi penyelenggaraan forum-forum penyuluhan di kecamatan dan desa.

3) Ketenagaan Penyuluh Pertanian di Provinsi

Tenaga penyuluh pertanian di propinsi berada di Badan Koordinasi Penyuluhan Tingkat Provinsi. Tenaga penyuluh di propinsi adalah tenaga penyuluh senior yang mempunyai kemampuan melaksanakan tugas-tugas antara lain: koordinasi, integrasi, sinkrokisasi, membuat kebijakan penyuluhan propinsi, meningkatkan kapasitas penyuluh di kabupaten/ kota, mengembangkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian).

4) Ketenagaan Penyuluh Pertanian di Pusat

Tenaga penyuluh di pusat berada pada Badan yang menangani penyuluhan (Badan Pengembangan SDM Pertanian). Tugas utama Badan Pengembangan SDM Pertanian adalah (a) mengembangkan kebijakan penyuluhan pertanian nasional, (b) mengkoordinasikan penyuluhan pertanian nasional, (c) mengembangkan kapasitas penyuluh dan pelaku utama serta pelaku usaha pertanian, (d) memfasilitasi penyuluhan pertanian, (e) menyusun program penyuluhan pertanian nasional dan melaksanakannya sesuai kewenangan pusat, (f) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian secara nasional.

h. Efektifitas Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan

Efektifitas kinerja penyuluh pertanian lapangan ditentukan oleh kesesuaian pelaksanaan job description atau pelaksanaan dari uraian tugas yang menjadi tanggungjawab PPL dalam posisi jabatannya. Setiap PPL dibebani tanggungjawab

untuk melaksanakan uraian tugas pada posisi jabatan sebagai pejabat fungsional dan pelaksana lapangan penyuluhan pertanian. Hasil kerjanya tersebut harus dipertanggungjawabkan sebagai perwujudan akuntabilitasnya kepada organisasi yang menugaskannya, maupun kepada masyarakat tani sebagai 'klien' yang dilayaninya (Suradisastra, 2008).

Efektifitas kinerja PPL sejak proses perencanaan, pengembangan program, pelaksanaan hingga proses pelaporan dan evaluasi berimplikasi pada proses pembelajaran masyarakat tani. Efektifitas kinerja PPL dalam perencanaan dan pengembangan program bukanlah sekedar hasil dalam bentuk program penyuluhan dan rencana kegiatan, melainkan prosesnya yang mencirikan proses pembelajaran bagi PPL maupun bagi masyarakat dan bagi aparat tidak kalah pentingnya. Sebagai agen perubahan (*change agent*) dalam pembangunan pertanian, penyuluh haruslah mampu belajar untuk mendorong masyarakat mengenali kebutuhan mereka sendiri untuk berubah kearah yang lebih baik. Hal ini dilakukan penyuluh dalam proses analisis potensi wilayah dan analisis kebutuhan (*need assessment*) dengan melibatkan masyarakat serta aparat pemerintahan. Indikator efektifitas kinerja dalam proses perencanaan yaitu adanya program penyuluhan, rencana kegiatan, proses analisis potensi dan kebutuhan serta pelibatan tokoh-tokoh masyarakat haruslah terukur dan mudah untuk diukur (Suradisastra, 2008).

Penyuluh melaksanakan kegiatan penyuluhan yang mengandung pembelajaran bagi petani untuk mampu memecahkan masalah. Proses belajar penyuluh haruslah mampu menyediakan materi, menerapkan metode penyuluhan serta alat bantu belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan ketersediaan sarana, alat dan bahan. Disinilah kreativitas, komitmen dan dedikasi penyuluh dipertaruhkan, kreatif dalam segala keterbatasan namun tetap persisten dan konsisten untuk mencapai tujuan.

Menurut Miftah (2006), pelaksanaan penyuluhan pendekatan kelompok seringkali lebih efektif daripada pendekatan individu. Pada pendekatan kelompok petani mendapat informasi bukan hanya dari penyuluh tapi juga belajar dari sesama rekan petani. Petani belajar bukan sekedar dari mendengarkan tetapi dari melihat dan juga melaksanakan dalam kehidupan yang nyata karena itulah efektifitas kinerja penyuluh dalam penumbuhkembangan kelompok tani bukanlah sekedar jumlah nama-nama kelompok, namun yang lebih penting adalah kegiatan dalam kelompok

sebagai wahana belajar bagi petani, lebih jauh lagi sebagai wahana bertumbuh dan berkembangnya kelembagaan ekonomi pedesaan yang diawali dengan ciri keswadayaan dan keswakarsaan petani.

Kemampuan penyuluh untuk mewujudkan efektifitas kinerja dalam melaksanakan semua tugas tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, yakni faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal sebagai karakteristik penyuluh maupun latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang membentuk perilakunya, juga faktor eksternal lingkungan kerja yang mendorong atau menghambat mereka untuk bekerja prima (Miftah, 2006).

i. Peranan Penyuluh Pertanian

Peranan penyuluh pertanian adalah membantu petani membentuk kelompok tani yang sehat dan membuat keputusan yang baik dengan cara berkomunikasi dan memberikan komunikasi yang mereka perlukan. Peranan utama penyuluh pertanian di banyak negara pada masa lalu dipandang sebagai alih teknologi dari peneliti ke petani. Sekarang peranan penyuluh pertanian lebih dipandang sebagai proses membantu petani untuk mengambil keputusan sendiri dengan cara menambah pilihan bagi mereka, dan dengan cara menolong mereka mengembangkan wawasan mengenai konsekuensi dari masing-masing pilihan (van den Ban dan Hawkins, 1999).

Menurut Lippit (1958) dalam Mardikanto (1995), terdapat tiga peranan penyuluh yang meliputi: (a) Pencairan diri dengan masyarakat sasaran; (b) Menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan; (c) Pemantapan dan pengembangan hubungan yang semakin akrab dengan masyarakat sasarnya. Ketiga peranan tersebut, oleh Swanson (1984) kemudian dikembangkan lagi menjadi beberapa peranan yang lebih terinci, dan dikelompokkan dalam tiga tahapan kegiatan yaitu: (a) pengembangan kebutuhan untuk melakukan perubahan; (b) menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan; dan (c) memantapkan dan mengembangkan hubungan dengan masyarakat sasaran.

Untuk dapat melakukan fungsi penyuluhan diperlukan sejumlah peran dalam memajukan usaha petani. Sanders et al (1966), Bertrand (1972), Dahama dan Bhatnagar (1980) mengemukakan peran penyuluh sebagai pendidik/guru bagi petani dalam meningkatkan pengetahuan dan bersikap positif terhadap ide baru. Menurut

Maunder (1972), di dalam penyebaran ide baru diperlukan tiga fungsi yaitu fungsi penelitian, fungsi penyuluhan dan fungsi penguasaan usahatani (petani) sebagai pengguna ide baru. Petani yang terdidik akan mudah menerima ide baru dan makin mampu memecahkan masalah pengembangan usahatani. Perubahan pengetahuan melalui pendidikan itu pula menurut Freire (1974) menjadikan petani tanggap terhadap ide baru dan mendorongnya berusaha secara terencana. Selanjutnya Maunder (1972) mengatakan peranan penyuluh selain sebagai agen pembaharuan (*change agent*) juga sebagai penghubung (fasilitator) antara lembaga penelitian dengan petani sebagai pelaku utama dalam menerapkan teknologi usahatani, dan penghubung antara petani dengan pelaku usaha pertanian (agribisnis) dalam memasarkan hasil pertanian.

Dari berbagai pengamatan lapang, Soewardi H (1987) mengemukakan peran penyuluh sebagai motivator, yaitu mendorong petani dalam proses perubahan dengan menggunakan ide baru untuk memperbaiki kehidupan. Sedangkan Lippit *et al* (1958) peran penyuluh sebagai motivator dalam menumbuhkan kebutuhan untuk berubah, menganalisis persoalan dengan berbagai pilihan, menciptakan tujuan perubahan menjadi tujuan sasaran, melaksanakan rencana perubahan kedalam tindakan, menstabilkan perubahan dan mengakhiri hubungan karena sasaran mampu mengembangkan.

Peran Penyuluh menurut Dahama dan Bhatnagar (1980) selain sebagai pendidik juga sebagai komunikator, dinamisator dan organisator. Sebagai organisator penyuluh berusaha agar petani dalam kehidupan bersifat kooperatif bersama petani lain yang secara dinamis menggunakan kemudahan dalam berusahatani.

Mardikanto (1998) mengemukakan beragam peranan penyuluh dalam satu kata yaitu edfikasi, yang merupakan akronim dari : edukasi, diseminasi informasi/inovasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi.

1) *Edukasi*, yaitu untuk memfasilitasi proses belajar yang dilakukan oleh para penerima manfaat penyuluhan (*beneficiaries*) dan atau stakeholders pembangunan yang lainnya. Seperti telah dikemukakan, meskipun edukasi berarti pendidikan, tetapi proses pendidikan tidak boleh menggurui apalagi memaksakan kehendak (*indoktrinasi, agitasi*), melainkan harus benar-benar berlangsung sebagai proses belajar bersama yang partisipatif dan dialogis.

- 2) *Diseminasi Informasi/Inovasi*, yaitu penyebarluasan informasi/inovasi dari sumber informasi dan atau penggunaannya. Tentang hal ini, seringkali kegiatan penyuluhan hanya terpaksa untuk lebih mengutamakan penyebaran informasi/inovasi dari pihak luar. Tetapi dalam proses pembangunan, informasi dari “dalam” seringkali justru lebih penting, terutama yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, pengambilan keputusan kebijakan dan atau pemecahan masalah yang segera memerlukan penanganan.
- 3) *Fasilitasi*, atau pendampingan, yang lebih bersifat melayani kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh *client*-nya. Fungsi fasilitasi tidak harus selalu dapat mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan atau memenuhi sendiri kebutuhan-kebutuhan klien, tetapi seringkali justru hanya sebagai penengah/mediator.
- 4) *Konsultasi*, yang tidak jauh berbeda dengan fasilitasi, yaitu membantu memecahkan masalah atau sekadar memberikan alternatif-alternatif pemecahan masalah. Dalam melaksanakan peranan konsultasi, penting untuk memberikan rujukan kepada pihak lain yang “lebih mampu” dan atau lebih kompeten untuk menanganinya. Dalam melaksanakan fungsi konsultasi, penyuluh tidak boleh hanya “menunggu” tetapi harus aktif mendatangi kliennya.
- 5) *Supervisi*, atau pembinaan. Dalam praktek, supervisi seringkali disalah-artikan sebagai kegiatan “pengawasan” atau “pemeriksaan”, tetapi sebenarnya adalah lebih banyak pada upaya untuk bersama-sama klien melakukan penilaian (*self assesment*) untuk kemudian memberikan saran alternatif perbaikan atau pemecahan masalah yang dihadapi.
- 6) *Pemantauan*, yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan selama proses kegiatan sedang berlangsung.
- 7) *Evaluasi*, yaitu kegiatan pengukuran dan penilaian yang dapat dilakukan pada sebelum (*formatif*), selama (*on-going, pemantauan*) dan setelah kegiatan selesai dilakukan (*sumatif, ex-post*), meskipun demikian, evaluasi seringkali hanya dilakukan setelah kegiatan selesai, untuk melihat proses hasil kegiatan (*output*) dan dampak (*outcome*) kegiatan, yang menyangkut kinerja (*performance*) baik teknis maupun non teknis.

Menurut Van Den Ban dan Hawkins (1999), penyuluh sebagai agen penyuluhan dapat membantu petani memahami besarnya pengaruh struktur sosial ekonomi dan teknologi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, dan menemukan cara mengubah struktur atau situasi yang menghalanginya untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka dapat membantu petani meramalkan peluang keberhasilan dengan segala konsekuensinya, dengan memberikan wawasan luas yang dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial dan aspek ekonomi.

j. Ukuran Keberhasilan Pemberdayaan Kelompok Tani

Menurut Davis dan Newstrom (1995), pemberdayaan dapat diartikan sebagai “penguatan masyarakat” (*community strengthening*) atau pengembangan masyarakat (*capacity development*). Penguatan atau pengembangan kapasitas disini tidak terbatas pada kapasitas pribadi atau individual, tetapi juga kapasitas entitas (organisasi) serta kapasitas sistem atau jejaring kelembagaan. Lingkup pemberdayaan petani tidak cukup dilakukan terbatas pada upaya “bina manusia” tetapi harus diikuti oleh upaya “bina usaha” guna memberikan penghasilan atau pendapatan yang lebih baik, tanpa itu bina manusia akan membuat masyarakat jemu, bahkan menumbuhkan kekecewaan yang berakibat pada skeptisme (ketidakpercayaan) terhadap program/kegiatan pemberdayaan petani berikutnya. Bina usaha perlu dibarengi “bina lingkungan” baik yang berupa lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, karena tanpa bina lingkungan bina manusia dan bina usaha dapat mengarah pada perusakan lingkungan, yang berakibat buruk atau mengancam keberlanjutan manusia dan usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kehidupan.

Pemberdayaan kelompok tani juga perlu melakukan bina kelembagaan terutama lembaga kelompok tani karena baik bina manusia, bina usaha, maupun bina lingkungan memerlukan layanan dan dukungan kelembagaan yang efektif baik dalam bentuk pengorganisasian, jaminan dan kepastian hukum/peraturan, nilai-nilai sosial atau budaya. Adapun indikator kegiatan pemberdayaan kelompok tani dapat di lihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Indikator Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani

Lingkup Kegiatan	Indikator
Bina Manusia/Petani	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kapasitas kepribadian petani - Pengembangan kapasitas di dunia kerja pertanian - Pengembangan kapasitas keprofesionalan
Bina Usaha Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan komoditas dan jenis usaha pertanian - Status kelayakan dan perencanaan bisnis pertanian - Pembentukan badan usaha milik petani - Perencanaan investasi dan penetapan sumber-sumber pembiayaan bidang pertanian - Pengelolaan SDM dan pengembangan karir - Manajemen produksi dan operasi - Manajemen logistik dan finansial - Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi bisnis bidang pertanian - Pengembangan jejaring dan kemitraan bidang pertanian - Pengembangan sarana dan prasarana pendukung bidang pertanian
Bina Lingkungan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan dan pelestarian lingkungan fisik pertanian - Kepedulian dan kesetiakawanan sosial - Akulturasi dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal
Bina Kelembagaan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan optimasi efektifitas kelembagaan ekonomi pertanian - Pengembangan dan optimasi efektifitas kelembagaan sosial - Pengembangan dan optimasi efektifitas kelembagaan tradisional

Sumber : Mardikanto (2010)

Menurut Hikmat (2006), syarat untuk mencapai tujuan-tujuan pemberdayaan kelompok terdapat tiga jalur kegiatan yang harus dilaksanakan, yaitu :

- (1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi kelompok untuk berkembang. Titik-tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakatnya memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan.
- (2) Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun, mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya.

(3) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki kelompok (*empowering*), dalam hal ini diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat kelompok tani menjadi makin berdaya dalam memanfaatkan peluang. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi, sehingga dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah agar tidak bertambah lemah. Upaya pemberdayaan kelompok perlu mengikutsertakan semua potensi yang ada pada kelompok.

2. Kelompok Tani

a. Pengertian Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai

Menurut Departemen Pertanian (2007), kelompok tani diartikan sebagai kumpulan orang-orang tani atau petani, yang terdiri atas petani dewasa (pria/wanita) maupun petani taruna (pemuda/i), yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontaktani. Pesisir pantai adalah daratan/tanah yang berbatasan langsung dengan pantai (air laut). Dari uraian tersebut maka pengertian kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai adalah kumpulan orang-orang tani atau petani yang dipimpin oleh seorang kontaktani dan terikat secara informal dalam satu kelompok serta mempunyai kebutuhan yang sama dan mempunyai lahan garapan usahatani berbatasan langsung dengan pesisir pantai.

b. Kebijakan Pengembangan Kelompok Tani

Kebijakan penyuluhan pertanian secara empiris memiliki peranan strategis dalam pembinaan kelompok tani terutama dalam memacu/pelancar pembangunan pertanian (Mosher, 1966). Pernyataan tersebut tidaklah berlebihan, karena pembinaan kelompok tani pada hakekatnya merupakan kegiatan pendidikan pembangunan kaitannya dengan : penyampaian inovasi, menyadarkan dan mendorong petani untuk mencoba dan menerapkan teknologi baru dalam pelaksanaan pembangunan pertanian (Mardikanto, 2007). Lebih-dari itu, Mosher (1966) menyatakan bahwa pendidikan merupakan unsur yang sangat esensial bagi pembangunan pertanian, bahkan Lippit dkk (1992) menempatkan pendidikan sebagai sumberdaya pembangunan yang terpenting, lebih penting dibanding investasi dalam bentuk modal dan peralatan. *commit to user*

Arti penting kebijakan dalam pembinaan kelompok tani ditunjukkan dengan kegiatan penyuluhan pertanian yang selalu berkaitan dengan banyak pihak dari macam kegiatan, yang meliputi: penelitian, diseminasi informasi/inovasi, pengadaan sarana produksi, pengadaan peralatan/mesin pertanian, pemasaran produk yang dihasilkan, pembiayaan, transportasi, dan aneka jasa yang lain (Departemen Pertanian 1997). Kegiatan pembinaan kelompok tani tidak cukup ditangani oleh satu institusi pemerintah, tetapi akan melibatkan banyak instansi yang memerlukan koordinasi dan integrasi secara berkelanjutan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 menyatakan bahwa kebijakan penyuluhan pertanian mencakup: strategi, kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, pembiayaan, sarana prasarana, serta pengendalian dan pengawasan.

c. Klasifikasi Kelompok Tani

Menurut Nasir (2010), pembinaan kelompok tani diarahkan pada peningkatan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri yang dicirikan antara lain:

- 1) Adanya pertemuan/rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan.
- 2) Disusunnya rencana kerja kelompok secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama, dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipasi.
- 3) Memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama.
- 4) Memiliki catatan/pengadministrasian organisasi yang rapi.
- 5) Memfasilitasi kegiatan usaha bersama disektor hulu dan hilir.
- 6) Memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar.
- 7) Sebagai sumber serta pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota kelompok tani khususnya.
- 8) Adanya saluran kerja sama antara kelompok tani dengan pihak lain.
- 9) Adanya pemupukan modal usaha, baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha/kegiatan kelompok.

Upaya peningkatan kemampuan anggota kelompok tani dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan kemitraan dengan tujuan agar kelompok tani mampu secara mandiri memanfaatkan kesempatan berusaha yang terbuka dengan pengelolaan sumberdaya seefisien mungkin. Kelompok tani didorong agar mampu meningkatkan usahataniya menuju skala ekonomi yang berorientasi agribisnis. Perkembangan tingkat kemampuan kelompok tani tersebut diukur dengan 5 (lima) tolak ukur kemampuan kelompok yaitu :

- a. Kemampuan merencanakan kegiatan untuk meningkatkan produktivitas usahatani para anggota dengan penerapan rekomendasi teknologi yang tepat dan pemanfaatan sumberdaya secara optimal
- b. Kemampuan melaksanakan dan mentaati perjanjian dengan pihak lain
- c. Kemampuan memupuk modal dan memanfaatkan pendapatan secara rasional
- d. Kemampuan meningkatkan hubungan melembaga dengan koperasi
- e. Kemampuan mencari dan memanfaatkan informasi serta menggalang kerjasama kelompok yang tercermin oleh tingkat produktivitas pendapatan dan kesejahteraan anggota kelompok.

Indikator dan bobot masing-masing tolak ukur sebagai dasar penilaian kemampuan kelompok dikeluarkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui surat keputusannya No. 168/Per/SM.170/J/11/11, tanggal 18 Nopember 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Kelompok tani. Petunjuk dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada penyelenggara penyuluhan dalam melaksanakan penilaian kemampuan kelompok tani sehingga diperoleh tingkat perkembangan dan klasifikasi kemampuan kelompok tani. Pada dasarnya penilaian kemampuan kelompok tani yang baru dikeluarkan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian ini masih hampir sama dengan aturan penilaian sebelumnya. Prinsip penilaian kemampuan kelompok tani tersebut, yaitu : sah (valid), objectif, keterandalan (reliable), relevan, dan efisien. Penilaian kemampuan kelompok tani dirumuskan dan disusun dengan pendekatan aspek manajemen dan aspek kepemimpinan, yang meliputi : (a) perencanaan, (b) pengorganisasian, (c) pelaksanaan, (d) pengendalian dan pelaporan, (e) pengembangan kepemimpinan Kelompok tani. Lima aspek penilaian itulah yang disebut Lima Kemampuan Kelompok tani atau Panca Kemampuan Kelompok Tani disingkat PAKEM POKTAN. Pakem Poktan

didasarkan dari fungsi-fungsi kelompok tani sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi (Departemen Pertanian, 2011).

Adapun penilaian dilakukan dengan menggunakan instrument yang merupakan pengembangan dari aspek dan indikator Pakem Poktan sebagai berikut : kemampuan merencanakan kegiatan dengan nilai maksimal indikator 200, kemampuan mengorganisasikan kegiatan dengan nilai maksimal indikator 100, kemampuan melaksanakan kegiatan dengan nilai maksimal indikator 400, kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan nilai maksimal indikator 150, kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompok nilai maksimal indikator 150, sehingga total nilai kemampuan kelompok tani : 1000 instrumen. Sedangkan klasifikasi kemampuan kelompok tani didasarkan hasil penilaian sebagai berikut : kelas pemula nilai 0-250, kelas lanjut nilai 251-500, kelas madya nilai 501-750, kelas utama nilai 751-1.000. Untuk pengukuhan kelas kelompok tani dilaksanakan berdasarkan hasil pengklasifikasian, yaitu dengan pemberian sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Camat, Bupati/Walikota sesuai klasifikasi kelompok , yaitu : kelas pemula sertifikat ditandatangani oleh kepala desa, kelas lanjut sertifikat ditandatangani oleh Camat ; kelas madya dan utama, sertifikat ditandatangani oleh Bupati/Walikota.

d. Dinamika Kelompok Tani

Dinamika kelompok adalah suatu proses kehidupan berkelompok yang merupakan fungsi dari kekuatan kelompok yang diarahkan pada pembentukan perilaku kelompok dan anggota kelompok untuk mencapai tujuan kelompok (Samsudin, 1987). Dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri terhadap keadaan. Dinamika juga berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Keadaan ini dapat terjadi karena kelompok tersebut bersifat dinamis, artinya setiap saat kelompok yang bersangkutan dapat berubah (Santosa, 2006).

Menurut Slamet (2004), faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dinamika kelompok antara lain : (1) Tujuan Kelompok, (2) Struktur Organisasi, (3) Fungsi Tugas Organisasi, (4) Pemeliharaan Organisasi, (5) Kekompakan Organisasi, (6) Iklim organisasi, (7) Tekanan pada Organisasi, (8) Efektifitas Organisasi, dan (9) Agenda Terselubung.

commit to user

e. Partisipasi Kelompok Tani

Partisipasi kelompok tani dalam pemberdayaan kelompok tani dapat diartikan sebagai ikut sertanya anggota dalam pemberdayaan kelompok tani, ikut dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pemberdayaan kelompok tani. Dengan arti bahwa partisipasi kelompok tani dalam pemberdayaan bukan hanya ikut menyumbangkan sesuatu input ke dalam proses pemberdayaan, tetapi termasuk ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pemberdayaan kelompok tani. Menurut Slamet (2003), tumbuhnya partisipasi dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu, adanya kesempatan untuk membangun kesempatan dalam pemberdayaan kelompok tani, kedua adanya kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan, dan ketiga adanya kemauan untuk berpartisipasi.

Menurut Harahap dan Subhilha (2006), partisipasi dalam kelompok dapat dibagi menjadi 5 (lima) jenis: (1) Ikut memberi input proses pemberdayaan kelompok tani, menerima imbalan atas input tersebut dan ikut menikmati hasilnya; (2) Ikut memberi input dan menikmati hasilnya; (3) Ikut memberi input dan menerima imbalan tanpa ikut menikmati hasil pemberdayaan kelompok tani secara langsung; (4) Menikmati/memanfaatkan hasil pemberdayaan kelompok tani tanpa ikut memberi input; dan (5) Memberi input tanpa menerima imbalan dan tidak menikmati hasilnya.

Verhagen dalam Mardikanto (1998) menyatakan bahwa partisipasi kelompok pada hakikatnya sangat ditentukan oleh adanya kesadaran anggota kelompok yang bersangkutan. Slamet (1987) menyatakan bahwa tumbuhnya partisipasi kelompok sebagai suatu tindakan yang nyata, diperlukan adanya tiga prasyarat yang menyangkut kemauan, kemampuan dan kesempatan untuk berpartisipasi.

d. Kemandirian Kelompok Tani

Kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat merupakan sebuah kegiatan dalam rangka memberdayakan masyarakat petani agar mau dan mampu secara mandiri berperan serta dalam pengelolaan usahatani untuk meningkatkan kesejahteraannya. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan pembentukan kelompok tani. Dengan pendekatan kelompok tani yang mandiri banyak manfaat yang akan dipetik oleh masyarakat. Pendekatan kelompok yang

“mandiri” dianggap penting karena disini masyarakat dibina untuk berkelompok yaitu agar petani memiliki wadah untuk berorganisasi dan bersosialisasi. Di dalam setiap kelompok biasanya selalu saja ada orang yang lebih dahulu memiliki informasi baru yang berguna bagi anggota lain. Kelompok tani ini akan berfungsi sebagai kelas belajar, wahana bekerjasama, dan unit produksi. Anggota kelompok tani diajak belajar sambil bekerja. Hal ini akan menciptakan suasana yang menyenangkan bagi anggota kelompok, yang akan menciptakan keakraban para anggota kelompok yang akan bermuara pada terciptanya kekohesifan kelompok.

Pada “pendekatan mandiri” anggota kelompok dibina untuk mandiri melalui kemampuan memecah sendiri masalah yang dihadapi baik teknis, sosial maupun ekonomi. Melalui kerjasama kelompok, anggota kelompok mengembangkan kemampuan-kemampuan mengidentifikasi masalah sampai mencari upaya pemecahan masalah dan akhirnya mengambil sendiri keputusan. Dalam kegiatan kelompok, anggota kelompok dibimbing untuk belajar memecahkan masalah-masalah yang dihadapi serta dibimbing untuk membiasakan mencari kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik sehingga secara bertahap anggota kelompok akan menjadi sumber daya manusia yang berinisiatif, produktif dan berswadaya. Dengan bimbingan yang berorientasi pada pendekatan mandiri, maka kelompok dibimbing untuk dapat mengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang mungkin dihadapi.

3. Pemberdayaan Kelompok Tani

Pada intinya pemberdayaan adalah *“to help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self confidence to use power and by transferring power from the environment to clients”*. Pemberdayaan mengupayakan bagaimana individu, kelompok, atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Inti utama dari pemberdayaan adalah tercapainya kemandirian (Payne, 2007).

Penyuluhan sebagai proses pemberdayaan, akan menghasilkan masyarakat yang dinamis dan progresif secara berkelanjutan, sebab didasari oleh adanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam diri mereka. Penyuluhan memiliki tujuan

utama yang tidak terbatas pada terciptanya *better farming, better business, dan better living*, tetapi untuk memfasilitasi masyarakat (penerima manfaat) untuk mengadopsi strategi produksi dan pemasaran agar mempercepat terjadinya perubahan-perubahan kondisi sosial, politik dan ekonomi sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup pribadi dan masyarakatnya (Mardikanto, 2009).

a. Pengertian Pemberdayaan Kelompok Tani

Menurut Priyono dan Pranarka (1996), pemberdayaan adalah memberikan atau mengalihkan kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar menjadi lebih berdaya. Klob (1995), mendefinisikan pemberdayaan (*empowering*) sebagai pemberian otonomi kepada karyawan untuk menerima lebih banyak tanggung jawab di dalam organisasi dan peningkatan rasa keefektifan mereka. Apabila dilihat lebih luas, pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah. Hulme dan Turner dalam Supriyono dan Pranarka (1996) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar secara lokal maupun nasional.

Pemberdayaan kelompok tani dapat diartikan, sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuai dengan keinginannya, karena itu pemberdayaan kelompok tani dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/*upgrade* utilitas dari obyek yang diberdayakan (Mardikanto, 2009).

Inti dari pemberdayaan kelompok tersebut adalah pendelegasian kekuasaan dan pengambilan keputusan ke tingkat yang lebih rendah, dengan menggunakan konsep-konsep memberi visi untuk masa depan, mengikutsertakan semua anggota dalam suatu kegiatan sehingga mereka dengan sendirinya tumbuh rasa kebanggaan pada diri mereka, kehormatan diri, dan rasa tanggung jawab (Kalsey dan Hearne, 1975). Dalam pandangan Kalsey dan Hearne (1975) bahwa apabila pemberdayaan kelompok kepada anggota tidak dilakukan maka perubahan dalam organisasi sulit dicapai. Pemberdayaan memiliki arti pemberian keterampilan dan informasi pada

anggota yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dan kegiatan secara tepat serta mampu mengatasi sendiri masalah yang dihadapi.

b. Tujuan Pemberdayaan Kelompok Tani

Menurut Mardikanto (2007), untuk mencapai tujuan-tujuan pemberdayaan terdapat tiga jalur kegiatan yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi kelompok tani untuk berkembang. Titik tolaknya adalah, pengenalan bahwa setiap manusia dan kelompoknya memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan.
2. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya.
3. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki kelompok tani (*empowering*)

Menurut Slamet (2000), tujuan pemberdayaan kelompok tani adalah :

- a) Memberdayakan sasaran (kelompok tani)
- b) Meningkatkan kesejahteraan sasaran (kelompok tani) secara mandiri dan,
- c) Membangun masyarakat (kelompok tani) madani.

Kegiatan pemberdayaan kelompok tani yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*), karena itu, kegiatan pemberdayaan kelompok tani selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan (*income generating*). Pemahaman seperti itu tidaklah salah, tetapi belum cukup. Sebab hakekat dari pemberdayaan kelompok tani adalah meningkatkan kemampuan, mendorong kemauan dan keberanian, serta memberikan kesempatan bagi upaya-upaya kelompok tani untuk dengan atau tanpa dukungan pihak luar mengembangkan kemandiriannya demi terwujudnya perbaikan kesejahteraan (ekonomi, sosial, fisik dan mental) secara berkelanjutan (Syamsiah, 1996).

c. Aspek dan Unsur-unsur Pemberdayaan Kelompok Tani

Ditinjau dari lingkup dan obyek pemberdayaan kelompok tani mencakup beberapa aspek (Mardikanto, 1995), yaitu:

- (1) Peningkatan kepemilikan aset (sumberdaya fisik dan finansial) serta kemampuan (secara individual dan kelompok) untuk memanfaatkan aset tersebut demi perbaikan kehidupan mereka. *commit to user*

- (2) Hubungan antar individu dan kelompoknya, kaitannya dengan pemilikan aset dan kemampuan memanfaatkannya.
- (3) Pemberdayaan dan reformasi kelembagaan kelompok tani.
- (4) Pengembangan jejaring dan kemitraan kerja, baik di tingkat lokal, regional, maupun global

Menurut Mardikanto (1995), upaya pemberdayaan kelompok tani perlu memperhatikan sedikitnya 4 (empat) unsur pokok, yaitu:

- (1) Aksesibilitas informasi, karena informasi berkaitan dengan : peluang, layanan, penegakan hukum, efektivitas negosiasi, dan akuntabilitas.
- (2) Keterlibatan atau partisipasi, yang menyangkut siapa yang dilibatkan dan bagaimana mereka terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan.
- (3) Akuntabilitas, berkaitan dengan pertanggung-jawaban publik atas segala kegiatan yang dilakukan dengan mengatas-namakan kelompok.
- (4) Kapasitas organisasi lokal, berkaitan dengan kemampuan bekerja sama, mengorganisir anggota kelompok tani, serta memobilisasi sumberdaya untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi.

d. Strategi Pemberdayaan Kelompok Tani

Menurut Lionberger dan Gwin (1983), ada tiga strategi utama pemberdayaan kelompok tani dalam praktek perubahan sosial, yaitu tradisional, aksi langsung dan transformasi. Strategi tradisional menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Strategi aksi langsung membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Strategi transformasi menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

Menurut Mardikanto (1995), strategi pemberdayaan kelompok tani pada dasarnya mempunyai tiga arah. *Pertama*, pemihakan dan pemberdayaan kelompok tani. *Kedua*, pamantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peranan serta kelompok tani. *Ketiga*, modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi, budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi kelompok tani. Menurut Sumodiningrat (1997), strategi pemberdayaan kelompok tani perlu dikembangkan yang intinya

adalah bagaimana kelompok tani harus dibantu agar lebih berdaya, sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kemampuan kelompok dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, tetapi juga sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi nasional.

e. Ukuran Keberhasilan Pemberdayaan Kelompok Tani

Efektivitas atau keberhasilan suatu kegiatan pemberdayaan kelompok tani dapat diukur dari seberapa jauh telah terjadi perubahan perilaku kelompok tani sasarannya, baik yang menyangkut: pengetahuan, sikap, dan ketrampilannya (Badan Pengendali Bimas, 1992). Semuanya itu dapat diamati pada :

- 1) Perubahan-perubahan pelaksanaan kegiatan bertani yang mencakup macam dan jumlah sarana atau teknik bertaninya;
- 2) Perubahan-perubahan tingkat produktivitas dan pendapatannya;
- 3) Perubahan dalam pengelolaan usaha (perorangan, kelompok, koperasi), serta pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari usahataniannya.

Kegiatan pembinaan kelompok bukan merupakan satu-satunya penyebab terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi. Lionberger dan Gwin (1983) dengan tegas menyatakan bahwa kegiatan pembinaan kelompok salah satu diantara sekian banyak variabel yang menyebabkan terjadinya perubahan perilaku kelompok dan perubahan-perubahan yang menjadi tujuan akhir dari pembinaan kelompok. Artinya, pembinaan kelompok yang baik tidak selalu menjamin tercapainya tujuan pembangunan, dan kegagalan pembangunan pertanian tidak selalu hanya disebabkan karena buruknya pelaksanaan pembinaan kelompok.

Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan kelompok mencakup (Mardikanto, 1998) :

- 1) Jumlah anggota kelompok yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam tiap kegiatan yang dilaksanakan.
- 2) Frekuensi kehadiran tiap-tiap anggota kelompok pada pelaksanaan tiap jenis kegiatan.
- 3) Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan anggota kelompok atas ide baru yang dikemukakan.
- 4) Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh kelompok yang ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan program pengendalian

- 5) Jumlah dana yang dapat digali dari anggota kelompok untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan.
- 6) Intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah.
- 7) Meningkatkan kapasitas skala partisipasi anggota kelompok.
- 8) Berkurangnya anggota kelompok yang menderita.
- 9) Meningkatnya kepedulian dan respon anggota kelompok terhadap perlunya peningkatan mutu hidup.
- 10) Meningkatnya kemandirian kelompok.

B. Penelitian Pendahuluan

Obyek penelitian pada penelitian ini adalah kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai di pantai utara laut Jawa di wilayah Kecamatan Gunung Jati dan Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. Kedua kecamatan tersebut dijadikan obyek penelitian karena peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai belum sesuai harapan kelompok tani dan pembinaan kelompok tani kedua kecamatan tersebut dibawah koordinasi wilayah kerja BP3K Kecamatan Gunung Jati.

Kecamatan Gunung Jati dan Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon secara geografis berbatasan langsung dengan laut Jawa yang disebut sebagai daerah Pantura (pantai utara) Jawa. Luas wilayah Kecamatan Suranenggala 3.393,15 Ha yang terdiri lahan sawah 1.569 Ha dan lahan darat 1.824,15 Ha, untuk Kecamatan Gunung Jati luas sawah 977 Ha dan lahan darat 978,41 Ha dengan luas total 1.974,41 Ha. Secara administratif Kecamatan Gunung Jati terbagi kedalam 15 desa sedangkan Kecamatan Suranenggala terbagi kedalam 9 desa. Jumlah kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai di lokasi penelitian sebanyak 26 kelompok, 6 kelompok tani berada di Kecamatan Gunung Jati dan 20 kelompok tani berada di Kecamatan Suranenggala, luas lahan garapan 26 kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai seluas 629 ha (rata-rata 24,19 ha/kelompok tani), sebagian besar (521 ha = 82,2%) lahan garapan pertaniannya berada pada lahan tadah hujan dan sisanya (108 ha = 18,8%) mempunyai irigasi setengah teknis, dengan keadaan sistem pengairan tersebut menyebabkan dalam masa satu tahun hanya bisa ditanami 1 kali tanam untuk irigasi tadah hujan dan 2 kali tanam untuk irigasi setengah teknis.

Kehidupan anggota kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai Kecamatan Gunung Jati dan Kecamatan Suranenggala sehari-hari selain berinteraksi sesama anggota kelompok juga berinteraksi dengan masyarakat sekitar lingkungannya seperti berinteraksi dengan para nelayan yang kehidupan kesehariannya mencari ikan di laut, sehingga apabila tidak ada kegiatan usahatani (bercocok tanam), maka untuk memenuhi kebutuhannya mereka (buruh tani) bekerja pada nelayan untuk menangkap ikan di laut sebagai buruh nelayan, atau sebagian dari mereka bekerja sebagai buruh angkut di pelabuhan Cirebon. Petani pemilik dan petani penggarap/penyewa pada saat tidak ada kegiatan usahatani (bercocok tanam) mengalihkan usahanya sebagai petani tambak ikan.

Partisipasi anggota kelompok tani dalam kegiatan pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai belum maksimal, yaitu sekitar 40 – 60 % dari jumlah anggota yang ada (rata-rata 26 orang per kelompok). Berdasarkan pengamatan dan membaca dokumen efektivitas kelembagaan pendukung dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai belum maksimal seperti dukungan dari KUD, LSM, Swasta, dan Perguruan Tinggi. Peranan KUD belum diberdayakan karena petani selama ini untuk memenuhi kebutuhan saprodi langsung membeli pada kios tani dan memasarkan hasil petaniannya langsung dijual pada pedagang tidak melalui KUD.

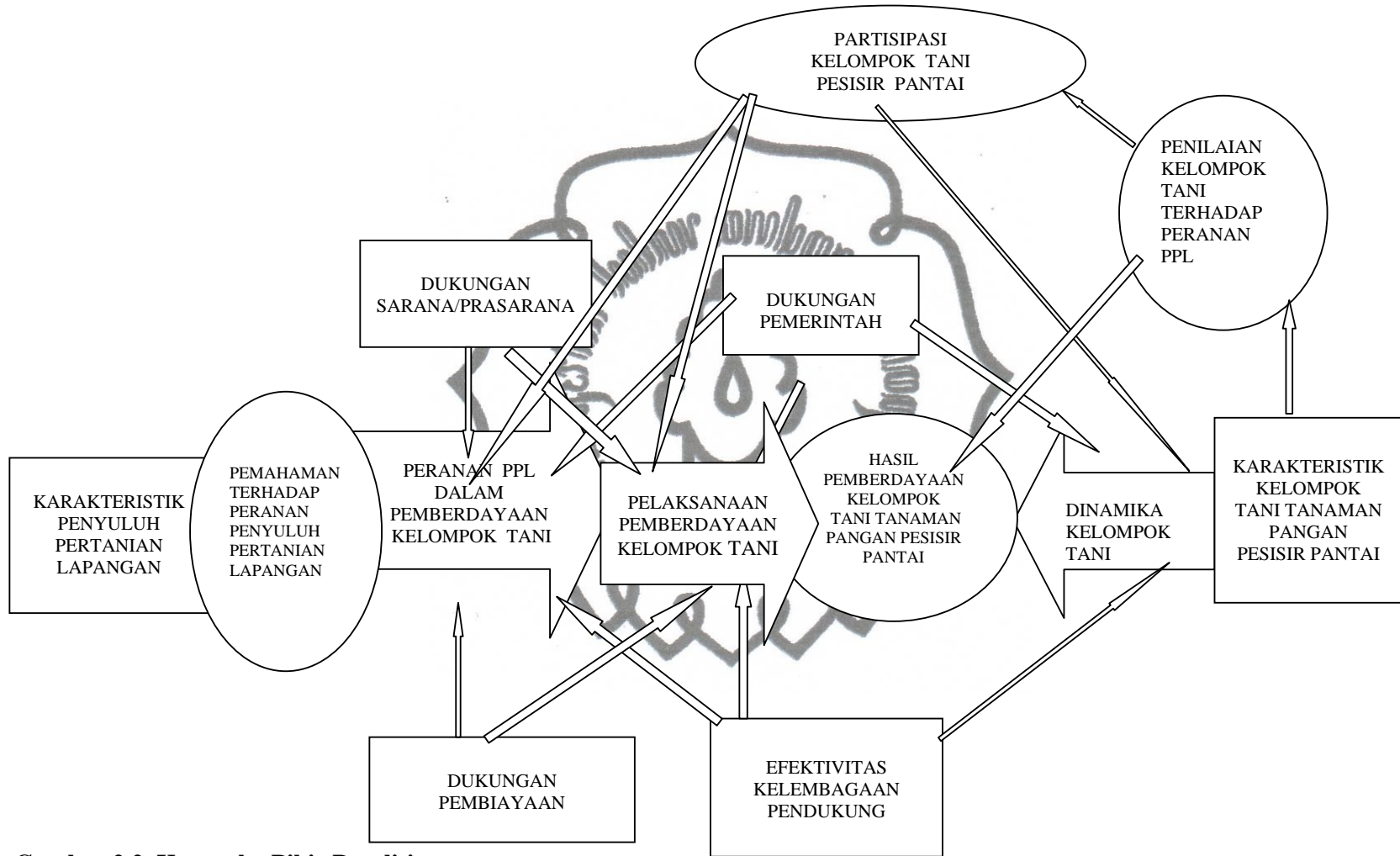
Pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai di Kecamatan Gunung Jati dan Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon dilaksanakan oleh penyuluh pertanian lapangan dibawah koordinasi BKP5K (Badan Ketahanan Pangan Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan) Kabupaten Cirebon. Peranan penyuluh pertanian lapangan dilakukan dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai adalah sebagai guru, organisator, fasilitator, konsultan, supervisor, pemantau, dan evaluator.

B. Kerangka Pikir

Peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai belum sesuai dari harapan kelompok tani, hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya pemahaman PPL terhadap karakteristik kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai. Dipihak lain karakteristik anggota kelompok tani itu sendiri seperti tingkat pengetahuan yang rendah, pemilikan aset modal yang minim,

partisipasi yang rendah serta keinginan untuk berubah yang rendah diduga menyebabkan kelompok tani belum berdaya, dengan demikian untuk mengatasi keadaan ini diperlukan keinginan yang sungguh-sungguh dari anggota kelompok tani untuk mengubah dalam berusahatani dengan bantuan pembinaan PPL, dukungan pemerintah, dukungan biaya, dukungan sarana prasarana, dan efektifitas kelembagaan pendukung sebagai bentuk partisipasi aktif dalam proses pemberdayaan kelompok tani.

Keberadaan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani tidak akan dirasakan manfaatnya oleh anggota kelompok tani tanpa adanya perubahan yang lebih baik pada usahatani kelompok dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota kelompok. Oleh karena itu peranan PPL dalam pemberdayaan mutlak diperlukan. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggota kelompok dimungkinkan dapat dicapai melalui usaha-usaha keberdayaan kelompok tani itu sendiri. Usaha-usaha peningkatan keberdayaan kelompok tani dapat dilakukan melalui perubahan-perubahan pada anggota kelompok tani baik dalam hal pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki sehingga kelompok tani mempunyai akses yang lebih tinggi untuk meningkatkan pendapatannya. Keberhasilan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani dipengaruhi oleh karakteristik kelompok tani pesisir pantai, dinamika kelompok tani, partisipasi kelompok tani, karakteristik PPL, dan pemahaman PPL terhadap perannya sebagai penyuluh. Dukungan pemerintah, dukungan biaya, dukungan sarana prasarana, dan efektifitas kelembagaan pendukung memungkinkan berjalannya pemberdayaan kelompok tani lebih baik sehingga anggota kelompok tani mampu mengembangkan diri untuk mencapai tujuannya, dengan kata lain program pemberdayaan kelompok tani oleh PPL dapat memberdayakan anggota kelompok tani dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian, baik kemandirian dalam merencanakan kegiatan, mandiri dalam pelaksanaan kegiatan dan mandiri dalam pengambilan keputusan yang akan bermuara pada tingkat kesejahteraan anggota kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai. Adapun kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.2. Kerangka Pikir Penelitian

BAB III. DIMENSI PENELITIAN

Dimensi penelitian dalam penelitian kualitatif adalah operasionalisasi variabel atau faktor-faktor yang akan dikaji dalam penelitian dan digunakan untuk memberikan arahan bagi pengukurannya. Variabel dalam penelitian ini meliputi : (1) peranan penyuluh pertanian lapangan dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai yang meliputi peranan sebagai edukator, fasilitator, organisator, konsultan, analisator, dan evaluator, (2) penilaian kelompok tani terhadap sikap dan tingkah laku PPL yang berkaitan dengan perannya dalam memberdayakan kelompok tani, (3) pemahaman PPL terhadap peranan yang diembannya sebagai petugas penyuluhan di lapangan, (4) pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan kegiatan evaluasi pemberdayaan kelompok tani, (5) karakteristik PPL meliputi tingkat pendidikan PPL, pengalaman jadi PPL, pemahaman PPL terhadap peranannya sebagai penyuluh, pemahaman PPL terhadap sistem sosial budaya masyarakat pesisir pantai, (6) karakteristik kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai meliputi nilai sosial budaya kelompok tani, kosmopolitan (tingkat interaksi) anggota kelompok tani, kepemilikan lahan anggota kelompok tani, pendidikan anggota kelompok tani, umur anggota kelompok tani, dan pendapatan anggota kelompok tani. (7) dinamika kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai, meliputi : tujuan kelompok, struktur kelompok, fungsi kelompok, mengembangkan dan memelihara kelompok, kesatuan kelompok, suasana kelompok, tekanan/desakan kelompok, dan efektivitas kelompok, (8) partisipasi kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai yaitu ikut sertanya anggota kelompok tani dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pemberdayaan kelompok tani, (9) dukungan pemerintah, dukungan sarana/prasarana, dan dukungan pembiayaan, (10) efektivitas kelembagaan pendukung, meliputi dukungan swasta, LSM, Perguruan Tinggi, dan lembaga penelitian, dan (11) hasil pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai tanaman pangan pesisir pantai, meliputi perubahan partisipasi kelompok, produktivitas kelompok, dinamika kelompok, dan kemandirian kelompok tani.

BAB IV. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kelompok tani tanaman pangan di wilayah Kecamatan Gunung Jati dan Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon yang merupakan wilayah sekitar pesisir pantai bagian utara Kabupaten Cirebon dan berbatasan langsung dengan laut Jawa. Pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar pemilihan lokasi tersebut adalah: (1) peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai belum sesuai harapan kelompok tani, (2) Jumlah kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai adalah 26 kelompok, jumlah kelompok tani yang cukup banyak.

B. Jenis dan Startegi Penelitian

Berdasarkan permasalahan, tujuan dan pendekatan analisisnya, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan tujuan untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap obyek yang terbatas. Obyek kajian penelitian yang ditelaah adalah mengenai peranan PPL pada pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai, pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani, penilaian kelompok tani terhadap peranan penyuluh pertanian lapangan, faktor-faktor yang mendukung peranan penyuluh pertanian lapangan dalam pemberdayaan kelompok tani, dan hasil peranan penyuluh pertanian lapangan dalam pemberdayaan kelompok tani.

C. Jenis dan Sumber Data

Dari sumber data/informasinya, data penelitian kualitatif ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data dan sumber informasi dari informan merupakan bagian sangat penting dalam kegiatan penelitian. Data untuk berbagai informasi ini sebagian besar berupa data kualitatif. Informasi tersebut akan digali dari berbagai sumber data. Jenis dan sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi enam sumber data (Yin 1987) yaitu (1) Dokumen yang diteliti meliputi : (a) dokumen prosedur pemberdayaan, (b) dokumen usulan kegiatan, revisi usulan dan pertanggungjawaban atau realisasi kegiatan, (c) dokumen berita acara (tingkat kelompok, Musyawarah Desa (Musdes), Musyawarah PPL tingkat Kecamatan dan Rapat PPL Tingkat Kecamatan, (d) dokumen temuan masalah dari petani dan penyuluh pertanian lapangan proses penanganan dan penyelesaian

commit to user

masalah, (e) laporan kegiatan harian, mingguan, bulanan dan tahunan (periodik) dari PPL baik tingkat kelompok tani, desa, dan tingkat kecamatan, (2) Rekaman arsip meliputi berbagai notulensi hasil pertemuan di tingkat (kelompok tani, desa, dan kecamatan), berbagai keputusan, perkembangan, permasalahan dan penanganan permasalahan, (3) Informan atau narasumber untuk diwawancarai, yang terdiri : (a) anggota kelompok tani, (b) pengurus kelompok tani (ketua, bendahara dan sekretaris kelompok tani, (c) Penyuluh Pertanian Lapangan, (4) Kegiatan atau aktivitas PPL di lapangan, (5) Tempat atau lokasi baik di tingkat petani, kelompok tani, balai desa, dan tingkat kecamatan, (6) Sarana prasarana, alat dan media yang menjadi alat pendukung dalam proses pemberdayaan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan juga jenis sumber data yang dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1) Observasi, dilakukan selama melangsungkan kunjungan-kunjungan lapangan, (2) Wawancara secara mendalam (*indepth interviewing*) dengan informan yaitu : pengurus kelompok tani, anggota kelompok tani, penyuluh pertanian lapangan, pamong desa, pejabat BP3K (3) Mengkaji dokumen dan arsip data sekunder yang berupa buku, laporan, dan catatan dikumpulkan dari Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kabupaten Cirebon, Badan Pusat Statistik (Cirebon Dalam Angka Tahun 2010), UPT BP3K (Unit pelaksana Teknik Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan) Kecamatan Gunung Jati dan Kecamatan Suranenggala, monografi desa dan administrasi kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai, (4) Pengumpulan data dengan *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan dengan wawancara tingkat kelompok tani dan dibahas lebih banyak di antara peserta untuk menggali data mengenai sikap, minat dan latar belakang mengenai kondisi dan juga untuk menggali tentang kebutuhan kelompok tani.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel ada 2 (dua) yaitu :

1. *Purposive sampling* atau lebih tepat disebut sebagai cuplikan dengan '*criterion-based selection*' dimana teknik cuplikan ini bersifat selektif dengan menggunakan pertimbangan berdasarkan konsep teoritis yang digunakan,

keingintahuan pribadi peneliti, karakteristik empirisnya dan lain-lain. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan cuplikan dengan cara statistik atau dikenal dengan "probability sampling". Pada penelitian kualitatif peneliti akan memilih informan yang dianggap paling tahu, sehingga pemilihan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemandirian peneliti dalam memperoleh data. Cuplikan semacam itu sebagai "internal sampling" yang memberikan kesempatan bahwa keputusan bisa diambil begitu peneliti mempunyai pikiran umum yang muncul mengenai apa yang sedang dipelajari, dengan siapa akan berbicara, kapan perlu melakukan observasi (*time sampling*) dan berapa jumlah serta macam dokumen yang perlu ditelaah. Purposive sampling adalah teknik pilihan sampel yang diarahkan pada sumber data yang dipandang memiliki data penting yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Anggota sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian. Dalam pelaksanaan pengumpulan data pilihan informan ditetapkan sebanyak 7 orang penyuluh yang terdiri 2 orang penyuluh PNS dan 5 orang penyuluh THL.PP serta 26 kelompok tani yaitu 19 kelompok tani pemula dan 7 kelompok tani lanjut (masing-masing dari kelompok tani ketua, sekretaris dan 1 orang anggota). Sedangkan bidang kebijakan dan kelembagaan akan dipilih informan 3 orang yaitu : Kepala BP3K Kecamatan Gunung Jati dan Suranenggala, koordinator bidang kelembagaan, koordinator bidang teknologi dan informasi. Informan tersebut dipilih karena dianggap mempunyai otoritas dan kualifikasi tentang perkembangan penyuluhan pertanian pada kelompok tani tanaman pangan sekitar pesisir pantai di Kecamatan Gunung Jati dan Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

2. Cuplikan waktu adalah teknik yang digunakan untuk mengamati langsung kegiatan atau peristiwa itu terjadi yang menggambarkan kegiatan pemberdayaan, mengingat ada waktu yang dipilih dan dipandang tepat untuk pengumpulan informasi sesuai dengan permasalahan yang dikaji, melalui kunjungan pejabat instansi Pemerintah, partisipasi dalam pemberdayaan, dan lain-lain.

F. Validitas Data

Validitas data dilakukan melalui teknik triangulasi (triangulasi data/triangulasi sumber dan triangulasi metode) serta reвью informan. Teknik triangulasi sumber/data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang sama atau

commit to user

sejenis dari berbagai sumber untuk dibandingkan dan diuji kebenarannya. Trianggulasi metode dengan cara mengumpulkan data sejenis dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda, yaitu melalui: *indepht interview*, observasi, *focus group discussion*, dan *content analysis*. Reviu informan adalah usaha pengembangan validitas penelitian, dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan rendah, menengah atau tinggi, orang berada (*kaya*) dan orang pemerintahan, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai reduksi data dengan melakukan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan *abstraksi* data. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian, dari data tersebut disusun rumusan pengertian secara singkat yang berupa pokok-pokok temuan kemudian diikuti dengan penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dan logis dengan suntingan sehingga peristiwa penelitian ini menjadi lebih jelas dipahami dan dilengkapi dengan (tabel, matrik, gambar, media informasi dan lain sebagainya). Tahapan terakhir adalah penarikan simpulan yang diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk dapat memberikan makna yang telah teruji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validasinya.

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Keadaan Umum Wilayah Penelitian

Kabupaten Cirebon adalah salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Barat yang mempunyai jumlah penduduk cukup besar yaitu 2.211.186 jiwa (Nomor 6 terbesar dari 26 Kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat). Posisi Kabupaten Cirebon berada pada jalur strategis dan titik simpul lalu lintas terutama ekonomi wilayah eks karesidenan Cirebon yang meliputi Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan (Ciyumajakuning). Kabupaten Cirebon merupakan daerah penghubung antara Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah karena terletak diantara perbatasan kedua propinsi tersebut. Kabupaten Cirebon secara administratif meliputi 40 kecamatan dan dibagi menjadi 412 Desa dan 12 Kelurahan. Daerah yang menjadi lokasi penelitian meliputi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Gunung Jati yang terbagi menjadi 15 Desa dan Kecamatan Suranenggala yang terbagi menjadi 9 Desa. Kedua kecamatan tersebut merupakan bagian wilayah Kabupaten Cirebon yang berada di utara dan berbatasan langsung dengan laut Jawa (Gambar 5.1).

Kecamatan Gunung Jati dan Kecamatan Suranenggala memiliki luas wilayah 43,53 Km² dan memiliki jarak tempuh ke pusat pemerintahan Kabupaten Cirebon ± 12 km, serta jarak tempuh ke pusat pemerintahan Propinsi Jawa Barat di Bandung ± 90 km. Batas wilayah Kecamatan Gunung Jati dan Kecamatan Suranenggala, sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kapetakan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Cirebon

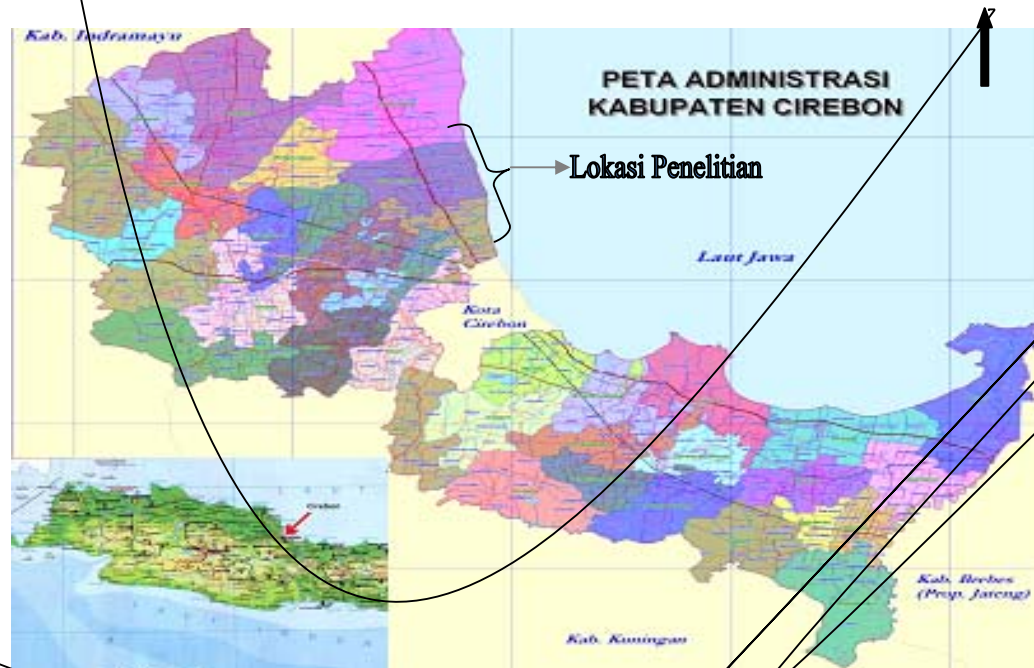
Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Plered, Tengahtani, dan Kecamatan Panguragan

Letak geografis wilayah penelitian berada pada lintasan jalan yang menghubungkan kawasan Jawa Tengah dan kawasan pantai utara Jawa Barat (Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Kerawang dan Kabupaten Bekasi). Berdasarkan topografi wilayah penelitian adalah daerah dataran rendah dengan rata-rata ketinggian 0 sampai dengan 6 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan lahan

commit to user

antara 8 - 15%, jenis tanah grumosol dan aluvial dengan pH berkisar antara 5,5, sampai dengan 7,5.



Gambar 5.1. Peta Lokasi Penelitian.

Kecamatan Gunung Jati secara administratif dibagi menjadi 15 Desa, 297 RT dan 85 RW, sedangkan Kecamatan Suranenggala dibagi menjadi 9 Desa, 187 RT dan 55 RW. Prasarana transportasi jalan di lokasi penelitian dilalui oleh jalan raya yang menghubungkan antara kecamatan satu dengan kecamatan yang lainnya. Keadaan jalan tersebut sebagian besar sudah beraspal, dengan demikian keadaan lalu lintas perhubungan dan pemasaran hasil pertanian maupun pengangkutan sarana produksi pertanian dan kebutuhan lainnya dapat dikatakan cukup lancar.

2. Keadaan Sosial Budaya di Desa-desa Pesisir Pantai

Hubungan sosial masyarakat desa di daerah penelitian dapat dilihat melalui pranata-pranata yang masih bertahan melalui kerjasama dalam bentuk tindakan kolektif yang mereka sebut dengan gotong royong, dalam hal ini gotong royong memiliki pengertian yang lebih luas dalam berbagai kegiatan baik untuk kepentingan umum maupun individu. Pertama, gotong royong yang dilakukan untuk membersihkan, memperbaiki maupun membangun sarana dan prasarana lingkungan

seperti jalan, pos kamling, gorong-gorong dan lain-lain. Dalam kegiatan ini sumbangan yang diberikan berupa tenaga, uang, material dan makanan. Kedua, sambatan adalah gotong royong yang dilakukan pada saat ada warga yang membangun rumah, rewang (membantu) pada saat hajatan misalnya pada acara upacara perkawinan, kelahiran, hitanan/sunatan dan lain-lain. Ketiga, gotong royong pada saat layad (mengurus kematian), warga membantu memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan jenazah serta memberi sumbangan berupa uang maupun kain kafan yang dananya diambil dari kas RW atau RT setempat. Selain itu, ketika ada warga yang sakit baik di rumah maupun rumah sakit, seluruh warga akan menjenguk dan memberi bantuan dana yang diambil dari kas RW atau RT. Dana kas RT/RW dipergunakan untuk kegiatan gotong royong tersebut diperoleh dari iuran dana sosial yang biasanya dihimpun setiap seminggu atau sebulan sekali.

Kegiatan keagamaan seperti yasinan, tahlilan dan pengajian mingguan merupakan pranata sosial yang paling menonjol terutama di wilayah Kecamatan Gunung Jati. Melalui kegiatan ini tokoh-tokoh agama menyampaikan berbagai informasi tentang keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan. Biasanya tokoh agama dari satu Desa tidak hanya berdakwah di Desanya saja tetapi juga di Desa lain dan sebaliknya secara bergantian.

Pranata sosial masyarakat juga dipelihara melalui kegiatan keagamaan menurut tradisi Jawa seperti suroan, muludan, ngunjung (sedekah bumi), mapag sri (karnaval sepasang dewa padi) dan nadran (pesta laut). Suroan merupakan upacara tahunan dalam rangka memperingati datangnya tahun baru Islam (hijriyah), muludan adalah upacara tahunan dalam rangka memperingati datangnya bulan Maulid (kelahiran Nabi Muhammad, SAW). Ngunjung adalah upacara yang dilakukan oleh para petani dalam menghadapi musim tanam tiba dengan harapan usahatani/bercocok tanam akan diberikan kemudahan dan dijauhkan dari malapetaka. Mapag sri adalah upacara karnaval mengusung pengantin padi yang dilaksanakan menjelang panen padi raya tiba sebagai bentuk rasa syukur akan datangnya masa panen dengan harapan hasil yang melimpah. Nadran (pesta laut) adalah upacara tahunan yang dilakukan oleh para nelayan untuk mensyukuri hasil laut yang diperoleh setiap hari dan bertujuan menolak bala/celaka.

3. Karakteristik Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai

Karakteristik kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai sebagai berikut :

- a) Anggota kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai selain berusahatani tanaman padi juga merangkap sebagai nelayan dan petambak ikan.
- b) Petani pemilik dan petani penggarap/penyewa pada saat tidak ada kegiatan usahatani tanaman padi mengalihkan modal usahanya untuk mengembangkan usaha tambak ikan dan usaha nelayan.
- c) Kehidupan keluarga anggota kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai boros (konsumtif).
- d) Pada saat menjelang tanam diselenggarakan upacara ngunjung (sedekah bumi) dengan harapan agar dalam pelaksanaan kegiatan bercocok tanam diberikan kelancaran dan mendapat panen yang melimpah.
- e) Setelah kegiatan panen berakhir biasanya petani melakukan upacara mapag sri yaitu upacara ritual karnaval mengusung sepasang pengantin dewa padi sebagai persembahan perayaan panen dan rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh.

4. Karakteristik Penyuluh Pertanian Lapangan

Karakteristik PPL dalam memberdayakan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai pada penelitian ini meliputi : Tingkat pendidikan PPL pada umumnya sudah baik, sebagian besar (85%) adalah sarjana (S1) tamatan Perguruan Tinggi bidang pertanian, (15%) tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian, pengalaman jadi PPL lebih dari 5 tahun, pemahaman PPL terhadap peranannya sebagai penyuluh cukup baik, PPL bisa memahami peranannya sebagai guru, fasilitator, konsultan, supervisor, dan evaluator, pemahaman PPL terhadap sistem sosial budaya masyarakat pesisir pantai cukup baik, pemahaman tersebut meliputi : hubungan sosial masyarakat pesisir pantai, proses sosial masyarakat pesisir pantai, dan kebudayaan masyarakat pesisir pantai.

5. Peranan PPL Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai

Perkembangan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai setelah adanya pemberdayaan dari PPL menunjukkan adanya peningkatan perkembangan walaupun dapat dikatakan masih pada tahap berkembang, peningkatan tersebut terjadi setelah beberapa kelompok tani menerima bantuan modal dari pemerintah melalui program

PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan), hal ini seperti yang dinyatakan oleh Bapak Tn (Bendahara kelompok tani):

“... Setelah adanya pemberdayaan kelompok tani dari PPL dan adanya bantuan modal dari pemerintah melalui program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) kelompok tani mengalami perkembangan yang cukup baik dalam penguasaan pengetahuan, keterampilan maupun pengelolaan usahatani.....”

Unit usaha yang telah dijalankan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai dalam perkembangannya saat ini yaitu unit usaha permodalan melalui simpan pinjam yang mengarah pada usaha keuangan mikro, unit usaha lain yang saat ini akan direncanakan adalah unit usaha saprodi, unit usaha pemasaran, serta jalinan kemitraan dengan pihak luar atau pelaku agribisnis. Peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan yang telah dilaksanakan di lapangan meliputi: peranan sebagai guru, organisator, fasilitator, konsultan, supervisor, pemantau, dan evaluator.

Peranan penyuluh pertanian lapangan sebagai guru dalam kegiatan pembelajaran dilakukan oleh PPL pada saat pertemuan atau musyawarah yang diadakan kelompok tani, PPL aktif memberikan edukasi kepada pengurus dan anggota kelompok tani, dimana PPL berusaha memfasilitasi proses belajar yang dilakukan oleh kelompok tani dan anggotanya yang bersifat partisipatif dan dialogis. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat bersama antara PPL dan pengurus kelompok. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Sr (Bendahara Kelompok tani) :

“...PPL aktif memberikan pembelajaran kepada pengurus dan anggota kelompok tani, dimana PPL berusaha memfasilitasi proses belajar yang dilakukan oleh kelompok tani dan anggotanya yang bersifat partisipatif dan dialogis. Proses belajar dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat bersama antara PPL dan pengurus kelompok... “

Kegiatan pembelajaran yang dibuat dalam kelas belajar mengajar merupakan wadah bagi setiap anggota untuk berinteraksi guna meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan (PSK) dalam berusahatani lebih baik dan menguntungkan, serta berperilaku lebih mandiri untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Peranan PPL sebagai organisator dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai yaitu mengorganisasi dalam pemenuhan kebutuhan pokok yang diperlukan seperti mengorganisasikan pengadaan bibit, pupuk, dan alat mesin

pertanian dan alat pemanenan. Sampai saat ini belum ada upaya dari PPL untuk mengorganisasikan dalam mengembangkan kebutuhan untuk melakukan perubahan.

Kondisi tersebut seperti diceritakan oleh Bpk As (Sekretaris Kelompok Tani):

“..... ketika menjelang musim tanam PPL biasanya membantu dan memfasilitasi pengadaan bibit padi, pupuk urea, pupuk fosfat, pupuk kompos, dan traktor. Sedangkan pada proses pemeliharaan tanaman apabila ada serangan hama penyakit membantu mengadakan pestisida atau mengatur petani untuk pemberantasan hama tikus dengan gropyokan.....”.

Peranan PPL sebagai fasilitator dilakukan oleh PPL dalam kegiatan penyusunan RKK dan RDKK oleh kelompok tani, PPL selalu hadir untuk memberikan pengarahan dan masukan pada saat penyusunan RKK dan RDKK setiap satu tahun sekali dan 4 bulan sekali yang merupakan agenda pokok dan wajib bagi kelompok tani, penyusunan RKK dan RDKK juga melibatkan pamong desa terutama raksabumi pamong desa yang mengurus bidang pertanian. Keadaan ini seperti diceritakan oleh Bapak Sr (Raksabumi Desa) :

“... Saya selaku Raksabumi selalu dilibatkan oleh PPL untuk menyusun RKK, RDKK dan program pemberdayaan kelompok tani yang akan disusun oleh Kelompok tani dan PPL..”

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Bapak Sw (Ketua Kelompok Tani):

“...Dalam penyusunan RKK dan RDKK, saya selaku ketua kelompok diberi bimbingan, arahan dan pendampingan oleh PPL...”

Selain kegiatan di atas Penyuluh Pertanian Lapangan juga memfasilitasi kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai untuk melakukan jalinan kemitraan dengan pihak luar atau pelaku agribisnis dan memfasilitasi kepentingan kelompok dengan pemerintah daerah berkaitan dengan kebijakan yang diterapkan dalam pengembangan usaha di bidang pertanian. Penyuluh pertanian lapangan membantu kelompok tani mencari informasi-informasi mengenai pihak-pihak yang bersedia menjalin kerjasama dengan kelompok tani, tapi usaha itu belum berhasil karena sampai saat ini belum ada kesepakatan atau MoU dengan pihak luar. Keadaan tersebut seperti dikemukakan oleh Cu (Anggota Kelompok Tani):

“.... Pak mantri pernah mencari orang untuk membeli hasil pertanian dengan mempertemukan calon pembeli dan anggota kelompok tani, tapi sampai sekarang”.

Adanya jalinan kemitraan kerja yang erat didasari oleh rasa saling ketergantungan, saling membutuhkan dan saling memperkuat akan semakin mendorong kelompok tani mengembangkan kemitraan dengan pihak ketiga lebih luas lagi. Kenyataan di lapangan usaha tersebut belum maksimal karena sampai saat ini belum adanya kerjasama atau MoU antara kelompok tani dengan pihak luar, kerjasama hanya sebatas dilakukan oleh individu atau perorangan anggota kelompok tani seperti pinjaman kredit pada lembaga keuangan dan pinjaman saprodi pada kios tani.

Dalam kegiatan fasilitas kelompok tani dengan pemerintah daerah yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan bidang pertanian telah dilakukan oleh PPL, seperti diceritakan oleh Bapak Fz (Kepala BP3K):

“ saya selaku ketua BP3K sering memberikan masukan pada BKP5K dan Dinas Pertanian Kabupaten dalam kebijakan pengembangan bidang pertanian, dimana masukan itu berasal dari inspirasi anggota kelompok tani....”.

Peranan PPL dalam kegiatan konsultasi adalah kegiatan yang dilakukan PPL untuk membantu memecahkan masalah atau sekadar memberikan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang dihadapi kelompok tani. Dalam melaksanakan peranan konsultasi PPL memberikan konsultasi pada saat kunjungan lapangan terutama pada kegiatan budidaya mulai dari penyiapan sarana produksi, pembuatan persemaian, penanaman, pemeliharaan tanaman (penyiangan, pengairan, pemupukan berimbang, dan pengendalian hama penyakit) sampai penanganan panen dan pasca panen. Kondisi tersebut diceritakan oleh Bapak Dk (Ketua Kelompok Tani) :

“...Penyuluh Pertanian Lapangan memberikan konsultasi hanya pada saat kunjungan lapangan seperti pada kegiatan budidaya mulai dari penyiapan sarana produksi, pembuatan persemaian, penanaman, pemeliharaan tanaman (penyiangan, pengairan, pemupukan berimbang, dan pengendalian hama penyakit) serta penanganan panen...”

Peranan PPL dalam kegiatan supervisi/pembinaan kelompok tani dilakukan terhadap perkembangan usaha kelompok seperti melakukan identifikasi masalah yang dihadapi kelompok tani dan anggotanya, baik masalah yang berkaitan dengan produksi usaha tani mulai dari pengadaan bibit, kesuburan tanah, pemeliharaan tanaman, pengendalian hama penyakit, panen dan pasca panen, maupun masalah-masalah yang berhubungan dengan administrasi kelompok.

Hasil pengamatan peneliti dan diskusi mendalam dengan pengurus kelompok tani Bapak Iy (Ketua Kelompok Tani) menyatakan :

“..... PPL sering membantu anggota dalam melakukan penilaian terhadap perkembangan usahatani seperti melakukan identifikasi masalah yang dihadapi kelompok tani dan anggotanya serta berusaha untuk dicarikan pemecahannya....”.

Pendapat senada diungkapkan Bapak Kuwu Dj (Kepala Desa) :

“.... PPL melakukan identifikasi masalah yang dihadapi kelompok tani dan anggotanya, baik masalah yang berkaitan dengan produksi usaha tani maupun masalah-masalah yang berhubungan dengan administrasi kelompok, selanjutnya bersama-sama pengurus dan anggota kelompok mencari solusi yang terbaik dengan memperhatikan sumberdaya atau potensi yang ada....”

Peranan PPL dalam kegiatan pemantauan dilakukan terhadap perkembangan usaha kelompok tani terutama pelaksanaan budidaya tanaman dari mulai pengadaan sarana prasarana produksi (saprodi), proses budidaya sampai penanganan panen dan pasca panen. Sedangkan pemantauan PPL terhadap perkembangan kelompok tani yaitu dengan melakukan pencatatan mengenai keanggotaan dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok tani, dari pemantauan tersebut PPL diharuskan membuat laporan harian dan mingguan kepada Kepala Bidang SDM dan Kelembagaan BP3K. Hal tersebut seperti diutarakan oleh Ibu E.M Pembantu Pelaksana Teknis (P2T) Bidang SDM dan Kelembagaan BP3K:

“ Setiap bulan PPL diwajibkan membuat laporan pelaksanaan pemberdayaan petani termasuk di dalamnya kegiatan pemantauan aktifitas usahatani kelompok dan selanjutnya akan dicek/dikonfirmasikan dengan jadwal rencana kegiatan yang telah dibuat oleh masing-masing penyuluh...”

Peranan PPL sebagai evaluator dilakukan pada kegiatan pemberdayaan kelompok tani meliputi: evaluasi terhadap kegiatan pengadaan sarana prasarana produksi yaitu dengan menilai pengadaan bibit, pupuk, mesin, alat pertanian, evaluasi terhadap proses produksi/budidaya tanaman meliputi evaluasi persiapan tanam, pelaksanaan tanam, pemeliharaan tanaman, perlindungan tanaman, penanganan panen dan pasca panen serta pemasaran, dan evaluasi terhadap perkembangan kelompok tani yang meliputi kegiatan menumbuh-kembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan kelompok tani.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, membaca dokumen laporan kerja PPL dan wawancara mendalam dengan Kepala BP3K Kecamatan Gunung Jati dan Suranenggala, peneliti menyimpulkan bahwa PPL lebih sering mengadakan evaluasi

pada proses (selama kegiatan) dan akhir kegiatan seperti pada saat proses budidaya dan hasil panen, sedangkan evaluasi sebelum kegiatan jarang/kadang-kadang dilakukan begitu pula evaluasi terhadap dampak pemberdayaan tidak pernah dilakukan. Kondisi tersebut seperti diutarakan oleh Bapak Td (Ketua Kelompok Tani) :

“...Pak Mantri lebih sering mengadakan evaluasi pada proses (selama kegiatan) dan akhir kegiatan seperti pada saat proses budidaya dan hasil panen, sedangkan evaluasi sebelum kegiatan jarang/kadang-kadang dilakukan..”

6. Dukungan Pemerintah, Pembiayaan, dan Sarana/prasarana.

a. Dukungan Pemerintah

Pada penelitian ini yang dimaksud dukungan pemerintah adalah dukungan yang berasal dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat baik dukungan dari kepala Desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat. Indikator dukungan pemerintah meliputi : (a) penguatan kelembagaan usaha, (b) pengembangan manajemen, (c) pengembangan usaha, dan (d) peningkatan SDM (Penyuluh dan anggota kelompok tani). Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dukungan Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Distanbunakhut dan BKP5K terhadap pemberdayaan kelompok tani oleh PPL tergolong cukup baik. Dukungan tersebut dibuktikan berupa bantuan sarana produksi (pengadaan bibit, pupuk organik, dan pestisida organik), bantuan pembinaan oleh PPL, bimbingan dan pendampingan terhadap kelompok tani oleh PPL serta bantuan untuk petani miskin melalui program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan).

b. Dukungan Pembiayaan

Dukungan pembiayaan adalah dukungan dana yang diperoleh PPL dan kelompok tani dalam pengembangan SDM dan usaha kelompok. Dana tersebut bisa di diperoleh dari: dalam kelompok dan dari luar kelompok, pemerintah, swasta maupun pihak luar sebagai mitra kerja. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, dukungan biaya pemberdayaan selama ini yang diterima kelompok tani antar lain : (1) Bantuan berasal dari Pemerintah melalui program SLPTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Pertanian Terpadu) berupa pengadaan sarana produksi (pengadaan bibit, pupuk organik, dan pestisida organik) dan bantuan modal melalui program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan), (2) Bantuan kredit modal dari

Lembaga Keuangan Mikro yang ada di Desa (KPL Sendi Jaya, KUD Harum Sari, Bagus Slamet, Hidayatul Mutaa'limin, Perambah Bulan, dan Karya Jati Mulya) modal Lembaga Keuangan Mikro berasal dari anggota, bantuan pemerintah dan kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya, dan (3) Pinjaman dari Distributor/Kios Tani yaitu kredit pengadaan sarana produksi seperti kredit pupuk, pestisida dan alat pertanian yang dibayar pada saat panen (Yarnen).

c. Dukungan Sarana/Prasarana

Dukungan sarana/prasarana adalah dukungan dalam pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani oleh PPL, dukungan tersebut merupakan dukungan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana pemberdayaan seperti : pengadaan alat transportasi (kendaraan bermotor), alat peraga pemberdayaan, modul atau materi pemberdayaan, dan bahan atau alat demonstrasi (Demplot). Berdasarkan pengamatan dan wawancara terhadap PPL, sarana dan prasarana yang tersedia belum maksimal, seperti pengadaan kendaraan bermotor roda dua hanya sebatas penyuluh yang berstatus PNS saja sedangkan Penyuluh THL.PP belum mendapat jatah kendaraan, sehingga ketika mengadakan kegiatan pemberdayaan harus memiliki sendiri atau pinjam kendaraan pada rekan sejawat. Adapun modul atau materi, alat peraga penyuluhan sudah cukup tersedia. Alat dan bahan demonstrasi (Demplot) cukup tersedia karena pengadaannya disesuaikan dengan program pemberdayaan yang telah direncanakan sebelumnya.

7. Hasil Peranan PPL Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai

Hasil Pemberdayaan Kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai oleh PPL digambarkan pada perubahan partisipasi kelompok, produktivitas kelompok, dinamika kelompok, dan kemandirian kelompok yang lebih baik dari pada sebelum adanya pemberdayaan kelompok tani oleh PPL. Berdasarkan hasil wawancara, Focus Group Discussion (FGD), dokumentasi, dan pengamatan peneliti terhadap partisipasi kelompok, produktivitas kelompok, dinamika kelompok, dan kemandirian kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai setelah adanya pemberdayaan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan dapat digambarkan sebagai berikut: Partisipasi anggota kelompok tani dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani cukup baik (rata-rata kehadiran 70% dari jumlah

anggota kelompok), dimana anggota dan pengurus kelompok dengan bimbingan dan arahan PPL membuat perencanaan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani yang meliputi: kegiatan persiapan pengadaan sarana produksi/saprodi, persiapan lapangan untuk penanaman, penanaman padi, pemeliharaan tanaman, pengendalian hama penyakit, dan mengikuti kegiatan pengelolaan panen dan pascapanen, sedangkan partisipasi anggota kelompok masih rendah (rata-rata kehadiran 30 % dari jumlah anggota kelompok) pada kegiatan evaluasi baik evaluasi pada kegiatan sebelum tanam dan evaluasi terhadap hasil produksi, partisipasi anggota kelompok tani cukup baik (rata-rata kehadiran 65 % dari jumlah anggota kelompok) dilakukan pada evaluasi pelaksanaan pemberdayaan atau kegiatan budidaya tanam. Kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai mengalami peningkatan produktivitas dari 6,1 ton/ha menjadi 6,6 ton/ha, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok tani dalam pengelolaan usaha. Kegiatan pemberdayaan kelompok tani oleh PPL dilakukan juga melalui pendekatan kelompok yang “mandiri” karena kelompok tani dibina untuk mandiri melalui kemampuan memecah sendiri masalah yang dihadapi baik teknis (kegiatan pengadaan sarana prasarana pertanian dan penerapan teknologi budidaya), masalah sosial maupun ekonomi (pengadaan modal dan pengembangan modal). Kelompok tani dilatih dan dididik untuk kemandirian dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi usahatani. Melalui kerjasama kelompok anggota kelompok tani mengembangkan kemampuan-kemampuan mengidentifikasi masalah sampai mencari upaya pemecahan masalah dan akhirnya mengambil sendiri keputusan. Dalam kegiatan kelompok tani anggota kelompok dibimbing untuk belajar memecahkan masalah-masalah yang dihadapi serta dibimbing untuk membiasakan mencari kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik sehingga secara bertahap anggota kelompok akan menjadi sumber daya manusia yang berinisiatif, produktif dan berbudaya, dengan bimbingan yang berorientasi pada pendekatan mandiri, maka kelompok tani dibimbing untuk dapat mengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang mungkin dihadapi.

Hasil Pemberdayaan Kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai oleh PPL digambarkan pada perubahan dinamika kelompok tani yang lebih baik dari pada sebelum adanya pemberdayaan kelompok tani oleh PPL. Berdasarkan hasil wawancara, Focus Group Discussion (FGD), dokumentasi, dan pengamatan peneliti

terhadap dinamika kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai setelah adanya pemberdayaan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan dapat digambarkan sebagai berikut : (a) tujuan kelompok, mulai disusun dan dirancang dengan mengadakan pertemuan antara pengurus, anggota kelompok yang didampingi PPL untuk mendapatkan masukan dan saran dalam menyusun tujuan kelompok, (b) struktur kelompok, mulai disusun dan dirancang dengan melibatkan pengurus, anggota kelompok dan PPL. (c) fungsi kelompok, mulai diaktifkan dengan melibatkan semua anggota kelompok, fungsi kelompok yang sudah berjalan seperti kelompok difungsikan sebagai kelas belajar, pengembangan kemampuan pengetahuan dan keterampilan anggota, dan pengembangan usaha bersama, (d) mengembangkan dan memelihara kelompok, mulai ada kemajuan walaupun belum maksimal, pengembangan pengetahuan, dan keterampilan anggota sudah mulai ada peningkatan, anggota sudah mengenal dan mengaplikasikan teknologi baru. Kelompok tani selalu berusaha memelihara kelompok dengan baik melalui pembagian tugas yang merata sesuai dengan kedudukannya, menumbuhkan norma kelompok (ketaatan anggota terhadap kelompok), sedangkan pengembangan dalam menjalin hubungan kerja sama dengan pihak luar belum berkembang karena belum adanya MoU antara kelompok dengan pihak luar dalam kegiatan usahatani. (e) kesatuan kelompok, penilaian anggota kelompok terhadap kesatuan kelompok tergolong baik, hal ini dibuktikan adanya kebersamaan yang berdasarkan pada besarnya *commitment* dari semua anggota kelompok untuk mendukung pengurus kelompok dan semua kegiatan yang diadakan oleh kelompok tani. (f) suasana kelompok, penilaian anggota kelompok terhadap suasana kelompok tergolong baik/konduusif. Suasana kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai, cukup harmonis, ditandai dengan suasana kekeluargaan, kebersamaan, kekompakan dan kegotong-royongan. Komunikasi antara anggota, atau anggota dengan pengurus cukup baik. (g) tekanan/desakan kelompok, penilaian anggota kelompok terhadap tekanan/desakan kelompok tergolong baik/patuh. Anggota kelompok tani beranggapan bahwa tekanan kelompok ini berfungsi bagi ketaatan terhadap norma-norma kelompok, dan bagi keseragaman dalam aktivitas kelompok. (h) efektivitas kelompok, penilaian anggota kelompok terhadap efektivitas kelompok tergolong baik/efektif. Anggota kelompok tani beranggapan bahwa efektivitas kelompok merupakan salah satu faktor keberhasilan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan cepat dan berhasil baik serta memuaskan

bagi setiap anggota dalam rangka mencapai tujuan kelompok. Kenyataan di lapangan, kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai, selalu melaksanakan tugas-tugas kelompok dengan baik, sehingga efektivitas kelompok lebih dinamis.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai Oleh PPL

Pemberdayaan kelompok tani dalam penelitian ini dilihat dari pelaksanaan pemberdayaan oleh PPL. Kegiatan pemberdayaan kelompok tani dilakukan oleh PPL bersama-sama anggota kelompok tani yang dimulai dengan kegiatan mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan serta peluang-peluang usahatani. Setelah itu PPL dan anggota kelompok tani menyusun rencana kegiatan kelompok dengan membuat rencana kebutuhan kelompok dan rencana definitif kebutuhan kelompok, penyusunan rencana kebutuhan kelompok dilakukan satu periode satu tahun berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani, sedangkan rencana definitif kebutuhan kelompok dilakukan satu musim empat bulan yang merupakan alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana produksi. Berikutnya proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelompok tani melalui kegiatan pembelajaran di lapangan yang berlangsung secara periodik mulai dari penyiapan sarana prasarana, persiapan tanam dengan membuat persemaian, penanaman (penggunaan jarak tanam legowo), pemeliharaan tanaman (pengairan, penyiangan, pemupukan berimbang dan pengendalian hama penyakit), serta penanganan panen dan pasca panen. Pelaksanaan pemberdayaan tersebut selalu didampingi, dipantau, dimonitor, difasiltasi dan dievaluasi oleh PPL.

Kegiatan mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan dan peluang-peluangnya, kegiatan ini dimaksudkan agar kelompok tani mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan. Menyusun rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian yang meliputi memprioritaskan dan menganalisa masalah, identifikasi alternatif pemecahan masalah, identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah, pengembangan rencana kegiatan serta

pengorganisasian pelaksanaannya. Selanjutnya pelaksanaan pemberdayaan yaitu dengan menerapkan rencana kegiatan kelompok tani dalam kegiatan konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal, termasuk dalam kegiatan ini adalah pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan. Kegiatan terakhir dari proses pemberdayaan kelompok tani adalah memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif agar prosesnya berjalan sesuai dengan tujuan.

2. Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai

Kegiatan pemberdayaan kelompok tani di lokasi penelitian terlaksana dengan terjadwal sesuai program pemberdayaan, penyuluh pertanian lapangan aktif mendampingi dan memberikan pembinaan rutin kepada kelompok tani dan anggotanya. Koordinasi antara penyuluh pertanian lapangan dan petani sudah terjalin dengan baik dalam memecahkan masalah maupun koordinasi dalam setiap pertemuan untuk rapat dan musyawarah. Informasi-informasi yang diberikan penyuluh pertanian lapangan mengenai bidang pertanian menambah wawasan dan pengetahuan petani serta kelompok tani sehingga pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok tani semakin baik dan hasil produksi usahatani semakin meningkat. Perkembangan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai Kecamatan Gunung Jati dan Suranenggala pada saat ini menunjukkan adanya peningkatan, kelompok tani mulai merintis unit usahanya seperti unit usaha permodalan melalui simpan pinjam yang mengarah pada usaha keuangan mikro, unit usaha pengadaan sarana produksi, dan unit usaha pemasaran dengan melakukan kerjasama pihak luar atau pelaku agribisnis.

Pengembangan kelompok tani diarahkan pada peningkatan kemampuan kelompok, peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok tani menjadi organisasi yang kuat dan mandiri. Peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai di lokasi penelitian yang telah dilaksanakan adalah sebagai guru, organisator, fasilitator, konsultan, supervisor, pemantau, dan evaluator. Peranan tersebut tidak semua dilakukan oleh PPL sesuai dengan harapan kelompok tani, sehingga masih ada kelemahan, diantaranya:

- 1) Peranan organisator, PPL belum ada upaya mengorganisasikan dalam pengembangan kebutuhan untuk melakukan perubahan kelompok.
- 2) Peranan fasilitator, PPL belum bisa memfasilitasi dalam pengadaan modal, pengadaan kebutuhan kelompok tani dan pembebas dari ketergantungan pada juragan
- 3) Peranan konsultan, PPL hanya memberikan konsultasi pada saat kunjungan lapangan.
- 4) Peranan pemantau, PPL hanya sewaktu-waktu memantau kegiatan pasca panen dan keadaan kelembagaan lain yang mendukung kegiatan kelompok tani.
- 5) Peranan evaluator, PPL jarang mengevaluasi terhadap dampak (*outcome*), kemampuan manajerial kelompok, kepemimpinan, dan kewirausahaan kelompok.

Beberapa teori peranan penyuluh dalam pemberdayaan petani, diantaranya :

- 1) Dahama dan Bhatnagar (1980) telah mengidentifikasi adanya empat peranan penyuluh yang meliputi: (a) Peranan sebagai guru, (b) Peranan sebagai komunikator, (c) Peranan sebagai dinamisator, dan (d) Peranan sebagai organisator.
- 2) Kartasapoetra (1994), peranan penyuluh sebagai peneliti dan sebagai pendidik.
- 3) Maunder (1972), peranan penyuluh sebagai agen perubahan, sebagai peneliti dan sebagai fasilitator.
- 4) Mardikanto (1998), mengemukakan beragam peranan penyuluh dalam satu kata yaitu edfikasi, yang merupakan akronim dari : edukasi, diseminasi informasi/inovasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi.

Bila dikaitkan dengan teori peranan di atas, maka peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pesisir pantai di lokasi penelitian secara esensial memiliki koherensi dengan teori peranan Dahama dan Bhatnagar, Mardikanto, dan Kartasapoetra yaitu peranan sebagai guru atau pendidik. Begitu pula memiliki koherensi dengan teori Maunder dan Mardikanto yaitu peranan sebagai fasilitator. Sedangkan perbedaannya meliputi: (1) Peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai tidak melaksanakan peranan sebagai dinamisator seperti pada teori peranan Dahama dan Bhatnagar, (2) PPL tidak melaksanakan peranan sebagai peneliti seperti pada teori Kartasapoetra dan Maunder, dan (3) PPL tidak melaksanakan peranan diseminasi informasi/inovasi seperti pada teori peranan Mardikanto.

3. Faktor Yang Mendukung PPL Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai

Faktor yang mendukung peranan Penyuluh Pertanian Lapangan dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai di bagi 2 (dua) yaitu faktor eksternal kelompok tani dan faktor internal kelompok tani. Berdasarkan hasil pengamatan pengaruh faktor eksternal kelompok tani terhadap peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani cukup baik, hal ini dibuktikan dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diantaranya adalah : (1) dukungan Kuwu, dibuktikan dengan kehadiran Kuwu pada setiap kesempatan pertemuan tingkat Desa (Rembug Desa) antara PPL dan kelompok tani misalnya dalam pembuatan atau penyusunan RKK dan RDKK oleh kelompok tani (2) dukungan Dinas Pertanian dan BKP5K, pembinaan, bimbingan dan pendampingan terhadap kelompok tani serta bantuan untuk petani miskin melalui program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan). (3) dukungan biaya dan dukungan sarana prasarana (pengadaan bibit dan pupuk anorganik) melalui program SLPTT. Dukungan tersebut memperlancar proses pemberdayaan mulai dari perencanaan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan kelompok tani.

Faktor internal kelompok meliputi : (1) Kepemimpinan Kontaktani Dalam Mengelola Kelompok. Berdasarkan kenyataan di lapangan, kepemimpinan kontak tani dalam memimpin anggota kelompok dikatagorikan cukup baik, kontaktani dalam menjalankan manajemen kelompok sesuai dengan fungsi, tugas, wewenang sebagai ketua kelompok. Kontaktani sudah bisa mengarahkan, menggerakkan, dan memotivasi anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok. Arahan, ajakan, dan motivasi dari kontaktani tersebut sudah diikuti oleh sebagian besar anggota kelompok tani dalam mendukung tujuan kelompok, (2) Sikap Anggota Kelompok Dalam Mendukung Keberhasilan Kelompok. Berdasarkan Hasil pengamatan dan wawancara sikap anggota kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai tergolong cukup baik. Hal ini ditunjukkan sikap anggota kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai yang mendorong keberhasilan kelompok tani. Keberhasilan kelompok akan tercapai apabila tujuan yang direncanakan bisa terwujud, karena tujuan kelompok merupakan unsur dalam pemenuhan kebutuhan yang diperlukan oleh kelompok tani, (3) Kesempatan anggota kelompok dalam mengembangkan kerjasama. Kelompok tani merupakan wadah hubungan dan kerjasama antara sesama kelompok tani

anggota kelompok yang terikat oleh adanya kebutuhan dan tujuan yang sama. Hubungan dan kerjasama ini menurut Marát (1984) akan menentukan hidup dan perkembangan kelompok tani. Berdasarkan Hasil pengamatan dan wawancara, kesempatan anggota dalam mengembangkan kerjasama dalam lingkungan kelompok tergolong cukup baik, karena setiap anggota diberikan kebebasan dalam menjalin hubungan dan kerjasama dalam lingkungan kelompoknya, tetapi kerjasama dengan pihak luar (eksternal kelompok) belum maksimal, karena sampai saat ini kerjasama kelompok tani dengan pihak luar baru mulai dirintis secara perorangan (anggota kelompok tani). Kerjasama yang sudah berjalan adalah kerjasama secara perorangan dalam bentuk batuan modal dari lembaga keuangan untuk pengembangan usahatani dan bantuan dari kios tani berupa pinjaman sarana produksi yang dibayarkan setelah hasil pertanian dipanen, (4) Solidaritas anggota kelompok, Solidaritas adalah rasa kebersamaan dari anggota kelompok dalam mencapai tujuan dan keinginan yang sama. Kelompok tani merupakan wadah hubungan antara sesama anggota kelompok yang terikat oleh adanya kebutuhan dan tujuan yang sama. Kekompakan kelompok merupakan kesatuan kelompok yang dipengaruhi oleh besarnya tanggungjawab (*commitment*) dari para anggotanya. Kekompakan kelompok tercipta dengan adanya rasa keterikatan yang kuat diantara para anggotanya terhadap kelompok. Berdasarkan Hasil pengamatan dan wawancara, solidaritas anggota kelompok dalam menjaga keutuhan dan kekompakan kelompok tergolong cukup baik, karena setiap anggota kelompok merasa satu kekuatan dalam menjalin hubungan dalam lingkungan kelompoknya dan selalu menjaga kebersamaan dalam menjalin dengan pihak luar. Rasa kebersamaan itu tumbuh karena adanya kebutuhan dan tujuan yang sama dalam melaksanakan usahatannya serta adanya saling ketergantungan antara anggota kelompok.

4. Penilaian kelompok tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai terhadap peranan PPL Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani.

Penilaian anggota kelompok tani terhadap peranan penyuluh pertanian lapangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah peranan PPL sebagai guru, organisator, fasilitator, konsultan, supervisor, pemantau, dan evaluator. Hasil pengamatan dan wawancara terhadap anggota kelompok tani tentang penilaian kelompok tani terhadap peranan PPL seorang guru, PPL aktif/sering menyampaikan

pembelajaran, menyampaikan informasi dan teknologi usahatani, penyampaian pembelajaran yang dilakukan oleh penyuluh pertanian lapangan dapat dipahami oleh petani. Proses pembelajaran yang dilakukan PPL tidak bersifat mengurusi melainkan berlangsung sebagai proses belajar bersama yang partisipatif dan dialogis.

Peranan sebagai organisator yang dilakukan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai menurut anggota kelompok tani masih rendah atau kurang maksimal, karena PPL hanya sebatas mengorganisasi dalam pemenuhan kebutuhan pokok yang diperlukan belum ada upaya untuk mengorganisasikan dalam mengembangkan kebutuhan untuk melakukan perubahan. Peranan PPL sebagai fasilitator dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai masih rendah atau kurang memberikan fasilitasi (menjembatani) antara kelompok tani dengan pihak luar baik menghubungkan pada kebutuhan sarprodi, pengadaan modal maupun pemasaran hasil dengan pihak dunia usaha. Hal ini dibuktikan belum adanya kerjasama atau Mou antara kelompok tani dengan pihak luar.

Fasilitasi atau pendampingan yang dilakukan PPL harus bisa melayani kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh kelompok tani, fungsi fasilitasi tidak harus selalu dapat mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan atau memenuhi sendiri kebutuhan-kebutuhan kelompok tani, tetapi seringkali justru hanya sebagai panengah/mediator. Keadaan tersebut sesuai dengan pendapat Mardikanto (1998), PPL harus mampu menjadi jembatan penghubung antara sub-sistem pemerintah/penggerak atau perencana program-program pemberdayaan dengan masyarakat sasarnya. Sebab, hanya dengan menempatkan diri pada posisi seperti itulah penyuluh akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dalam arti mampu mengamankan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan tanpa harus kehilangan kepercayaan dari anggota kelompok tani, peranan PPL diantaranya sebagai jembatan penghubung antara lembaga penelitian dengan kelompok tani. PPL bertugas untuk menyampaikan hasil temuan lembaga penelitian kepada kelompok tani. Sebaliknya kelompok tani berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan penerapan hasil-hasil temuan lembaga penelitian yang dianjurkan tersebut kepada PPL, selanjutnya PPL menyampaikan hasil penerapan teknologi yang dilakukan oleh kelompok tani kepada lembaga penelitian yang terkait sebagai bahan referensi lebih lanjut.

Berkaitan dengan penilaian anggota kelompok tani terhadap peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani, kiranya relevan jika penilaiannya mengacu pada pendapat Sastraatmadja (2009), peranan penyuluh pertanian lapangan dalam pemberdayaan kelompok tani, yaitu: (1) peranan fasilitator (*Facilitative Roles*), (2) peranan pendidik (*Educational Roles*), (3) peranan sebagai fasilitator (*Facilitator Roles*), (4) peranan sebagai evaluator (*Evaluative Roles*). Peranan fasilitator yang dilakukan oleh PPL antara lain sebagai orang yang mampu membantu anggota kelompok tani mau berpartisipasi dalam kegiatan bertani, orang yang mampu mendengar dan memahami aspirasi anggota kelompok, mampu memberikan dukungan, mampu memberikan fasilitas kepada anggota kelompok tani.

Seorang PPL juga harus mampu dalam memberikan pendidikan kepada anggota kelompok, memberikan proses belajar yang terus menerus agar menumbuhkan kesadaran. PPL juga memberikan informasi, dan memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok. Peranan lain dari PPL adalah untuk menjembatani hubungan kelompok tani dengan pihak luar dalam memenuhi kebutuhan kebutuhan pengadaan sarana prasarana, pengadaan modal dan pemasaran hasil usahatani, menjembatani kesenjangan antara praktek yang biasa dijalankan oleh anggota kelompok tani dengan pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang. Peranan PPL dapat dianggap sebagai penyampai dan penyesuaian program nasional dan regional agar dapat diikuti dan dilaksanakan oleh anggota kelompok tani, sehingga program-program pemberdayaan kelompok tani yang disusun dengan itikad baik akan berhasil dan mendapat partisipasi anggota kelompok tani. Peranan PPL terakhir adalah memberikan bimbingan yang berkelanjutan, artinya PPL tidak akan berhenti begitu saja ketika mengetahui bahwa anggota kelompok tani telah dapat melakukan perubahan, tetapi PPL tetap membantu anggota kelompok tani ke arah yang lebih baik lagi.

5. Keberhasilan Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani

Hasil Pemberdayaan Kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai oleh PPL digambarkan pada perubahan partisipasi kelompok, produktivitas kelompok, dinamika kelompok, dan kemandirian kelompok yang lebih baik dari pada sebelum adanya pemberdayaan kelompok tani oleh PPL. Partisipasi anggota kelompok tani

dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani cukup baik, dimana anggota dan pengurus kelompok dengan bimbingan dan arahan PPL membuat perencanaan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani yang meliputi: kegiatan persiapan pengadaan sarana produksi/saprodi, persiapan lapangan untuk penanaman, penanaman padi, pemeliharaan tanaman, pengendalian hama penyakit, dan mengikuti kegiatan pengelolaan panen dan pascapanen, sedangkan partisipasi anggota kelompok masih rendah pada kegiatan evaluasi baik evaluasi pada kegiatan sebelum tanam dan evaluasi terhadap hasil produksi. Kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai mengalami peningkatan produktivitas, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok tani dalam pengelolaan usaha.

Hasil Pemberdayaan Kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai pada dinamika kelompok digambarkan pada perubahan dinamika kelompok tani yang lebih baik dari pada sebelum adanya pemberdayaan kelompok tani oleh PPL, perubahan tersebut terjadi pada tujuan kelompok, struktur kelompok, fungsi kelompok, mengembangkan dan memelihara kelompok, kesatuan kelompok, suasana kelompok, tekanan/desakan kelompok, dan efektivitas kelompok. Kegiatan pemberdayaan kelompok tani oleh PPL dilakukan juga melalui pendekatan kelompok yang “mandiri” karena kelompok tani dibina untuk mandiri melalui kemampuan memecah sendiri masalah yang dihadapi baik teknis, sosial maupun ekonomi. Dalam kegiatan kelompok tani anggota kelompok dibimbing untuk belajar memecahkan masalah-masalah yang dihadapi serta dibimbing untuk membiasakan mencari kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik sehingga secara bertahap anggota kelompok akan menjadi sumber daya manusia yang berinisiatif, produktif dan ber-swadaya, dengan bimbingan yang berorientasi pada pendekatan mandiri, maka kelompok tani dibimbing untuk dapat mengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang mungkin dihadapi.

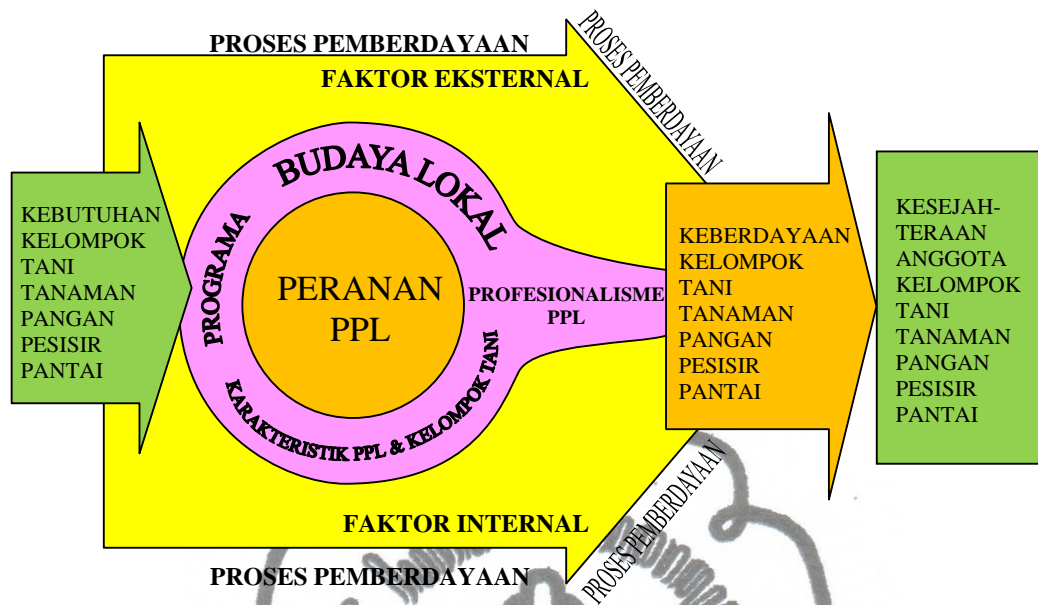
Menurut Jarmie (1994), keberhasilan suatu kegiatan pemberdayaan kelompok dapat diukur dari seberapa jauh telah terjadi perubahan perilaku anggota kelompok baik yang menyangkut: pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Semuanya itu dapat diamati pada : (1) Perubahan-perubahan pelaksanaan kegiatan bertani yang mencakup macam dan jumlah sarana atau teknik bertaninya; (2) Perubahan-perubahan tingkat produktivitas dan pendapatannya; (3) Perubahan dalam

pengelolaan usaha (perorangan, kelompok, koperasi), serta pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari usahataniannya.

6. Model Peranan PPL Yang Efektif Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai

Salah satu tujuan rancangan model adalah untuk melihat keterkaitan antara variabel-variabel sistem kedalam bentuk formal (Rislima, 2009). Model menurut McLeod (2001) adalah penyederhanaan (*abstraction*) dari sesuatu yang mewakili sejumlah objek atau aktivitas yang disebut entitas (keseluruhan). Sementara itu menurut Sasmojo (2003) dalam Mardikanto (2010.b), model adalah deskripsi struktur suatu fenomena yang dinyatakan dalam bentuk-bentuk media yang dapat dikomunikasikan. Inti dari peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani adalah melakukan beragam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok melalui kegiatan pemberdayaan kelompok tani. Pemberdayaan kelompok tani tersebut melibatkan berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya dan teknologi yang satu sama lainnya saling berinteraksi dalam kegiatan pemberdayaan. Peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani merupakan usaha untuk memfungsikan teknologi dalam suatu proses transformasi dalam mengembangkan usaha kelompok tani.

Berhasil tidaknya pemberdayaan kelompok tani oleh PPL adalah sangat tergantung pada pemahaman pelaksanaan pemberdayaan tersebut terhadap perilaku yang berkembang dalam anggota kelompok tani. Dengan demikian, keberhasilan pemberdayaan kelompok tani berhubungan dengan kemampuan atau peranan PPL untuk mengubah dan mempengaruhi perilaku anggota kelompok tani menuju suatu keadaan yang kita inginkan. Rancangan model peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani yang merupakan bagian dari tujuan penelitian ini adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengenalan terhadap struktur model yang dimaksud. Proses pemberdayaan kelompok tani yang berlandaskan pada struktur model dalam penerapannya dapat disebut dengan pendekatan pemberdayaan *bottom-up*, yaitu suatu pendekatan yang didasari pada kebutuhan kelompok tani dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan tingkat penerapan teknologi anggota kelompok tani. Gambar 5.2. menunjukkan struktur model peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai berbasis kebutuhan kelompok.



Gambar 5.2. Model Peranan PPL Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Tanaman Pangan Pesisir Pantai Berbasis Kebutuhan Kelompok.

Pada Gambar 5.2. tampak model peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai. Model peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani harus memperhatikan kebutuhan kelompok tani agar kemanfaatannya bisa dirasakan oleh semua anggota kelompok tani sasaran yang meliputi : fasilitasi dalam pengadaan modal, sarana prasarana produksi, pasar hasil produksi, advokasi kebijakan, dan pendampingan. Dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai harus memperhatikan program pemberdayaan, budaya lokal masyarakat pesisir pantai, karakteristik PPL dan kelompok tani serta profesionalisme seorang PPL yang mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan pihak luar, kemampuan berinovasi yang bermanfaat bagi kelompok tani, memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam upaya memenuhi kebutuhan kelompok tani, dan memiliki kemampuan adaptasi terhadap sosial budaya masyarakat pesisir pantai. Tujuan dari pemberdayaan kelompok tani adalah terciptanya kesejahteraan anggota kelompok tani, keadaan tersebut tercapai apabila kelompok tani sudah berdaya, mandiri, dinamis, mendapat dukungan pemerintah, dukungan biaya, dukungan swasta, dukungan lembaga swadaya masyarakat serta kemauan kelompok tani untuk berusaha lebih baik dari sebelumnya.

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang peranan penyuluh pertanian lapangan dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai yang dilakukan di lokasi penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani oleh PPL diawali dengan mengidentifikasi, dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya, menyusun rencana kegiatan pemberdayaan melalui pembuatan rencana kebutuhan kelompok dan rencana definitif kebutuhan kelompok, menerapkan rencana kegiatan pemberdayaan kelompok melalui pengadaan sarana prasarana produksi, kegiatan persiapan tanaman (persemaian), proses penanaman, pemeliharaan tanaman (penyiangan, pengairan, pemupukan berimbang, dan pengendalian hama penyakit), penanganan panen, pasca panen dan pemasaran, serta memantau proses dan hasil kegiatan pemberdayaan,
2. Peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan di pesisir pantai yang telah dilaksanakan adalah sebagai guru, organisator, fasilitator, supervisor, konsultan, pemantau, dan evaluator, sedang peranan PPL sebagai fasilitator atau jembatan antara kelompok tani dengan pihak luar dan peranan sebagai evaluator belum sesuai dengan harapan kelompok tani.
3. Faktor yang mendukung peranan PPL terdiri dari 2 (dua) faktor yaitu faktor eksternal kelompok tani dan faktor internal kelompok tani. Faktor eksternal kelompok meliputi dukungan pemerintah, dukungan sarana prasarana, dukungan biaya dan efektifitas kelembagaan pendukung, sedangkan faktor internal kelompok meliputi kepemimpinan kontaktani, sikap anggota kelompok dalam mendukung keberhasilan kelompok, kesempatan anggota kelompok dalam pengembangan kerjasama, dan solidaritas kelompok.
4. Penilaian kelompok tani terhadap peranan PPL sebagai guru dalam pemberdayaan kelompok tani PPL aktif dalam proses pembelajaran dan aktif menyampaikan informasi dan teknologi usahatani. Peranan organisator PPL aktif melakukan pengorganisasian pemenuhan kebutuhan kelompok dan menggerakkan partisipasi anggota; sebagai fasilitator PPL kurang aktif dalam memfasilitasi kerjasama dengan pihak luar (lembaga keuangan dan lembaga usaha pertanian/ lembaga pengadaan

- sarana produksi); sebagai konsultan PPL aktif membantu memecahkan masalah; sebagai supervisor PPL aktif melakukan pembinaan dan penilaian terhadap perkembangan usahatani; sebagai pemantau PPL aktif mengadakan pengamatan aktifitas kelompok; sebagai evaluator PPL kurang aktif dalam kegiatan evaluasi karena hanya pada pelaksanaan kegiatan dan akhir kegiatan belum pada perencanaan kegiatan dan dampak (*outcome*) hasil kegiatan pemberdayaan kelompok tani.
5. Hasil Pemberdayaan Kelompok tani tanaman pangan oleh PPL di pesisir pantai tampak pada perubahan partisipasi kelompok, produktivitas kelompok, dinamika kelompok, dan kemandirian kelompok yang lebih baik dari pada sebelum adanya pemberdayaan kelompok tani oleh PPL.
 6. Model peranan PPL dalam pemberdayaan kelompok tani harus memperhatikan kebutuhan kelompok tani, karakteristik kelompok tani dan PPL, budaya lokal, profesionalisme PPL, faktor eksternal dan internal kelompok dan program pemberdayaan yang dibuat untuk meningkatkan keberdayaan kelompok tani dalam mencapai kesejahteraan anggota kelompok.

B. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritik

Berdasarkan hasil temuan pokok-pokok dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Peranan penyuluh pertanian lapangan yang dilakukan dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai adalah peranan sebagai guru, organisator, fasilitator, konsultan, supervisor, pemantau, dan evaluator. Peranan yang belum sesuai harapan kelompok tani adalah peranan sebagai fasilitator pengadaan modal, fasilitator pengadaan kebutuhan kelompok tani, dan peranan sebagai pembebas dari ketergantungan terhadap juragan (pemilik modal).
2. Kegiatan pemberdayaan kelompok merupakan salah satu variabel yang menyebabkan terjadinya perubahan perilaku anggota dan perubahan-perubahan yang menjadi tujuan akhir dari pemberdayaan kelompok.
3. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat/kelompok sangat ditentukan oleh kemauan dan kemampuan seorang penyuluh dalam menjalin hubungan atau menjadi perantara antara pemerintah, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat

dan kelompok tani serta mampu menerjemahkan kebutuhan nyata yang dilihatnya itu menjadi kebutuhan yang dapat dirasakan oleh pemerintah/lembaga pemberdayaan dan masyarakat sasarnya/petani.

2. Implikasi Praktis

Berdasarkan proses analisis dan hasil temuan penelitian yang diperoleh dari kesimpulan ini adalah :

1. Perlu adanya peranan PPL yang lebih intensif dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada juragan (pemilik modal) dalam menjalankan usahatani, peranan fasilitator sebagai penyedia modal, sarana prasarana, pasar hasil produksi, sumber informasi advokasi kebijakan dan pendampingan.
2. Dalam rangka memupuk kemandirian dalam permodalan peranan Penyuluh Pertanian Lapangan pada pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai perlu lebih ditingkatkan lagi khususnya peranan sebagai fasilitator atau memfasilitasi hubungan kelompok tani dengan pihak luar, khususnya jalinan kerja sama antara kelompok tani dengan lembaga keuangan.
3. Model pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perlu memperhatikan kebutuhan yang diperlukan oleh kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai agar bisa berjalan dengan efektif dan efisien serta kemanfaatannya bisa dirasakan oleh semua anggota kelompok tani sasaran.

C. Saran

Mengacu pada hasil, pembahasan dan kesimpulan di atas penulis merekomendasikan saran alternatif dan tindakan sebagai berikut :

1. Untuk Penyuluh Pertanian Lapangan
 - a. Perlu adanya peranan PPL yang lebih intensif dalam pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada juragan (pemilik modal) dalam menjalankan usahatani.
 - b. Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan dalam pemberdayaan kelompok tani perlu lebih ditingkatkan lagi khususnya peranan sebagai fasilitator atau memfasilitasi hubungan kelompok tani dengan pihak luar, jalinan kerja sama antara kelompok tani dengan lembaga keuangan, jalinan kerjasama dengan

commit to user

lembaga pengadaan sarana prasarana produksi pertanian, dan memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar dengan lembaga agribisnis.

2. Untuk Pemerintah

- a. Perlu adanya dukungan pemerintah dalam meningkatkan SDM PPL dan untuk memobilisasi dan mengoptimalkan peranan PPL dalam melaksanakan pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan pesisir pantai.
- b. Perlu adanya dukungan kebijakan, sarana prasarana dan dana dari pemerintah dalam meningkatkan pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha produksi, pengembangan manajemen kelompok, dan pengembangan pemasaran kelompok tani.

3. Untuk Kelompok tani

- a. Perlu memperkuat dan fungsi kelompok tani dengan menjadikan kelompok tani sebagai unit usahatani, unit usaha pengolahan hasil, unit usaha sarana prasarana, unit usaha pemasaran, dan unit usaha keuangan mikro.
- b. Perlu adanya pengkoordinasian pendayagunaan dan pemanfaatan sumberdaya dalam kelompok tani dan di luar kelompok tani untuk pengembangan kelompok tani.
- c. Perlu adanya pengalokasian dana dari penyisihan hasil usahatani anggota kelompok untuk pengembangan usaha kelompok tani.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengendali Bimas. 1992. *Teknis Peningkatan Kemampuan Kelompok Tani*. Jakarta. Departemen Pertanian.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Cirebon Dalam Angka Tahun 2010*. BPS Kabupaten Cirebon.
- Berlo, D.K. 1961. *"The Process of Communication"*. New York. Holt, Rinehart, and Waston.
- Bertrand, A.L. 1972. *Social Organization. A General System and Role Theory Perspectiv*. Philadelphia. David company.
- Dahama, O.P. and O.P Bhatnagar. 1980. *Education and Communication for Development*. New Delhi. Ox 282 H Publishing CO.
- Davis, K and Newstrom. 1995. *Community Empowerment : A Reader in Participation and Development*. London. Zed Books.
- Departemen Pertanian, 1997. *Pembinaan Kelompok Tani*. Jakarta. Pusat Penyuluhan Pertanian.
- , 2007. *Pembinaan Kelompok Tani – Nelayan*. Jakarta. Pusat Penyuluhan Pertanian
- , 2010. *Tantangan Pembangunan Pertanian*. Jakarta. Pusat Penyuluh Pertanian.
- , 2011. *Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Kelompok Tani*. Jakarta. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
- Harahap dan Subhilhar. 2006. *Partisipasi Kelompok Tani dan Nelayan Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove*. Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Hikmat, H. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung. Humaniora Utama Press.
- Jarmie, M.Y 1994. *Sistem penyuluhan Pembangunan Pertanian Indonesia*. Disertasi Institut Pertanian Bogor.
- Kelsey, L.D. and C.C. Hearne. 1975. *Cooperative Extension Work*. New York. Comstock Publishing Associates
- Klob. 1995. *Human Resources Management Experiential Approach*. New York. Mc Growth.

- Lammers, J., G. Duff, and P. Feil. 2001. *Developing Client-oriented, agricultural advisory system in Azerbaijan*. APEN International Conference. Victoria, 18 - 21 July, 2001.
- Lionberger. 1960. *Adoption of New Ideas and Practices*. Iowa. The Iowa State University Press.
- Lionberger, H.F. and P.H. Gwin, 1983. *Communication Strategies*. Illinois. The Interstate Orienters & Publishers, Inc.
- Lippit R.J. Watson. 1958. *The Dynamics of Planned Change*. New York. Harcourt, Brace and World, Inc.
- Lippit R.J. Watson. and B. Westley. 1992. *Technology Transfer*. Illinois. The Interstate Orienters & Publishers, Inc.
- Marát, 1984. *Dinamika Penyuluhan Pertanian*. Bandung, Galia Indonesia.
- Mardikanto, T. 1987. *Penyempurnaan dan Penetapan Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan*. Lokakarya Sistem LAKU Departemen Pertanian. Jakarta.
- , 1988. *Komunikasi Pembangunan*. Surakarta. Sebelas Maret University Press.
- , 1995. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Surakarta. Sebelas Maret University Press.
- , 1998. *Penerapan Konsep Bauran Pemasaran Untuk Mengefektifkan Penyuluhan*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- , 2001. *Prosedur Penelitian Penyuluhan Pembangunan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Surakarta. Prima Theresia Pressindo.
- , 2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Surakarta. Sebelas Maret University Press.
- , 2010a. *Metode Penelitian dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat*. Surakarta. Sebelas Maret University Press.
- , 2010b. *Model-model Pemberdayaan Masyarakat*. Surakarta. Sebelas Maret University Press.
- Maunder, Addison H. 1972. *Agricultural Extension*. Food and Agriculture Organization of The United Nation. Rome. First Printing
- McLeod, R. 2001. *Management Information System: A Study of Computer-Based Information Systems*, Sixth Edition. New Jersey: Prentice Hall.

- Miftah, M, 2006. *Efektifitas Organisasi Penyuluhan Pertanian*. Jakarta. Erlangga
- Mosher, A.T. 1966. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. Jakarta. CV. Yasaguna.
- Nasir. 2010. *Pengembangan Dinamika Kelompok Tani*. <http://www.deptan.go.id/artikel.11.html>.
- Payne, Malcom. 2007. *Modern Social Work Theory*. Second Edition. London . MacMillan Press Ltd., Hal. 266.
- Robin, Lionel. 2005. *International Economics Journal*. (35) ; 251 -266.
- Priyono dan A.M. Pranaka, 1996. *Kapita Salecta Manajemen dan Kepemimpinan*. Jakarta. Inhil-Co.
- Rislina F.S. 2009. *Merancang Model Pengembangan Masyarakat Pedesaan Dengan Pendekatan System Dynamics*. Jakarta. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Press.
- Rogers, EM. 1983. *Diffusion of Innovation*. New York. Free Press.
- Samsudin, U. 1987. *Dasar-dasar Penyuluhan dan Modernisasi Pertanian*. Bandung. Benacipta.
- Sanders, Irwin T. 1966. *The Community*. In *Introduction to A social System*. New York. The Ronald Press Company.
- Santosa S. 2006. *Dinamika Kelompok*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Sarosa B. 1998. *Pengantar Manajemen*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Sastraatmadja, E. 2003. *Penyuluhan Pertanian Falsafah dan Strategi*. Bandung. Penerbit Alumni.
- Slamet, M, 1987. "Memantapkan Penyuluhan Pertanian di Indonesia" Makalah disajikan dalam Kongres Perhiantani. Subang : 5 - 8 Oktober 1987.
- , 2000. *Memantapkan Posisi dan Meningkatkan Peranan Penyuluhan Pembangunan Dalam Pembangunan*. Seminar Pemberdayaan Sumber-daya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani. Bogor : 6 - 7 September 2000.
- , 2003. *Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan*. Bogor. Penerbit IPB Press.
- , 2004. *Dinamika Kelompok*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Soewardi, H. 1987. "Perkembangan Penyuluhan Pertanian di Indonesia". Makalah disajikan dalam Kongres Perhiantani. Subang : 5 - 8 Oktober 1987.

- Soewardi, H. 1979. *Memperbaiki Sistem Latihan dan Kunjungan*. Yogyakarta. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia.
- Supriyono, O.S dan A.M. Pranarka, 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta. Centre For Strtegic and International studies.
- Sumodiningrat G. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Edisi Kedua. Jakarta. Bina Rena Pariwisata.
- Suradisastra, K. 2008. *Startegi Pemberdayaan Kelembagaan Petani*. Agro Ekonomi. 26-2. Bogor. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Sutaryat Trisnamnsyah. 2008. *Model Pembelajaran Partisipatif Dalam Pemberdayaan Partipasi Kelompok Tani*. Bandung. Disertasi Prodi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sutopo. H.B . 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta. Sebelas Maret Universitas Press.
- Syamsiah, M. 1996. *Pembinaan Kelompok*. Jakarta. Universitas Terbuka.
- Syahyuti. 2007. *Strategi dan Tantangan dalam Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (KELOMPOK TANI) sebagai Kelembagaan Ekonomi di Pedesaan*. Bogor. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Swanson. 1984. *Agricultural Extension Manual*. Roma. Food Agricultural Organization.
- Van den Ban dan H.S Hawkins..1999. *Penyuluhan Pertanian*. Yogyakarta. Kanisius.
- Yin, R.K. 1987. *Case Study Reearch: Design and Methods*. Beverly Hills, CA: Sage Publication.

BIODATA

Nama Lengkap : Achmad Faqih
 NIK/NIDN : 51680125/0423116801
 Tempat dan Tanggal Lahir : Cirebon, 23 Nopember 1968
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pangkat/Golongan : Penata Tk 1/III.d
 Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 Alamat Rumah : Puri Celancang 2 Blok C4 No. 72 RT/RW 02/08 Desa Purwawinangun Kec. Suranenggala Kab.Cirebon
 Alamat e-mail : afaqih39@yahoo.com
 Pekerjaan : Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
 Alamat Kantor : Jalan Pemuda No. 32 Kota Cirebon Jawa Barat

A. RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Institusi	Kota	Tahun Lulus	Bidang Studi	Keterangan
1	Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon	Cirebon	1993	Budidaya Pertanian	S1
2	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen "IMMI" Jakarta	Jakarta	2004	Ilmu Manajemen	S2

B. PENGALAMAN PENELITIAN

No	Tahun	Judul Penelitian
1	2002	Pengaruh Konsentrasi Giberelin dan Panjang Daun Bibit Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Bawang Daun (<i>Allium fistulosum L.</i>)
2	2003	Pengaruh Konsentrasi Larutan IAA dan Berbagai Bahan Stek Terhadap Pertumbuhan Bibit Tanaman Lada (<i>Piper nigrum L.</i>)
3	2003	Analisis Ekonomi Kegiatan Usahatani dan Beberapa Kegiatan Pengolahan Hasil Tanaman Singkong (<i>Manihot utilissima L.</i>)
4	2004	Hubungan Sosial Ekonomi Petani dengan Penerapan Teknologi Usahatani Bawang Merah (<i>Allium asolanikum L.</i>)
5	2004	Analisis Faktor-faktor Ekonomi Pada Usahatani Caisin Antara yang Menerapkan dengan Tidak Menerapkan Teknologi Bokashi dan EM-5
6	2005	Analisis Penggunaan Faktor Produksi Tebu Terhadap Pendapatan Petani
7	2005	Analisis Biaya, Pendapatan dan Kelayakan Secara Finansial Usahatani Bawang Merah (<i>Aallium asolanicum L.</i>)
8	2006	Analisis Penggunaan Faktor Produksi Pada Usahatani Cabai Besar (<i>Capsicum annum L.</i>)
9	2006	Analisis Penggunaan Faktor Produksi Pada Usahatani Cabai Besar (<i>Capsicum annum L.</i>)

No	Tahun	Judul Penelitian
10	2007	Pemberdayaan Perempuan Tani dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga
11	2007	Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Melalui Penerapan Metode Partisipasi Rural Appresial (PRA)
12	2008	Hubungan Penguasaan Lahan dengan Kontribusi Pendapatan Usahatani
13	2008	Analisis Usahatani Biji Melinjo dan Emping Melinjo
14	2009	Dampak Program Ketahanan Pangan Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Padi
16	2010	Analisis Usahatani Pola Tanam Ganda (Polikultur)
17	2010	Hubungan Faktor Internal dan Eksternal Kelompok Dengan Tingkat Kemampuan Kelompok Tani

C. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Sumber Dana
1	2008	Penyuluhan dan Pembinaan Kelompok Tani : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Pengembangan Agribisnis Dengan Pemanfaatan Bahan Baku Pertanian Lokal	Faperta Unswagati
2	2009	Penyuluhan dan Pembinaan Kelompok Tani dalam Analisis Usahatani Padi Sawah antara Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) dan non PTT	Faperta Unswagati
3	2010	Pemberdayaan Kelompok Tani melalui Program Pengemukan Domba. Kerjasama LPPM Unswagati dan PT. Pertamina EP 3 Region Jawa	PT. Pertamina EP 3 Region Jawa
4	2012	Sumber Daya Lahan Pertanian Dalam Upaya Menunjang Perwilayahan Komoditas Pertanian di Kabupaten Kuningan	BAPPEDA Kabupaten Kuningan Jawa Barat

D. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL ILMIAH

No	Tahun	Judul	Volume/ Nomor	Nama Jurnal
1	2004	Pengaruh Konsentrasi Giberelin dan Panjang Daun Bibit Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Bawang Daun (<i>Allium fistulosum L.</i>)	Nomor 8 Tahun XV	Wawasan Tridharma Kopertis Wilayah IV Bandung ISSN 0215-8256
2	2005	Pengaruh Konsentrasi Larutan IAA dan Berbagai Bahan Stek Terhadap Pertumbuhan Bibit Tanaman Lada (<i>Piper nigrum L.</i>)	Nomor 10 Tahun XVII	Wawasan Tridharma Kopertis Wilayah IV Bandung ISSN 0215-8256

No	Tahun	Judul	Volume/ Nomor	Nama Jurnal
3	2005	Analisis Ekonomi Kegiatan Usahatani dan Beberapa Kegiatan Pengolahan Hasil Tanaman Singkong (<i>Manihot utilissima L.</i>)	Nomor 2 Volume 1	Grage Ekonomi Fakultas Ekonomi Unswagati Cirebon
4	2005	Hubungan Sosial Ekonomi Petani dengan Penerapan Teknologi Usahatani Bawang Merah (<i>Allium ascolanikum L.</i>)	Nomor 4 Tahun XVIII	Wawasan Tridharma Kopertis Wilayah IV Bandung ISSN 0215- 8256
5	2006	Analisis Faktor-faktor Ekonomi Pada Usahatani Caisin Antara yang Menerapkan dengan Tidak Menerapkan Teknologi Bokashi dan EM-5	Volume 2 No. 1.	Jurnal Agrijati ISSN No.1907-1027
6	2007	Analisis Penggunaan Faktor Produksi Tebu Terhadap Pendapatan Petani	Volume 5 No. 2.	Jurnal Agrijati ISSN No.1907-1027
7	2008	Analisis Biaya, Pendapatan dan Kelayakan Secara Finansial Usahatani Bawang Merah (<i>Allium ascolanicum L.</i>)	Nomor 12 Tahun XX Juli 2008	Wawasan Tridharma Kopertis Wilayah IV Bandung ISSN 0215- 8256
8	2008	Analisis Penggunaan Faktor Produksi Pada Usahatani Cabai Besar (<i>Capsicum annum L.</i>)	Nomor 4 Tahun XXI Nopember 2008	Wawasan Tridharma Kopertis Wilayah IV Bandung ISSN 0215- 8256
9	2008	Pemberdayaan Perempuan Tani dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga	Volume 17 No.05. 2008	AGRITEK.LPPM Institut Pertanian Malang. Jurnal Terakreditasi. No.026/DIKTI/KEP/2 005
10	2008	Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Melalui Penerapan Metode Partisipasi Rural Appresial (PRA)	Volume 17 No.05. 2008	AGRITEK.LPPM Institut Pertanian Malang. Jurnal Terakreditasi. No.026/DIKTI/KEP/2 005
11	2008	Hubungan Penguasaan Lahan dengan Kontribusi Pendapatan Usahatani	Volume 17 No.11. Edisi Khusus 2008	AGRITEK.LPPM Institut Pertanian Malang. Jurnal Terakreditasi. No.026/DIKTI/KEP/2 005

No	Tahun	Judul	Volume/ Nomor	Nama Jurnal
12	2009	Analisis Usahatani Biji Melinjo dan Emping Melinjo	Volume 3 Nomor 2 Tahun 2009	LOGIKA. Majalah Ilmiah LPPM UNSWAGATI Cirebon. ISSN.216-8499
13	2010	Dampak Program Ketahanan Pangan Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Padi	Volume 4 No.2.hal 45- 55.Nopem ber 2010	AGRICA EKSTENSIA Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan (STTP Medan). ISSN. 1978-5054
14	2010	Analisis Usahatani Pola Tanam Ganda (Polikultur)	Volume IV Tahun III Edisi Desember 2010	LOGIKA. Majalah Ilmiah LPPM UNSWAGATI Cirebon. ISSN.216-8499
15	2010	Hubungan Faktor Internal dan Eksternal Kelompok Dengan Tingkat Kemampuan Kelompok Tani	Volume 15 No. 1 Tahun 2010	Jurnal Agrijati ISSN No.1907-1027
16	2011	Fungsi Kelompok Tani Dalam Penerapan Teknologi Produksi Padi Sawag	Volume V Tahun IV. Edisi Juli 2011	LOGIKA. Majalah Ilmiah LPPM UNSWAGATI Cirebon. ISSN.216-8499
17	2011	Hubungan Antara Karakteristik Petani dan Dinamika Kelompok Tani Dengan Keberhasil Program PUAP	Volume V Tahun IV. Edisi Desember 2011	LOGIKA. Majalah Ilmiah LPPM UNSWAGATI Cirebon. ISSN.216-8499

E. PENGALAMAN PENULISAN BUKU

No	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1	2009	MANAJEMEN AGRIBISNIS	122	Dee Publish ISBN: 978-602-95298-8-3
2	2010	KEPENDUDUKAN (Teori, Fakta dan Masalah)	205	Dee Publish ISBN: 978-602-96846-7-4
3	2010	Dinamika Kelompok Tani Pantai Utara Jawa	130	Penerbit Swagati Press ISBN: 978-602-8125-60-4

No	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
4	2011	TATANIAGA PERTANIAN	320	IPB Press ISBN: 978-979-493-351-0

F. PENGALAMAN PROSIDING SEBAGAI PENYAJI PADA SEMINAR NASIONAL DAN INTERNASIONAL

No	Tahun	Judul Makalah	Level Seminar	Penyelenggara
1	2010	Correlation of Economic Social Farmer With Application of Shallot Intregated Pest Manajemen	Seminar Internasional	Universitas Lampung dan University Kentucky USA
2	2011	Hubungan Antara Karakteristik Petani dan Dinamika Keompok Tani Dengan Keberhasilan Program PUAP	Seminar Nasional	Universitas Islam Bandung
3	2011	Hubingan Pemberdayaan Kelompok Tani Dengan Penerapan Teknologi Pemupukan Berimbang Padi	Seminar Nasional	Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta

G. PENGHARGAAN DAN SERTIFIKAT PADA KEGIATAN LOMBA KARYA TULIS ILMIAH, WORKSHOP, TEMU ILMIAH DAN SEMINAR

No	Tahun	Judul/Tema	Penyelenggara
1.	1989	Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah Se-Wilayah IV Propinsi Jawa Barat	Universitas Pasundan. Bandung
2.	1999	Peserta DIKLAT (Pendidikan dan Peatihan) bagi Pengelola LEPMM (Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri)	LPPM ITB dan Departemen Koperasi dan PKM
3.	2003	Peserta Pelatihan Orientasi Pengusaha Bisnis Jaringan	PT. Usahajaya Ficoprasional. Jakarta
4	2003	Peserta Seminar Nasional Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan Pelanggan Dalam Upaya Memenangkan Persaingan Pada Pasar Global	Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta
5.	2005	Nara Sumber. Seminar Sehari "Reaktualisasi Peran Mahasiswa Pertanian Bagi Dunia Agribisnis Dalam Menumbuhkan Skill Entrepreneurship <i>commit to user</i>	Fakultas Pertanian Unswagati Cirebon

No	Tahun	Judul/Tema	Penyelenggara
6.	2007	Peserta Diskusi Panel Tingkat Nasional tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Plasma Nutfah Untuk Tata Kehidupan Yang Harmonis	Komisi Nasional Sumber Daya Genetik. Jakarta
7.	2007	Peserta Seminar Internasional. Management of Agricultural Genetic Resource	Indonesian Center for Agricultural Biotechnology and Genetic Resources Research and Development
8.	2008	Peserta Seminar Nasional. Menjawab Tantangan Isu Kerawanan Pangan Melalui Peningkatan Produksi Komoditi Pertanian Dengan Aplikasi Teknologi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani	Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian UNSIL dan Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia
9.	2008	Peserta Seminar Peningkatan Citra Penyuluhan Pertanian	Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. Surakarta Jawa Tengah
10	2009	Peserta Workshop dan Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program CSR/PK-BL	Program Doktor Pemberdayaan Masyarakat Universitas Sebelas maret. Surakarta Jawa Tengah
11	2009	Peserta Seminar dan Temu Ilmiah Tingkat Nasional Revitalisasi Pertanian dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Global	Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. Surakarta
12	2009	Peserta Seminar Nasional Peningkatan Produksi Gula dan Kesejahteraan Petani Tebu di Indonesia	Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
13	2010	Peserta Seminar Nasional Lingkungan Hidup	Kementrian Lingkungan Hidup
14	2010	Peserta Seminar Nasional Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Penegak Hukum dan Masyarakat	LPPM Univesitas Swadaya Gunug Jati Cirebon
15	2010	Participant Seminar Internasional Globalization : Social Cost and Benefits for The Third World	Faculty of Social and Political Sciences Sebelas Unyversity Solo
16	2010	Peserta Seminar Nasional Agribisnis Bagian Mata Rantai Ketahanan Pangan Nasional	Program Pascasarjana Magister Ilmu Pertanain Unswagati Cirebon
17	2010	Peserta Seminar Nasional Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR)	Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta

No	Tahun	Judul/Tema	Penyelenggara
19	2010	Peserta Sosialisasi Program Pengabdian Kepada Masyarakat DP2M Ditjen Dikti	LPPM Univesitas Swadaya Gunug Jati Cirebon
20	2010	Peserta Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) DP2M Dikjen Dikti	LPPM Univesitas Swadaya Gunug Jati Cirebon
21	2010	Peserta Seminar Nasional Percepatan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Untuk Pembangunan	LPPM Univesitas Swadaya Gunug Jati Cirebon
22	2010	Pemateri Seminar Internasional ; Presenter International Seminar on Holticulture to Support Food Security 2010	Lampung University and Kentucky University USA
23	2010	Peserta Seminar Nasional Pelaksanaan CD/CSR	Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta
24	2011	Pemateri Seminar Nasional : Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi dan Humaniora	Universitas Islam Bandung
25	2011	Pemateri Seminar Nasional : Revitalisasi Peran UMKM Dalam Pembangunan Melalui Penguatan Sektor Agronindustri	Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta
26	2013	Pesrta Lokakarya Nasional : Kerjasama Kelembagaan Pusat dan Daerah Untuk Meningkatkan Kinerja Forum Tanggung jawab Sosial	Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Kadin Indonesia

Surakarta, Mei 2013

Achmad Faqih